

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KONSTITUSI

LAPORAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
Tahun 2024 bagi Partai Politik
Angkatan III

Bogor, 7 s.d. 10 Oktober 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan III ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para tim hukum Partai Politik mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota.

Kegiatan ini dibuka oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh perwakilan pimpinan Partai Politik, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan III ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum.....	1
A.2. Tujuan.....	4
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan.....	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta.....	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>	7
B.6.3. Acara Pembukaan	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN.....	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	11
D. HAMBATAN.....	20
E. PENUTUP.....	20
F. LAMPIRAN	21



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Jadwal Kegiatan**
- 3. Surat Perjanjian Kerjasama**
- 4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
- 5. Bahan Penjelasan Teknis**
- 6. Panduan Penggunaan SIMULTAN**
- 7. Panduan Moderator**
- 8. Panduan Narasumber**
- 9. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 10. Kumpulan Materi Narasumber**
- 11. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 12. Surat Tugas Narasumber**
- 13. Surat Tugas Peserta**
- 14. Daftar Hadir Peserta**
- 15. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
- 16. Penilaian Hasil Praktek Peserta**
- 17. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
- 18. Tata Tertib Peserta**
- 19. Data Peserta Registrasi**
- 20. Laporan Keuangan**



PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024
BAGI PARTAI POLITIK ANGKATAN III
Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024**

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan dimaksud. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Di pemilihan Kepala Daerah tahun ini akan diselenggarakan di 545 daerah yang meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran Pilkada, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, seperti lembaga penyelenggara Pilkada (KPU), lembaga pengawas Pilkada (Bawaslu), aparat penegak hukum, dan partai politik sebagai peserta Pilkada.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan



substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pilkada, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pilkada yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi tim hukum Partai Politik sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon atau pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III”.

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

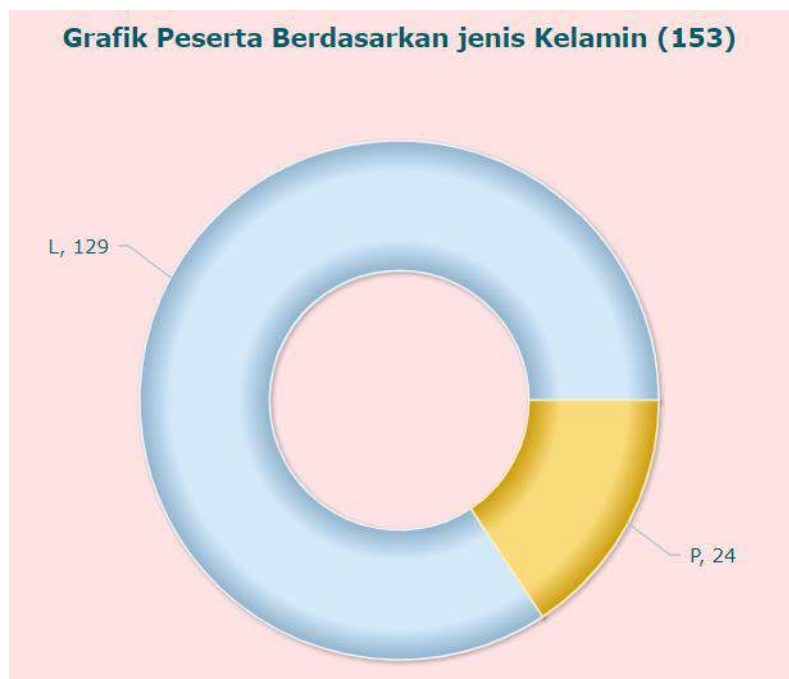
B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 153 orang pengurus atau anggota Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Ummat, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

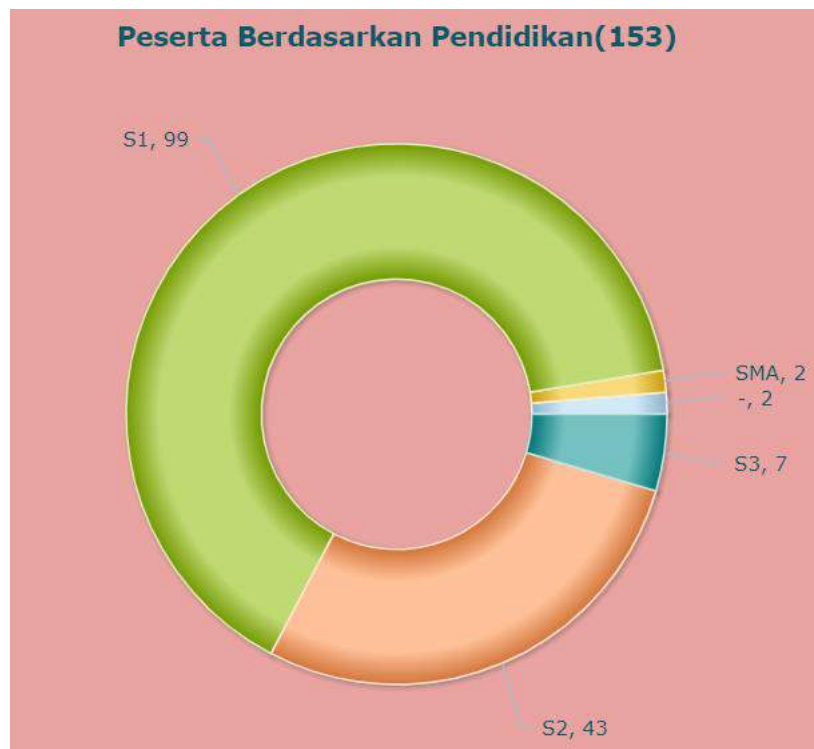
Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III:

Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin

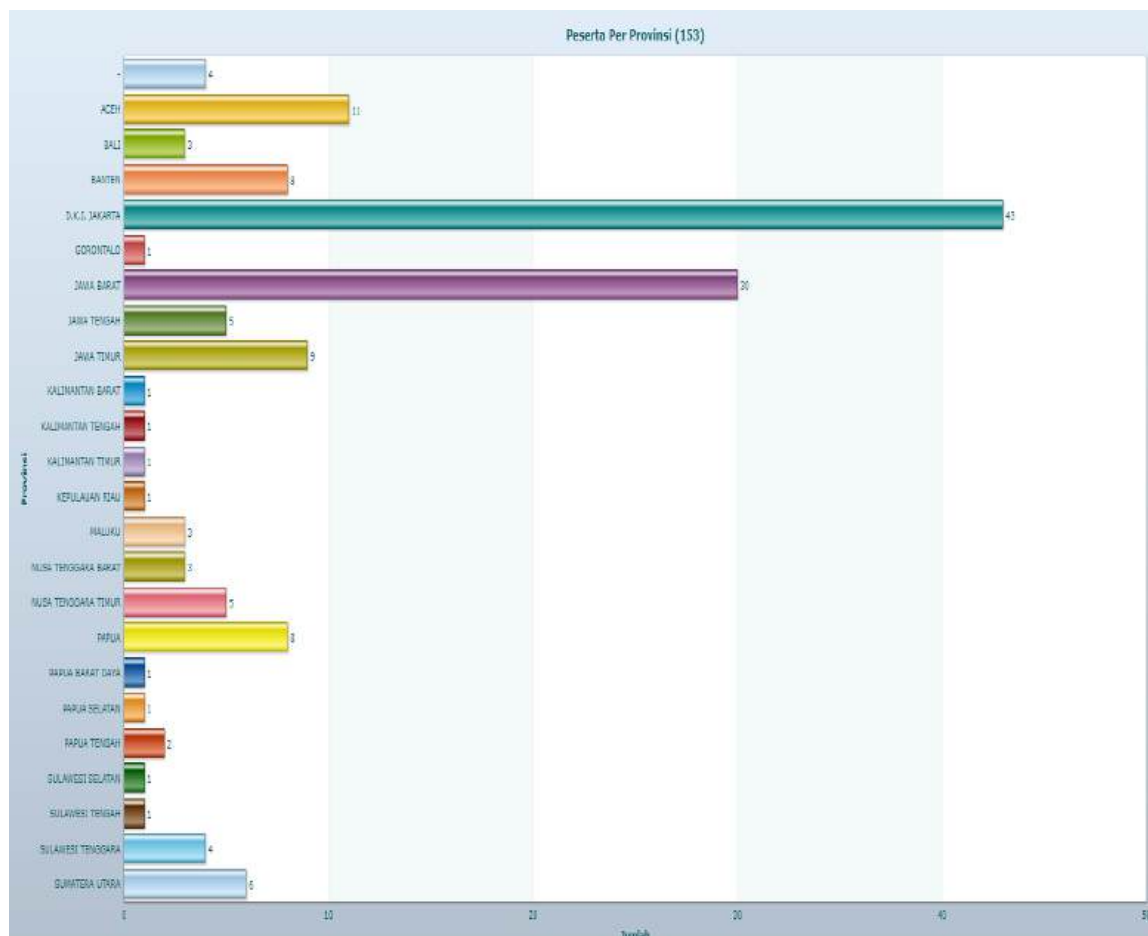
Grafik Peserta Berdasarkan jenis Kelamin (153)



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 7 Oktober 2024 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan seminar kits oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bapak Mundiri dan Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 7 Oktober 2024 pukul 14.30 s.d. 15.30



WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H. pada Senin, 7 Oktober 2024 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Heru Setiawan, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Hymne Mahkamah Konstitusi, Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Mars Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024	1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H 2. YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.
2.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
3.	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
4.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. 2. Rudi Kurniawan



NO.	MATERI	NARASUMBER
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	1. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si. 2. Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H. 3. Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H. 4. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	1. Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si. 2. Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H. 3. Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H. 4. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara PHP Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.



Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 10 Oktober 2024 oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 10,80 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 110 menunjukkan nilai sebesar 1,65882. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **2,63**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,62 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,67 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,66 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,69 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,66 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:



1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,60 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi rasa pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghadirkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,46 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan yaitu 3,69 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,74 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,62 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,81 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan**



nilai 3,65 dengan kategori Baik. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,66 yang tergolong kategori Baik.**

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,55	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,71	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,60	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,62	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,71	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,65	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,65	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	
	Moderator yang paling menarik	1. Santhy Kustrihardiani 2. Angga Putri Gardina	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,67	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,67	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,65	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,66	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,68	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,67	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,74	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,69	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,66	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,65	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,55	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,60	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi rasa yang beragam dan enak	3,33	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,59	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,46	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Ruang aula dan kelas terjaga kebersihannya	3,73	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,66	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,69	Baik
Layanan Keamanan			
18	Sistem keamanan Pusdik membuat peserta merasa aman	3,74	Baik
19	Petugas keamanan ramah dan responsif	3,75	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,74	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Layanan sistem informasi pendidikan dapat diakses dengan mudah	3,71	Baik
21	Jaringan internet Pusdik memiliki kecepatan yang baik	3,53	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,62	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	3,81	Sangat Baik
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,65	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,66	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 2,63 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 dengan nilai maksimal 4, maka tingkat pemahaman peserta pembelajaran menjadi 4. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,66 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,66+4)/2 = 3,83$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,53**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Sangat Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta



setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**

- a) Perlu ada *game* atau *ice breaking* yang melibatkan semua peserta;
- b) Sesi hiburan dapat lebih panjang dan penyanyinya lebih dari 1 orang;
- c) Waktu penyelenggaraan kegiatan dan sesi diskusi dapat lebih lama;
- d) Narasumber perlu menjelaskan lebih detail tentang *obscure liber*;
- e) Waktu mengerjakan tugas dapat lebih lama;
- f) Memberikan apresiasi pada peserta yang paling disiplin dan inspiratif;
- g) Perhatikan waktu agar tidak ngaret dan harus konsisten pada jadwal;
- h) Perlu ada simulasi persidangan (peradilan semu).

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**

- a) Sarung bantal dan seprei diganti minimal 2 hari sekali;
- b) Perlu pengharum ruangan di kamar mandi;
- c) Air kamar mandi tidak keluar dengan stabil;
- d) Disediakan TV di dalam kamar;
- e) Engsel pintu kamar mandi 232 Grha 4 perlu diperbaiki;
- f) Ketersediaan air panas di kamar perlu ditambah;
- g) Internet lambat;
- h) Perlu ada telepon di dalam kamar;
- i) Kualitas hoodie kurang memuaskan;
- j) Perlu diperhatikan ketersediaan alat makan di ruang makan;
- k) Variasi menu makanan (terutama sarapan) perlu ditambah;
- l) Ada lalat di makanan;
- m) Lebih selektif memilih *catering* makanan karena beberapa makanan tidak ada rasa dan kurang bersih;
- n) *Snack* lebih baik sudah di *pack* agar tidak rebutan;
- o) Peserta dapat diberikan uang saku;
- p) Akomodasi di perjalanan juga perlu diganti.



Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 145 orang dari 153 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengerjakan tugas praktik.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 24 Oktober 2024
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Mundiri
NIP. 19690808 199012 1 001



LAMPIRAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan teknis yang disampaikan oleh Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Kapus Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Foto bersama setelah acara pembukaan.



Materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah disampaikan oleh YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. dan YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 oleh Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 oleh Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh Tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 oleh Bapak Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum..



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPKada Tahun 2024 dan Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPKada Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan senam pagi.

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2024 BAGI PARTAI
POLITIK ANGKATAN III

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 7 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Penjelasan Simultan dan Pre-Test</i>	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Ketua MK Sekjen MK	Aula Grha Konstitusi 3
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 8 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 17.30 WIB	ISHOMA		
	17.30 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB			
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7

Rabu, 9 Oktober 2024	08.30 – 09.30 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Kamis, 10 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3

	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Kapusdik 3. Sambutan Kapustik MK 4. Pembacaan Doa	Kapustik MK	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI POLITIK TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK ANGKATAN III

NOMOR : 47/PK/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Lima belas** bulan **Agustus**, tahun **Dua ribu dua puluh empat** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nanang Subekti**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **M. Herizal, SP., M.Si.**, Ketua DPP Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh (SIRA), berkedudukan di Keude Paya Bakong, Paya Bakong, Aceh Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perwakilan partai politik peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
- c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 160 (seratus enam puluh) orang sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:

- 15 (lima belas) orang pengurus dan/atau anggota Partai Buruh;
 - 15 (lima belas) orang pengurus dan/atau anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
 - 15 (lima belas) orang pengurus dan/atau anggota Partai Kebangkitan Nusantara;
 - 15 (lima belas) orang pengurus dan/atau anggota Partai Hati Nurani Rakyat;
 - 15 (lima belas) orang pengurus dan/atau anggota Partai Garda Republik Indonesia;
 - 15 (lima belas) orang pengurus dan/atau anggota Partai Bulan Bintang;
 - 15 (lima belas) orang pengurus dan/atau anggota Partai Solidaritas Indonesia;
 - 15 (lima belas) orang pengurus dan/atau anggota Partai Persatuan Indonesia;
 - 15 (lima belas) orang pengurus dan/atau anggota Partai Persatuan Pembangunan;
 - 15 (lima belas) orang pengurus dan/atau anggota Partai Ummat;
 - 5 (lima) orang pengurus dan/atau anggota Partai Adil Sejahtera Aceh;
 - 5 (lima) orang pengurus dan/atau anggota Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **23 September 2024**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **23 September 2024**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta

- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI BEA MATERAI DAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Nanang Subekti
Plt. Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Perwakilan
Partai Politik Peserta Kegiatan



M. Herizal, SP., M.Si.
Ketua DPP Partai Solidaritas Independen
Rakyat Aceh (SIRA)



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK ANGKATAN III

Bogor, 07 s.d. 10 Oktober 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi tim hukum 10 (sepuluh) partai politik nasional dan 2 (dua) partai politik lokal Aceh yang masing-masing terdiri dari 15 orang partai politik nasional & 5 orang untuk partai politik lokal Aceh.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Oktober 2024

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mundiri



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	9
II PANDUAN KEGIATAN.....	10
1. Latar Belakang	10
2. Tujuan Kegiatan	11
3. Nama Kegiatan	11
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	11
5. Peserta Kegiatan	13
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	13
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	15
8. Akomodasi	15
9. Konsumsi	15
10. Pembiayaan	15
11. Lain-lain	16
12. Kontak	16
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	17
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	27
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	29
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	35

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



Jabatan	: Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Sleman, 15 November 1959
Pendidikan	: S1 – Universitas Islam Indonesia S2 – Universitas Tarumanegara S3 – Universitas Jayabaya
Karir	: • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi • Ketua Pengadilan Negeri Pontianak • Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



Jabatan	: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Paninggahan, 20 Agustus 1968
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research Universitas Malaya, Malaysia S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Karir	: • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas • Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas • Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada

Karir : • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
• Kepala Biro Kepegawaian MA
• Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

d. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Karir : • Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
• Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro
• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro

e. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

f. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan :
 - S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
 - S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
 - S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir :
 - Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
 - Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

g. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

h. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Lahat, 11 November 1959
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Sriwijaya
S3 – Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
- Karir : • Panitera Mahkamah Agung RI
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang

i. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pekalongan, 8 Januari 1964
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Indonesia
S2 – Ilmu Komunikasi The London School of
Public Relations
S3 - Collegium Humanum Warsaw Management
University
- Karir :
 - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI
 - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Dr. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
 Kelahiran : 9 Juni 1969
 Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
 Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
 Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
 Universitas Jakarta
 S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
 Bisnis
 S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas
 Padjadjaran
 Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan secara serentak di 545 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dimaksud.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait tim hukum partai politik dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 07 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
Senin, 07 Oktober 2024	10.00 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Simultan dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: - Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya - Pembacaan Naskah Pancasila - Hymne Mahkamah Konstitusi - Laporan Sekretaris Jenderal - Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi - Mars Mahkamah Konstitusi - Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024
	21.00 WIB	Istirahat
Selasa, 08 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
	15.00 – 17.30 WIB	ISHOMA
	17.30 – 19.00 WIB	Makan Malam
Rabu, 09 Oktober 2024	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan
	21.00 WIB	Istirahat
Kamis, 10 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Plt Kapusdik 3. Pembacaan Doa
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 160 (seratus enam puluh) orang meliputi 10 partai politik nasional (masing-masing 15 orang) dan 2 partai politik lokal Aceh (masing-masing 5 orang).

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024	a. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan Pemohon f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Mahkamah Konstitusi	a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024	a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan	120 menit
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (Website, <i>Click MK</i> , Media Sosial, dll)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024; c. Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait; g. Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.	240 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (Simultan).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.

- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Peserta tidak mendapatkan uang saku selama pelaksanaan kegiatan.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

12. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapian seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggandaan kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. *Login* menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.

Profil Peserta	
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum Bagi PA GMNI	
Nama Lengkap	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	Bogor / 2013-02-26
Usia	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	S3
Asal Instansi	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	085157929660
E mail	pusdik@mkri.id

4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				6
Nilai Post Test				0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

8. Mengisi evaluasi kegiatan

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Beranda](#) [Materi](#) [Absensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Kuesioner Evaluasi Kegiatan

Test Bimtek Hukum Acara Pilkada tahun 2020

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	☐	☐	☐	☐
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	☐	☐	☐	☐
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Beranda](#) [Materi](#) [Absensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

[SURAT POST TEST](#)

[EVALUASI KEGIATAN](#)

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Beranda](#) [Materi](#) [Absensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- **Media Offline:**
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- **Media Online (*pusdik.mkri.id*)**
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1

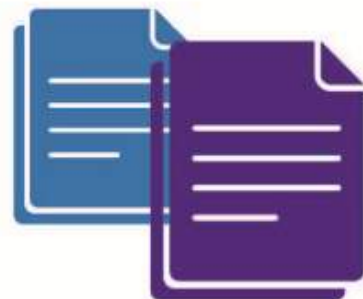
Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3

Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4

Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5

Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Mundiri, S.E., M.A.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Mastiur Afrilidiany Pasaribu, S.I.P., M.Si.

Kepala Bagian Umum



Santi Widiastuti, A.Md

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Hadian Taofik Rachman, S.Sos., M.A.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan



Medi Kurniadi, S.Kom.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi,

ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2



Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3



Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **Pusdik_MK**, *password*: **pusdikmkri9**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **GK3_PUSDIKLAT**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi
Partai Politik Angkatan III

Senin, 7 Oktober 2024





SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 19690809 199303 1001
Digital Signature
mk841709954240413112703



MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



PAKTA INTEGRITAS

-  **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**
 - ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
 - ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
-  **Peserta:**
 - ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
 - ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi.
 - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
-  **Narasumber:**
 - ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
 - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

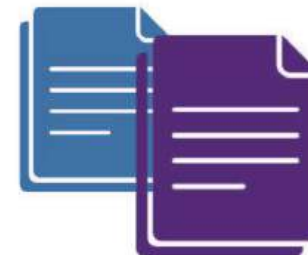
1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner* (AC) dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, LCD);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

11



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran

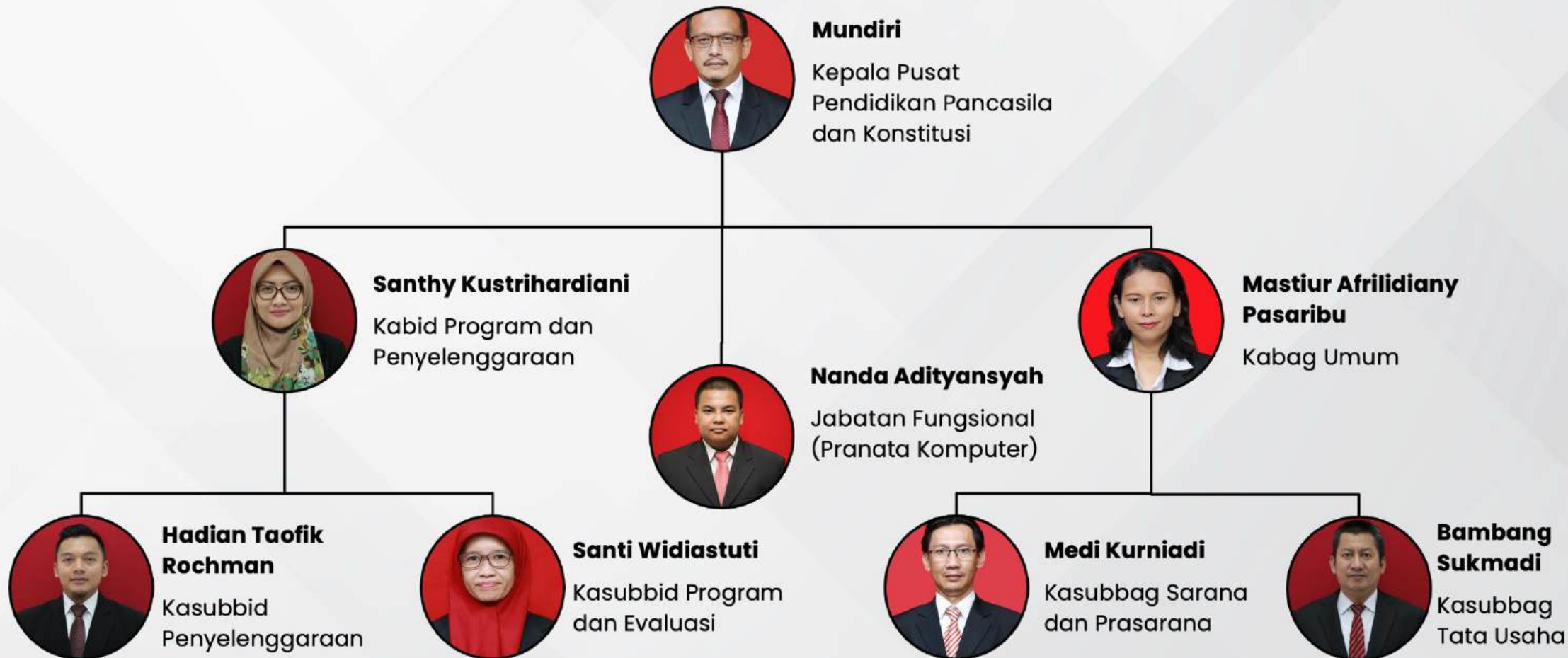


Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



TIM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



TIM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



Chafid Sugianto



Edwin Aditya Irawan



Angga Putri Gardina



Muhlis Nova



Suhardi



Andy Fahri



Yahya Amarullah Taufik



Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN BAGI PARTAI POLITIK III

Hukum Acara
Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala
Daerah

Dinamika Penanganan
Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Mekanisme, Tahapan
dan Jadwal
Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala
Daerah

Pemanfaatan
Teknologi dan
Informasi dalam
Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala
Daerah

Teknik Penyusunan
Permohonan Pemohon
dan Keterangan Pihak
Terkait dalam
Penanganan PHP
Kepala Daerah

Praktik Penyusunan
Permohonan Pemohon
dan Keterangan
PihakTerkait dalam
Penanganan Perkara
PHP Kepala Daerah

Evaluasi Hasil
Penyusunan
Permohonan
Pemohon dan
Keterangan Pihak
Terkait dalam
Penanganan Perkara
PHP Kepala Daerah

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu :** Senin s.d. Kamis
07 s.d. 10 Oktober 2024
- **Tempat :**
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat



JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 7 Oktober 2024	09.30 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta dan Check In
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Simultan dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh YM Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 Narasumber: YM Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. & YM Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic P Foekh, S.H., M.H.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 8 Oktober 2024	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 Narasumber: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol – Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Narasumber: Panitera Muda III – Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik di MK Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	15.30 – 17.30 WIB	ISHOMA
	17.30 – 19.00 WIB	Makan Malam

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 9 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait dlm Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, & Wali Kota Tahun 2024 Narasumber: Panitera Konstitusi Ahli Madya
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait dlm Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, & Wali Kota Tahun 2024 Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutn Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait dlm Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, & Wali Kota Tahun 2024 Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	Istirahat
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan / Pentas Seni

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 10 Oktober 2024	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait dlm Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, & Wali Kota 2024 Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 160 orang meliputi peserta 10 partai politik nasional (15 orang) dan 2 partai lokal Aceh (5 orang)
- ✓ Membawa Surat Tugas untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.
- ✓ Peserta **wajib membawa laptop** untuk keperluan kegiatan pembelajaran selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan *Pre-Test* dan *Post-Test* secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia



AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.



PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- ❖ Peserta tidak mendapatkan uang saku selama kegiatan.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- ❖ Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

❖ **Boarding pass**

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

❖ **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *markup*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang lebih dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

❖ Transportasi Darat/Laut

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

❖ Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *PreTest* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdik_MK*
Password : *pusdikmkri9*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*
Password : *pusdikmkri*





FASILITAS DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik





Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 160 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7



Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2





T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : ***Pusdik_MK***

Password : ***pusdikmk9***

Nama Wi-Fi : ***GK3_PUSDIKLAT***

Password : ***pusdikmkri***



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara online dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara online



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/ presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



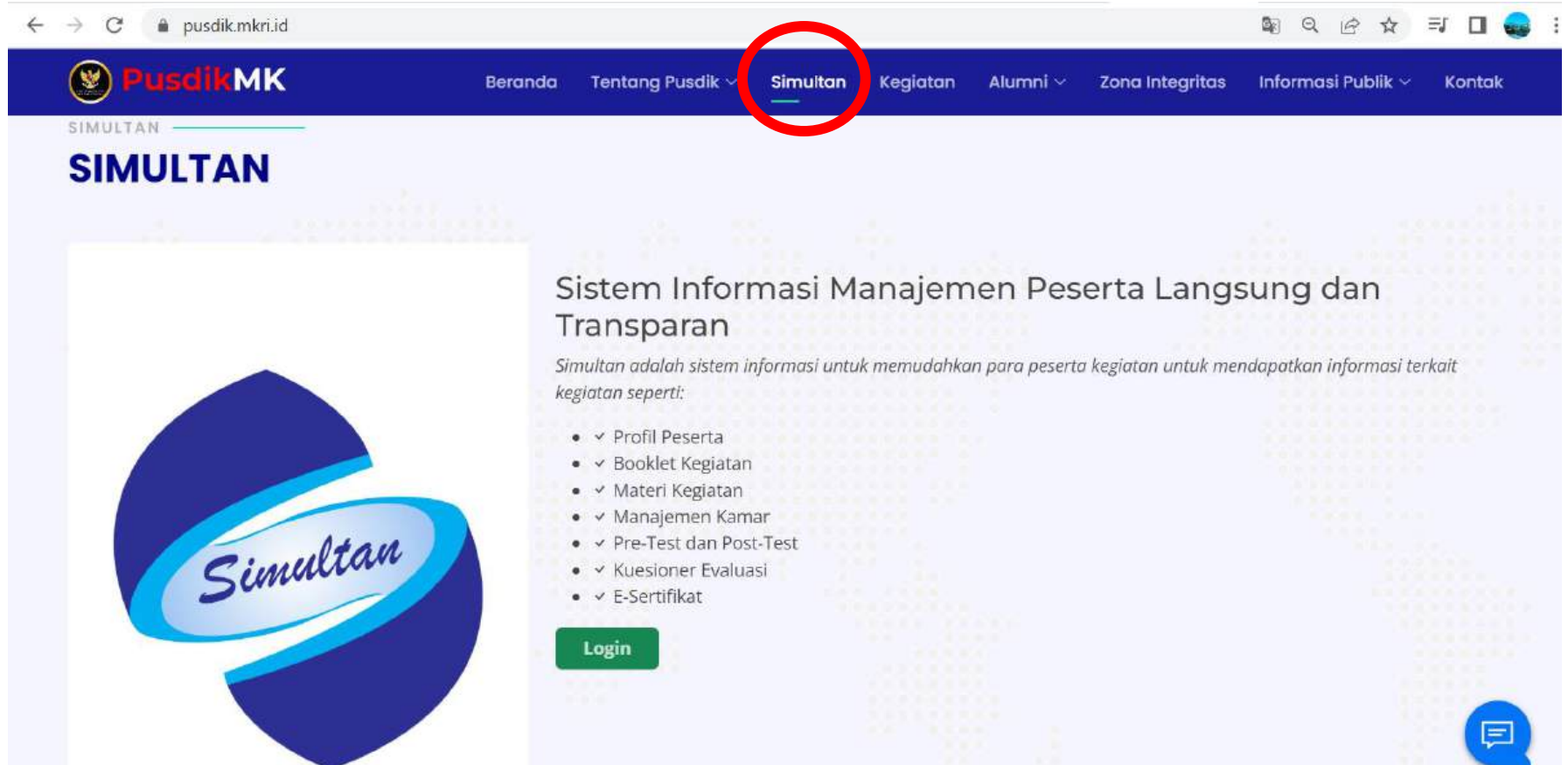
**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**



Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN

Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password

← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 🖨 👤 ⋮



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta



Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

ProfilBarcodeMateriPresensiKuesionerE-SertifikatLogout



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

***Nama Lengkap dan Gelar
yg tercantum pada Profil
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN) yg
akan Dicetak pada e-
Sertifikat***

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK *

:

Gelar Depan

:

Nama Lengkap *

:

Safira Putri Purnama

Usulkan Perbaikan Nama :

Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang

:

S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir *

:

Jakarta

1985-09-26

Jenis Kelamin *

:

Perempuan

Pendidikan *

:

S2

Instansi *

:

Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan *

:

Programmer Utama

Alamat *

:

Desa/Kelurahan *

:

Desa Satriamekar

Provinsi *

:

D.I.K.JAKARTA

Kabupaten/Kota *

:

KOTA JAKARTA TIMUR

HP *

:

Email *

:

Update Data

Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.



Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom (Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Barcode Materi Presensi **Kuesioner** Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber





Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	☐	☐	☒	☐
2.	Sistematika Penyajian Materi	☐	☐	☐	☐
3.	Interaksi Dengan Peserta	☐	☐	☐	☐
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	☐	☐	☐	☐

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

***Seluruh penilaian wajib diisi, kecuali kolom saran dan perbaikan**



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Klik pada tulisan
“SOAL PRE TEST”



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



**Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan
Arsitek Indonesia**

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri	
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia		





SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- ☐ Badan Pengawas Pemilu
- ☐ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- ☐ Komisi Pemilihan Umum
- ☐ Mahkamah Konstitusi
- ☐ Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**





- ☐ Putusan
- ☐ Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- ☐ Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- ☐ Pengajuan permohonan secara daring (online)
- ☐ Persidangan jarak jauh (video conference)
- ☐ Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- ☒ Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja ***Pre Test*** dan ***Post Test*** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner

Mengisi Evaluasi kegiatan





Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	☐	☐	☐	☐
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	☐	☐	☐	☐
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	☐	☐	☐	☐
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	☐	☐	☐	☐
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	☐	☐	☐	☐
Materi yang paling menarik		Pilih Materi ▼			



Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



TERIMA KASIH



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/Greetings

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui akun SIMULTAN peserta, mengisi kuesioner, dan mengunduh materi

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematerinya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait pada Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan template penyusunan Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke microsite, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai template dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait sesuai template, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-highlight dari template.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi *form* evaluasi dan *form* penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat e-mail pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk memaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (slide show).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan *form* penilaian dan *form* evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan

III

Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024

YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. & YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	35	3.18	Cukup jelas...dan tegas
4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32	2.91	
5	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3.82	
6	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	40	3.64	pemberian materi waktunya jangan malam krn peserta kurang konsentrasi
7	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	41	3.73	Sangat baik dalam penyampaian materi, konsumsi juga baik fasilitas baik
8	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	38	3.45	
9	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	40	3.64	
10	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	42	3.82	
11	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	37	3.36	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Kalo bisa pas sesi malam hari ada Coffee break
13	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	40	3.64	menarik, agar diperbanyak dasar hukum pada saat penjelasan
14	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3.82	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Mantap Jaga dan tingkatkan
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Materi yg di berikan jgn terlalu lama (Singkat, Padat) dan tanya jawab yg di perpanjang waktu nya
17	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3.82	
18	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	37	3.36	mungkin durasi pemberian materi di perpanjang karna menambah wawasan keilmuan tentang konstitusi mungkin kegiatan seperti ini harus dilakukan setiap tahun, tidak harus menunggu pada waktu 5 thn sekali pada hajatan baik pileg, pilres maupun pilkada.. demikian
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Mohon untuk volume suara diperbesar
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	dipertahankan yang sudah ada dan terus ditingkatkan
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Tolong Dipertahankan prestasi yang sangat baik ini dan makin ditingkatkan
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
25	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	40	3.64	selalu di pertahankan yang sudah baik ini di pertahankan
26	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	40	3.64	Secara over all sudah sangat baik agar dapat dipertahankan
27	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	36	3.27	pertahankan apa yang sudah bagus, dan selalu melakukan inovasi
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
30	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	36	3.27	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	sudah sangat bagus tidak ada
32	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	39	3.55	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	sudah baik

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
36	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	Harus Selalu Diadakan setiap tahun agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan kader partai politik dalam menghadapi pemilu untuk memperbaiki kualitas politik di Indonesia
37	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	39	3.55	kurangnya waktutanya jawab
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Materinya yang disampaikan sangat baik dan penyampaian yang lugas
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
40	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3.09	PAS DAN LAYAK WAKTU SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MATERI
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	sudah cukup baik sudah cukup baik
44	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	35	3.18	interaktif dengan peserta dan lucu akan tetapi tidak fokus di materi/substansi kesemoatan bertanya diperbanyak lagi
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
48	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	42	3.82	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	cukup baik
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1.00	Semakin Baik Selalu...
51	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	38	3.45	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	Durasi diskusi agar diberikan waktu lebih banyak
54	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3.82	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
56	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	37	3.36	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
58	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	42	3.82	Pemateri harus lebih fokus menjawab, menjelaskan dan memberikan solusi terhadap pertanyaan dan pengalaman yang telah terjadi
59	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	38	3.45	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
61	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3.82	
62	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	37	3.36	
63	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	40	3.64	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
65	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	34	3.09	
66	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	37	3.36	MANTAP
67	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	37	3.36	MANTAP
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Sangat bagus dengan acara ini menambah pengetahuan
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Sangat bagus dengan acara ini menambah pengetahuan
71	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	35	3.18	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sangat Baik
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
74	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	36	3.27	
75	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	42	3.82	Keren, namun ke depan dibuat dalam bentuk interaktif dengan peserta sehingga suasana pembelajaran menjadi hidup dan mudah diingat
76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1.00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
78	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	37	3.36	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
80	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	40	3.64	Mantap mantap
81	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	36	3.27	Sesi tanya jawab perlu diberikan waktu yang banyak Sesi tanya jawab perlu diberikan waktu yang banyak
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	bravo MKRI
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Pengajian kurang simple dan kurang humoris
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	34	3.09	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
90	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	3.73	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	bagus dan berkualitas
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Bermanfaat Menambah wawasan
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Sangat Memuaskan
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
99	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	35	3.18	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	saran perlu adanya praktek persidangan atau persidangan semu, perlu adanya kunjungan ke kantor Mahkamah Konstitusi, terima kasih sudah dibekali ilmu kepentingan peradilan
102	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	35	3.18	Untuk materi yang diberikan sangat membantu untuk berpraktek di persidangan
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
105	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	41	3.73	
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
107	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
109	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
110	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
116	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
	3.59	3.55	3.59	3.58	3.60	3.58	3.64	3.62	3.51	3.60	3.66			3.59	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan
III
Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024

Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	38	3.45	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	sudah baik
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	sudah cukup baik sudah cukup baik
8	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	38	3.45	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Terima kasih MK sesi ini bagus banget
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	SATU KATA BAIK
12	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	42	3.82	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Mantap
14	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	36	3.27	
15	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	41	3.73	
16	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	42	3.82	Baik untuk pemateri serta bahan materi nya
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
18	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	41	3.73	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	sudah sangat baik mohon agar dapat dipertahankan, bravo MKRI !!!
20	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	36	3.27	sesi tanya di perbanyak sudah bagus pemaparan, contoh kasus lbh diperbanyak
21	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	39	3.55	selalu di pertahankan dalam penyampaikan materinya di pertahankan
22	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	34	3.09	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Kegiatan Bimtek Seperti Ini Harus Selalu Dilakukan Oleh MK untuk Terus Menambah Wawasan dan Pengetahuan Para Peserta dan Anggota Partai Politik Agar Selalu Siap Dalam Menghadapi Pemilu
24	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	42	3.82	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Memberikan contoh perkara dalam format video di materi khususnya tentang sistem noken
28	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	41	3.73	Pendalaman case dalam penjelasan contoh kasus bisa lebih diperdalam lagi dlm penyampaianya , agar peserta lebih memahami materi
29	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	41	3.73	Terimakasih atas materi yang disampaikan Terimakasih atas materi yang disampaikan
30	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	39	3.55	
31	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	38	3.45	
32	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	36	3.27	
33	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	39	3.55	Waktu diskusi kurang banyak
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Utk pertanyaan hendak nya masing masing partai
35	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	41	3.73	selalu tetap mempertahankan yang sudah baik, serta selalu mengembangkan dan inovasi.
36	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	38	3.45	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
38	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
39	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	35	3.18	

[illegible]

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Di perbanyak kegiatan Seperti ini di Walayah Papua Raya
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
92	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	37	3.36	
93	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	37	3.36	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
96	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	40	3.64	
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
102	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
104	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
106	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
	3.60	3.57	3.65	3.57	3.65	3.59	3.64	3.65	3.50	3.62	3.62			3.61	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan
III
Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024

Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	36	3.27	Pemateri yg mumpuni dan pintar berwawasan luas....semoga bermanfaat
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Mantap
5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	Baik Baik
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
9	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	38	3.45	
10	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	39	3.55	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Terima kasih MK sangat membantu
12	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	41	3.73	
13	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	36	3.27	Kegiatan Seperti Ini Harus Sering Dilakukan Dan Berkelanjutan Agar Menambah Wawasan dan Pengetahuan Peserta
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
16	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
18	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	37	3.36	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	cukup baik, mohon dipertahankan
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	TETAP SEMANGAT YA BU IDA
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
23	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	36	3.27	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	- -
26	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	35	3.18	
27	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	34	3.09	Agar lebih di tingkatkan dalam penyampain materinya lebih interaktif dalam penyampaianya
28	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	41	3.73	Baik materi dan penyampaian baik
29	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	36	3.27	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	sudah baik
31	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
33	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	34	3.09	MANTAP
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
37	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	36	3.27	pertahankan hal-hal yang sudah baik, serta tetap melakukan inovasi.
38	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3.82	
39	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3.82	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Agar tidak terlalu sering menyebutkan bapak ibu.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	lbh banyak contoh kasus kedepan mungkin tambah durasi waktu materi
47	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	40	3.64	BAIK LEBIH MENINGKATKAN LAGI DALAM PENYAMPAIAN MATERI
48	3	3	3	2	3	2	3	4	3	4	4	3	34	3.09	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Materi agar tidak berbentuk teks agar lebih menarik.
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Alangkah baiknya bila dalam penyampaian materi interaksi dgn audiens lebih interaktif lagi
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
54	3	2	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	31	2.82	interaksi dengan peserta kurang banyak bahasa yang diulang-ulang
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
56	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	36	3.27	Sesi tanya jawab perlu ditambah Perlu tambahan variasi teknis penyampaian
57	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	31	2.82	perlu ditingkatkan ketepatan waktu kehadiran perlu ditingkatkan ketepatan waktu kehadiran
58	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	37	3.36	Terimakasih sudah berkenan memberikan materi Terimakasih sudah berkenan memberikan materi
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
66	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	30	2.73	Kurang humoris
67	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	35	3.18	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
70	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
72	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	30	2.73	Kurang semangat dan datar-datar saja
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Bermanfaat Menambah wawasan
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
76	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	43	3.91	Sangat menjadi tambahann Tambah relasi dan ilmu
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Sangat Baik
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	43	3.91	
81	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3.91	Saran terkait mengenai sesi diskusi agar di evaluasi durasi waktunya lebih banyak
82	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	37	3.36	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
87	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	41	3.73	
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	makanan mungkin bs diperbaiki
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
95	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	40	3.64	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
	3.46	3.43	3.42	3.42	3.53	3.46	3.52	3.56	3.46	3.54	3.53			3.48	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan
III
Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024

Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. & Rudi Kurniawan

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	39	3.55	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Baik Sekali
5	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	34	3.09	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	sangat di sayangkan, pada saat seseorang materi IT. server lagi bermasalah atau mengalami gangguan sehingga tidak bisa secara maksimal mengupas materi yang dibutuhkan penunjukan secara online. semoga dalam praktik selanjutnya server tidak mengalami problem.
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	42	3.82	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
12	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	41	3.73	Baik
13	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	39	3.55	
14	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	36	3.27	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Akan lebih baik bila penyampaian materi disertai dengan praktik langsung.
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	banyak contoh kasus perbanyak hasil tinjauan perkara
19	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	40	3.64	BAIK
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sangat baik
21	3	3	4	4	3	2	3	4	3	3	4	3	36	3.27	
22	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	35	3.18	TOP
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Kegiatan Seperti Ini Harus Sering Diadakan dan Berkelanjutan Karena Sangat Bermanfaat Untuk Para Peserta
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	server down
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
34	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	40	3.64	

[illegible]

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	bagus dan berkualitas
69	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	32	2.91	Agak ironi, bicara IT pas juga kena imbas masalah IT
70	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	41	3.73	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Bermanfaat Menambah wawasan
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	BAIK BAIK
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	Tambah sesi Pelayanan transportasi dari pusdik ke kota kurang maksimal
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Kegiatannya di perbanyak
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Terima kasih MK
82	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	42	3.82	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
88	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	41	3.73	
89	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
94	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3.82	
95	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	29	2.64	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
	3.56	3.59	3.59	3.58	3.60	3.54	3.57	3.58	3.47	3.58	3.59			3.57	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan
III
Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024

Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	40	3.64	Baik
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Akan lebih baik bila penyampaian materi disertai dengan praktik langsung.
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Kegiatan Sangat Berguna Dan Bermanfaat BAgi PAra Peserta sehingga saya harapkan kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
15	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	39	3.55	
16	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3.09	Baik Baik
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	perlu ditambah coffee break perlu coffe break
18	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	38	3.45	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	over all sangat baik pertahankan, bravo MKRI !!!
20	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3.82	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Gangguan Server, jaringan putus 08/10/24 Jam 13.00 sampai sesi selesai, pada saat Narasumber Nanda Adityansyah & Rudi Kurniawan. sesi IV materi sistem informasi penanganan perkara elektronik.
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sangat Baik
25	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3.82	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
27	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	39	3.55	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
29	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3.82	Terimakasih sudah memberikan materi Terimakasih sudah memberikan materi
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
31	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	38	3.45	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Sudah baik
38	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3.82	Berikan waktu untuk diskusi/tanya-jawab.
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
40	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	35	3.18	LANJUTKAN

[illegible]

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
	3.62	3.50	3.60	3.54	3.64	3.62	3.62	3.63	3.54	3.64	3.64			3.60	

III
Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
10	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3.09	Baik Baik
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
14	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	41	3.73	waktu untuk menjelaskan terkait masing-masing pihak pemohon dan yang lainnya kita tidak dapat secara keseluruhan Baik
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	35	3.18	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	44	4.00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	44	4.00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
24	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	37	3.36	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Baik
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Kegiatan Seperti ini harus di lakukan secara berkelanjutan karena sangat bermanfaat bagi peserta dan partai politik karena dapat meningkatkan pengetahuan para peserta
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	pertahankan yang sudah bagus, dan tetap selalu melakukan inovasi
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	34	3.09	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	bagus dan berkualitas
39	3	3													

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Bermanfaat Menambah wawasan
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3.91	BAIK, Saya salah alamat email pengumpulan tugas SURAT PEMOHON, BIMTEK KELAS 2, dan sudah saya RESEND hari ini, Atas nama FAIZZAN ARDHI MUTAQOBB, PARTAI UMMAT
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	BRAVO MKRI pertahankan
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
54	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	36	3.27	LANJUT
55	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	39	3.55	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	pemaparan ok, tinggal praktek kedepannya tentu akan lebih baik lg
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Sangat jelas penyampaiannya, terima kasih MK
59	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	41	3.73	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Perlu ditingkatkan kedepan untuk lebih baik dan peserta diharapkan bisa diupayakan uang saku
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Baik
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
66	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	36	3.27	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
71	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	34	3.09	Saran untuk menu makananya tolong lebih diperhatikan
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
	3.66	3.61	3.62	3.63	3.64	3.62	3.66	3.67	3.59	3.67	3.68			3.64	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan
III
Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024

Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	41	3.73	
2	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	38	3.45	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	Segera di perbanyak kegiatan dan materi-materi, agar kami lebih memahami tahapan-tahapan dengan baik
5	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	36	3.27	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
	3.57	3.71	3.57	3.43	3.71	3.71	3.71	3.57	3.43	3.86	3.71			3.64	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan
III
Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024

Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Tolong dipertahankan yang sudah bagus
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
5	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	42	3.82	
6	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	37	3.36	
7	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	35	3.18	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3.00	
	3.67	3.56	3.56	3.44	3.44	3.44	3.44	3.44	3.33	3.56	3.44			3.48	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan
III
Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024

Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3.09	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	sudah baik
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	42	3.82	Terimakasih sudah mengisi materi Terimakasih sudah mengisi materi
6	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3.91	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	Bagus klo semua peserta bisa dikireksi bersama dalam forum Tambah waktu sesi praktek langsung
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.00	
10	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	41	3.73	
	4.00	3.90	3.90	3.80	3.70	3.70	3.90	3.90	3.80	3.90	3.90			3.85	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR	
1	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Hatika Al Shafa	4	3	7	4	4	4	12	2	3	5	2	3	5	4	4	8	4	4	8	3	3	6	75	3.57	terkait kebersihan kamar, sebaiknya ada penggantian sarung bantal dan spre minimal 2 hari sekali untuk pengondisian makanan dan kebersihan, serta ketersediaan alat makan di ruangan makan	
2	3	3	3	9	3	3	3	9	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Hatika Al Shafa	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	6	62	2.95	Variasi menu makan yang perlu ditambah Tidak ada narasumber expert dari luar MK RI sebagai variasi sudut pandang yang dinamis Secara keseluruhan sudah cukup sangat baik pelaksanaan diklat Pilkada MK RI
3	3	4	3	10	3	3	3	9	Syukri Asy'ari, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	4	10	2	3	5	2	3	5	3	2	5	4	3	7	4	2	6	63	3.00	-Jaringan internet sempat mati di satu sesi sangat di sayangkan pembelajaran jadi kurang fokus -Untuk Kamar Mandi diberikan pengharum ruangan/kamper -Air keluarnya tidak stabil, kadang kecil banget keluar airnya dan kadang deras banget keluar airnya	
4	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00		
5	3	3	3	9	4	4	3	11	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	3	3	3	9	3	3	6	1	3	4	3	3	6	3	0	3	3	3	6	61	2.90		
6	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	3	4	11	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	80	3.81	pertahankan apa yang sudah baik, dan selalu melakukan inovasi dan menambah permainan atau game yang dapat melibatkan seluruh peserta. mudah mudahan kedepan selain rambase juga di anggarkan untuk uang saku peserta. dalam sesi kesenian baiknya waktunya lebih lama dan biduanya lebih dari 1 orang.	
7	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00		
8	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	1	1	2	59	2.81		
9	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Hatika Al Shafa	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00		
10	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3.95		
11	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00		
12	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Ganggas Wibisono	4	4	8	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	77	3.67		
13	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Hadian Taofik Rochman	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3.14	S	
14	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3.86		
15	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3.86		
16	4	4	4	12	4																															

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
30	4	4	4	12	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Baik
31	3	4	4	11	3	3	3	9	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	4	7	4	4	8	4	3	7	68	3.24	
32	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
33	3	3	3	9	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	74	3.52	
34	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
35	3	4	3	10	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3.81	sukses dan lebih ditingkatkan lagi
36	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
37	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3.95	Tambah waktu Tambah waktu
38	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3.90	Kegiatan ditambah kunjungan ke kantor Mahkamah Konstitusi di Jakarta
39	4	4	4	12	3	3	3	9	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	2	2	4	2	3	5	4	4	8	4	4	8	3	3	6	67	3.19	
40	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Waktu diskusinya agar banyak lagi
41	4	3	4	11	4	4	4	12	YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Edwin Rivano	4	3	7	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3.76	
42	3	3	3	9	3	3	3	9	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	2	2	4	2	3	5	2	2	4	3	3	6	3	3	6	58	2.76	
43	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	1. Biduan/Penyanyi kedepan makin keren 2. Ada Game 3. Waktu Tugas agak diperpanjang 4. Pemateri ada Quis sebelum dimulai memateri.
44	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Hadian Taofik Rochman	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	1	1	2	3	2	5	3	3	6	3	2	5	57	2.71	
45	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	1. Biduan/Penyanyi kedepan makin keren 2. Ada Game 3. Waktu Tugas agak diperpanjang 4. Pemateri ada Quis sebelum dimulai memateri.
46	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	1. Biduan/Penyanyi kedepan makin keren 2. Ada Game 3. Waktu Tugas agak diperpanjang 4. Pemateri ada Quis sebelum dimulai memateri.
47	4	4	4	12	3	3	4	10	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	3	4	4	11	4	3	7	3	3	6	4	3	7	4	4	8	3	3	6	75	3.57	
48	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	79	3.76	Waktu diskusinya agar lebih banyak. Lagi
49	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	3	3	10	4	4	8	3	4	7	4	3	7	4	4	8	3	3	6	77	3.67	Pada prinsipnya semua sangat berjalan dengan baik
50	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	83	3.95	Semoga kedepannya semakin sukses Semoga ilmu yang kami dapatkan bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan Teelimakasih untuk semua.. InsyaAllah kalau ada waktu kita berjumpa kembali..
51	3	4	3	10	3	4	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	3	7	4	4	8	3	4	7	76	3.62	Dalam kamar tersedia fasilitas TV Saat mengakses pusdik.mkri.id dan memberikan jawaban untuk pretest atau posttest diperpanjang waktu login-nya Diberikan apresiasi kepada peserta paling disiplin dan inspiratif menurut penilaian penyelenggara. Terima kasih
52	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
53	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3.95	
54	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
55	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
56	3	4	4	11	3	3	3	9	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	67	3.19	Pintu kaca kamar mandi pada kamar 232 gedung graha 4, engsel pintunya mohon diperbaiki. terima kasih
57	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	Hrs ditingkatkan lg biar untuk kedepan lebih baik lagi dari yg sekarang
58	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	3	6	4	4	8	68	3.24	Ice break saat acara kurang Makanan ada alat.. perlu lebih hygiene
59	4	4	4	12	3	3	3	9	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	2	2	4	4	4	8	4	4	8	4	4	8	75	3.57	
60	3	3	3	9	4	3	3	10	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	66	3.14	Untuk keperluan kamar perlu ada tv karena tidak semua peserta pelatihan suka dengan live musik, jalan-jalan atau juga nongkrong di caffe setelah acara pelatihan selesai d malam hari Untuk makan pagi tolong disediakan pilihan nasi, ada nasi putih atau nasi kuning
61	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3.95	Utk buah nya di lengkapi, makanan sarapan kurang enak
62	3	3	3	9	3	3	3	9	Syukri Asy'ari, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	
63	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
64	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Hatika Al Shafa	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
65	4	4	4	12	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
66	3	4	4	11	3	2	3	8	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Bambang Sukmadi	2	3	5	3	3	4	10	4	2	6	1	3	4	3	2	5	3	3	6	4	3	7	62	2.95	lebih selektif memilih catering makanan karena beberapa makanan tidak ada rasa, dan kumag bersih (ayam dimasak masih ada bulunya dll)
67	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	82	3.90	
68	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
69	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Edwin Rivano	4	3	7	4	3	4	11	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3.67	
70	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Ganggas Wibisono	3	2	5	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2.95	Perhatikan waktu agar tidak ngaret
71	4	4	4	12	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
72	3	4	3	10	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	3	4	11	3	3	6	3	4	7	3	3	6	4	4	8	4	3	7	74	3.52	
73	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
74	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3.90	Makanannya kalo bisa di pack biar tidak ada rebutan.
75	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	
76	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	79	3.76	sudah bagus secara keseluruhan, agar dapat dipertahankan. BRAVO MKRI !!!
77	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	sudah mantap mungkin sedikit perluasan didalam kamar tidurnya, dan air panas di kamar mandinya perlu sedikit diperbaiki....
78	4	4	4	12	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	80	3.81	Menu makan jagan yang aneh aneh
79	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Hatika Al Shafa	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
80	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	4	4	8	3	0	3	3	3	6	61	2.90	
81	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
82	4	4	4	12	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Sangat Baik
83	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3.95	Menu makanan perlu lebih variatif
84	3	3	3	9	3	3	3	9	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2.95	Untuk lauk sarapan agar lebih variatif, karena makannya selalu ayam terus. Terimakasih
85	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	semuanya sudah baik mungkin perlu sedikit ada perbaikan & peningkatan spt sarana yg ada di kamar & rehab sedikit areal bagian luar gedung
86	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3.95	
87	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Hatika Al Shafa	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	1	2	3	3	3	6	3	3	6	4	3	7	63	3.00	Lebih ke konsumsinya yang kurang enak dan menarik
88	2	3	3	8	3	3	3	9	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	4	4	11	4	3	7	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	2	6	69	3.29	Variasi makanan berpengaruh pada rasa yang kurang konsisten Internet lambat
89	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Sangat Baik
90	3	3	3	9	3	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3.71	
91	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
92	3	3	3	9	3	4	3	10	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	3	3	4	10	4	4	8	3	3	6	3	4	7	3	4	7	3	0	3	68	3.24	Good Good Good
93	3	3	3	9	4	3	3	10	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	66	3.14	Untuk keperluan kamar perlu ada tv karena tidak semua peserta pelatihan suka dengan live musik, jalan-jalan atau juga nongkrong di caffe setelah acara pelatihan selesai d malam hari Untuk makan pagi tolong disediakan pilihan nasi, ada nasi putih atau nasi kuning
94	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	77	3.67	
95	3	4	4	11	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Hatika Al Shafa	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3.76	Fasilitas untuk makan tersedia dengan baik, namun menu makanan tidak bervariasi karena hampir setiap hari makan dengan ayam dan sayur sayuran hijau yang sangat sedikit. Yang paling minus, pada hari kedua makan pagi, makanan tidak bersih anta (beras berkulit) masih ada. Sayur2 sangat kurang sementara kebutuhan dalam tubuh manusia bukan hanya soal daging tetapi juga sayur sayuran dan buah buahan
96	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Hatika Al Shafa	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	1	1	2	3	3	6	3	3	6	3	3	6	59	2.81	Konsumsi kurang menarik dan hari pertama nasinya gosong rasanya

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
97	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	3	3	10	3	3	6	1	3	4	4	3	7	3	3	6	3	3	6	69	3.29	Rasa hidangan makanan kurang memiliki rasa, dan untuk mengurangi kejenuhan makan agar lebih bisa variasi menu
98	3	3	3	9	3	3	4	10	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3.71	
99	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Sangat Baik
100	3	4	3	10	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	3	6	68	3.24	Menu sarapan paginya Haris ada opsi lain selain nasi uduk Ruangan kamar harus di lengkapi dgn tv nya Kamarnya disiapkan operator telpon untuk ke sentral pelayanannya
101	3	3	3	9	3	4	4	11	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.		4	4	8	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	74	3.52	Diusahakan selama mengikuti bimtek jangan sampai ada gangguan internet, izin seperti kejadian hari ketiga. Konsumsi diperbanyak rebus-rebusan Prinsipnya bimtek angkatan 3 baik dan penuh dg dinamika diskusi, waktunya ditambah dikt lagi Pak. Bu.
102	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Sangat Baik
103	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	83	3.95	Menurut sy tidak ada u perbaikan sudah sangat memuaskan d pusdiklat BIMTEK MK 7 oct 2024 Saran TV u di kamar harus ada Untuk akomodasi bukan hanya tiket saja harusnya akomodasi d perjalanan harusnya d ganti
104	3	4	3	10	4	2	3	9	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3.62	1. minus uang saku 2. kualitas bahan hoody kurang memuaskan
105	4	4	4	12	4	3	3	10	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	79	3.76	
106	4	4	4	12	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Edwin Rivano	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Sangat Baik
107	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	4	7	80	3.81	makanan rasanya kurang berasa bumbu dan agak hambar
108	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Ganggas Wibisono	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Sangat Baik
109	2	3	2	7	3	3	3	9	Rudi Kurniawan	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2.90	
110	4	4	3	11	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	3	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	4	4	8	76	3.62	peserta dari partai 15 orang terlalu sedikit, di upayakan peserta dari masing2 partai 50 orang
111	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Sangat Baik
112	4	4	4	12	4	4	4	12	Rudi Kurniawan	Hatika Al Shafa	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Sangat Baik
113	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3.00	Ada tidak konsisten jadwal
114	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
115	4	4	4	12	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3.86	
116	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Sangat Baik
117	4	4	4	12	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Hatika Al Shafa	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3.95	
118	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Daniel Yumic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Sangat Baik
119	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	Sangat Baik
120	3	4	3	10	4	4	4	12	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.		4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	78	3.71	Jaya selalu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jaya selalu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jaya selalu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
121	4	4	4	12	4	4	3	11	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	82	3.90	
122	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
123	3	4	3	10	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	78	3.71	PUSDIK MK TOP MARKOTOP
124	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Hatika Al Shafa	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	83	3.95	Saya Harapkan Kegiatan seperti dapat dilakukan secara berkelanjutan dan di perbanyak lagi jumlah penyelenggaraannya karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para peserta dan juga bagi partai politik dengan segala materi dan narasumber yang berkualitas

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
125	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Hadian Taofik Rochman	3	4	7	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3.14	Lebih meningkatkan pelayanan yang sudah baik Kebersihanlebih ditingkatkan lagi Ruang kamar ada tv, di kasih uang saku untuk peserta dan uang transfortasi di tambah
126	3	4	3	10	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	77	3.67	BAIK BAIK BAIK
127	3	3	3	9	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	0	4	74	3.52	fasilitas yang diapkan akan ditinkatkan untuk masa-masa yang akan datang
128	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	82	3.90	
129	3	4	3	10	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	77	3.67	BAIK BAIK BAIK
130	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
131	4	4	4	12	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
132	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
133	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Edwin Rivano	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
134	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4.00	
135	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Edwin Rivano	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3.90	
136	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	4	4	11	4	3	7	2	4	6	4	4	8	4	4	8	3	1	4	68	3.24	Mohon menjadi pertimbangan yang sangat dalam pelatihan ini haruslah ada peradilan semu / simulasi dalam mengajukan permohonan dan persidangan di mahkamah konstitusi Internet menjadi permasalahan utama , lambat dan susah sinyal Konsistensi rasa makanan mohon di pertimbangkan kembali
	3.55	3.71	3.60	3.62	3.71	3.65	3.65	3.67			3.67	3.65	3.66	3.68	3.67	3.74	3.69	3.65	3.55	3.60	3.33	3.59	3.46	3.73	3.66	3.69	3.74	3.75	3.74	3.71	3.53	3.62	76.51	3.64	

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

**Oleh:
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM “BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA”
TAHUN 2024**

PERSYARATAN FORMIL “AMBANG BATAS” PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158)

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$



- **Pasal 158** akan diberlakukan setelah persidangan pemeriksaan atau dipertimbangkan setelah persidangan pemeriksaan lanjutan bersama-sama dengan pokok permohonan.
- Permohonan **tetap menguraikan** Pasal 158 UU 10/2016 dengan menghubungkannya pada pokok-pokok permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan Pasal 158 dapat ditunda keberlakuannya sehingga harus dibuktikan dalam persidangan pemeriksaan (lanjutan).

BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Permohonan diajukan paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak **diumumkan penetapan** perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- **Kapan** waktu pengumuman penetapannya? Sebab, pada PHP Kepala Daerah Tahun 2020/2021 banyak terjadi perbedaan waktu antara Penetapan dan Pengumuman oleh Termohon.

Penjelasan:

- Dalam PHP Kepala Daerah 2024/2025, penetapan perolehan suara hasil pemilihan terhitung sejak **ditetapkan** oleh Termohon. Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon.
- Sementara itu, **hari kerja** dalam pengajuan permohonan diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Objek Permohonan dan Para Pihak



Objek permohonan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Jadi, bukan mengenai berita acara rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi.



Para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum atau didampingi oleh pendamping.



Dalam hal pemilihan diikuti satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon, seperti halnya pasangan calon yang masing-masing juga dapat menjadi Pemohon.



Pendaftaran dan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan disesuaikan dengan daerah pilihannya. Pemilihan Gubernur dari KPU Provinsi, sedangkan Pemilihan Bupati/Walikota dari KPU Kab/Kota.

Termohon dan Bawaslu

KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota, jadi bukan KPU karena keputusan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur ditetapkan oleh KPU Provinsi, sedangkan penetapan hasil Pemilihan Bupati/Walikota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota.

Termohon

Bawaslu

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota. Namun demikian dalam beracara maupun penyampaian Jawaban KPU Provinsi/KPU Kab/Kota atau Keterangan Bawaslu Provinsi/ KPU Kab/Kota harus dengan supervisi dan koordinasi KPU dan Bawaslu. Untuk itu, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan hari sidang juga ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu.

Dokumen Tertulis Para Pihak

1

Permohonan dan perbaikan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan/perbaikan permohonan. Dokumen perbaikan permohonan tidak dapat diserahkan secara parsial.

2

Jawaban Termohon hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

3

Surat Permohonan menjadi Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait masing-masing juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Keterangan Pihak Terkait yang diajukan bersama-sama dengan surat permohonan menjadi Pihak Terkait tidak dianggap sebagai Keterangan Pihak Terkait.

4

Keterangan Bawaslu juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

5

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan dan diserahkan pada jam kerja (08.00 – 16.00 WIB). Apabila melewati batas waktu maka penilaiannya diserahkan kepada Mahkamah.

Lanjutan

6

Nomor antrian pengajuan permohonan hanya berlaku untuk satu permohonan. Dalam hal telah mendapatkan nomor antrian, akan diproses sampai dengan diterbitkannya e-AP3.

7

Bea meterei dibubuhkan untuk setiap nomor alat bukti yang diajukan.

8

Hardcopy permohonan online tidak harus diserahkan, namun untuk alat bukti harus diserahkan secara langsung, dengan ketentuan untuk alat bukti berupa surat/tulisan yakni 1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar lainnya adalah penggandaannya. Sedangkan alat bukti selain surat/tulisan disimpan dalam USB yang dibubuhi meterei.

9

Ketentuan di atas juga berlaku untuk Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait/Bawaslu yang diajukan secara online.

10

Jika terdapat perbedaan permohonan/jawaban/keterangan dalam bentuk cetak dan digital maka yang digunakan dokumen cetak.

Lanjutan

11

Tenggang waktu perbaikan permohonan 3 hari kerja dimulai sejak **diterimanya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara offline atau sejak **dikirimkannya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara online.

12

Jika hardcopy permohonan online tidak diserahkan, termasuk tidak mengajukan perbaikannya, maka permohonan yang akan dicatat dalam BRPK adalah permohonan awal yang diajukan secara online.

13

Demikian juga apabila terdapat perbedaan antara permohonan online dengan permohonan hardcopy yang diserahkan tanpa ada perbaikan permohonan maka yang dicatat dalam BRPK adalah permohonan online.

14

Jika perbaikan permohonan melewati tenggang waktu, permohonan yang digunakan adalah permohonan awal.

15

Salinan permohonan disampaikan kepada Termohon dan Bawaslu Prov. atau Bawaslu Kab/Kota dan kepada KPU dan Bawaslu sebagai tembusan paling lama 2 hari kerja sejak e-BRPK.

Lanjutan

- 16 Penarikan permohonan yang dilakukan, baik sebelum maupun sesudah registrasi, akan dikonfirmasi dalam persidangan.
- 17 Karena sebagai pedoman, penyusunan permohonan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu dapat mengacu pada lampiran PMK.
- 18 Permohonan persidangan jarak jauh diajukan paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Pemberitahuan Sidang & Permohonan Pihak Terkait, dan Inzage

Pemberitahuan sidang pertama kepada Termohon dan Pemberi Keterangan paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diregistrasi, sedangkan kepada Pihak Terkait paling lama 2 hari kerja sebelum pemeriksaan pendahuluan.

Para pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mempelajari alat bukti (inzage) dengan menyebutkan alat bukti yang hendak dipelajari. Sehingga, inzage dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan ketua panel dan dilakukan pada jam layanan.

Permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.

Alat Bukti & Jam Layanan

Jam layanan pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB pada hari kerja, sedangkan untuk layanan selainya mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB pada hari kerja.

Pengajuan daftar saksi dan/atau ahli beserta keterangannya disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan (lanjutan) dengan agenda pembuktian. Demikian juga dengan penyampaian bukti tambahan para pihak paling lama 1 (satu) hari sebelum hari sidang untuk pengesahan alat bukti.



**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

“MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH”

Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI**

Materi Pemaparan

Pembentukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Korelasi Putusan PUU dan PHP

Dinamika dan Perkembangan Penanganan Perkara PHP

Jenis-Jenis Pelanggaran dalam PHP

Tindak Lanjut Putusan MK terkait PHP

Perkembangan Peradilan Konstitusi



**Mahkamah Agung
Amerika Serikat
Marbury v Madison
(1803)**

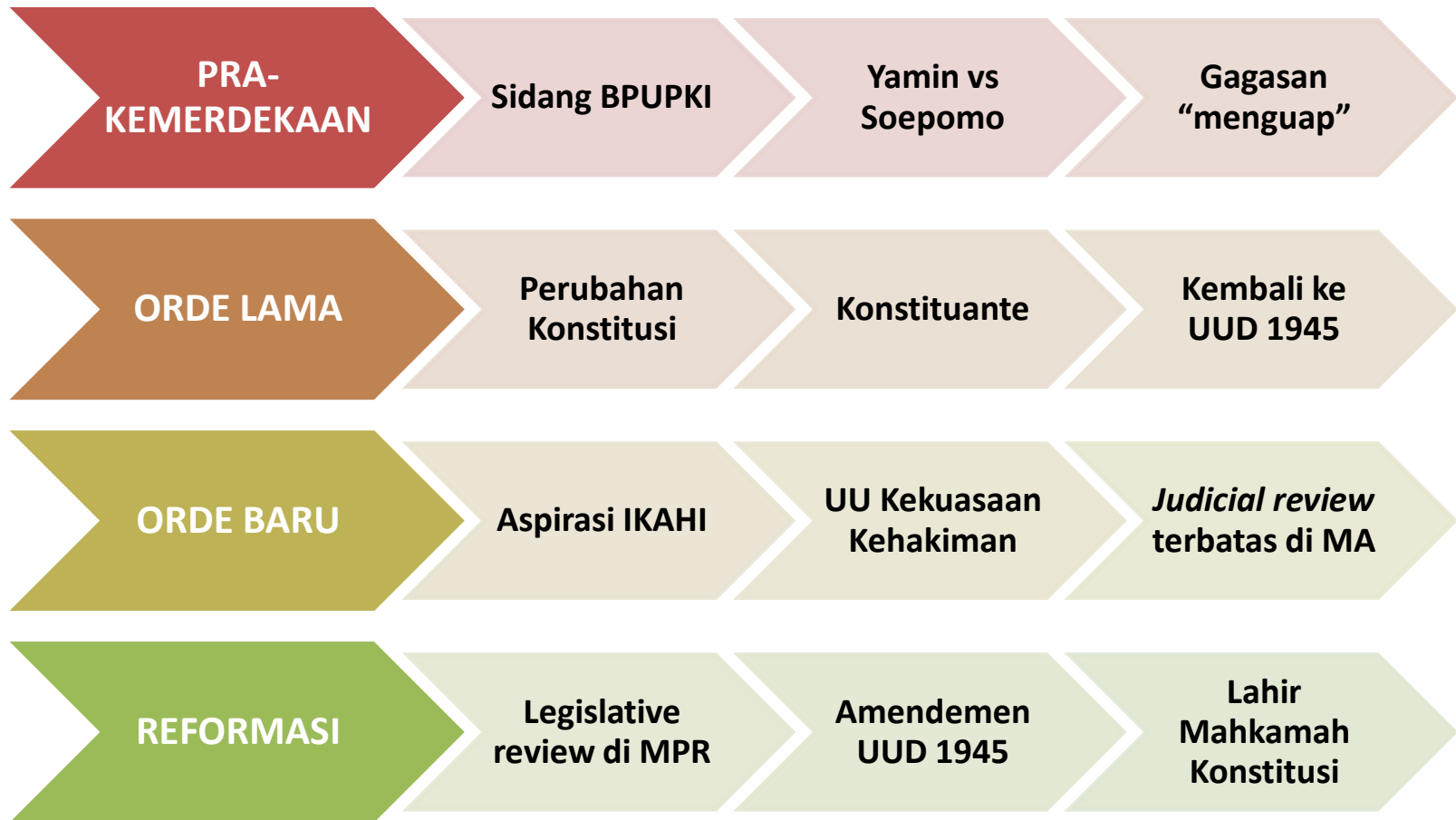


**Mahkamah
Konstitusi Austria
(1920)**

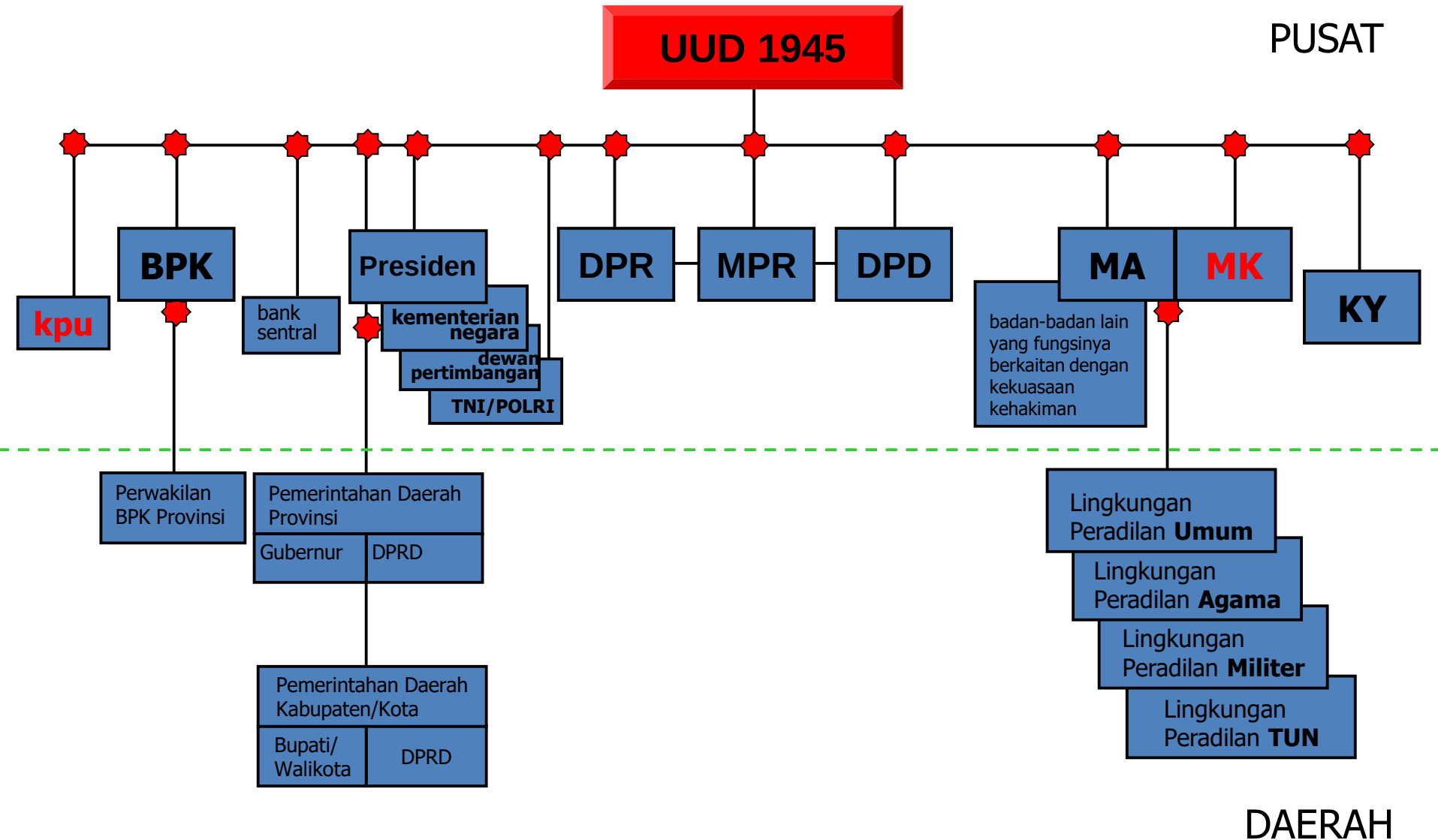


**Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia
(2003)**

Sejarah Pembentukan MK Indonesia



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- **Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945**

2

- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik

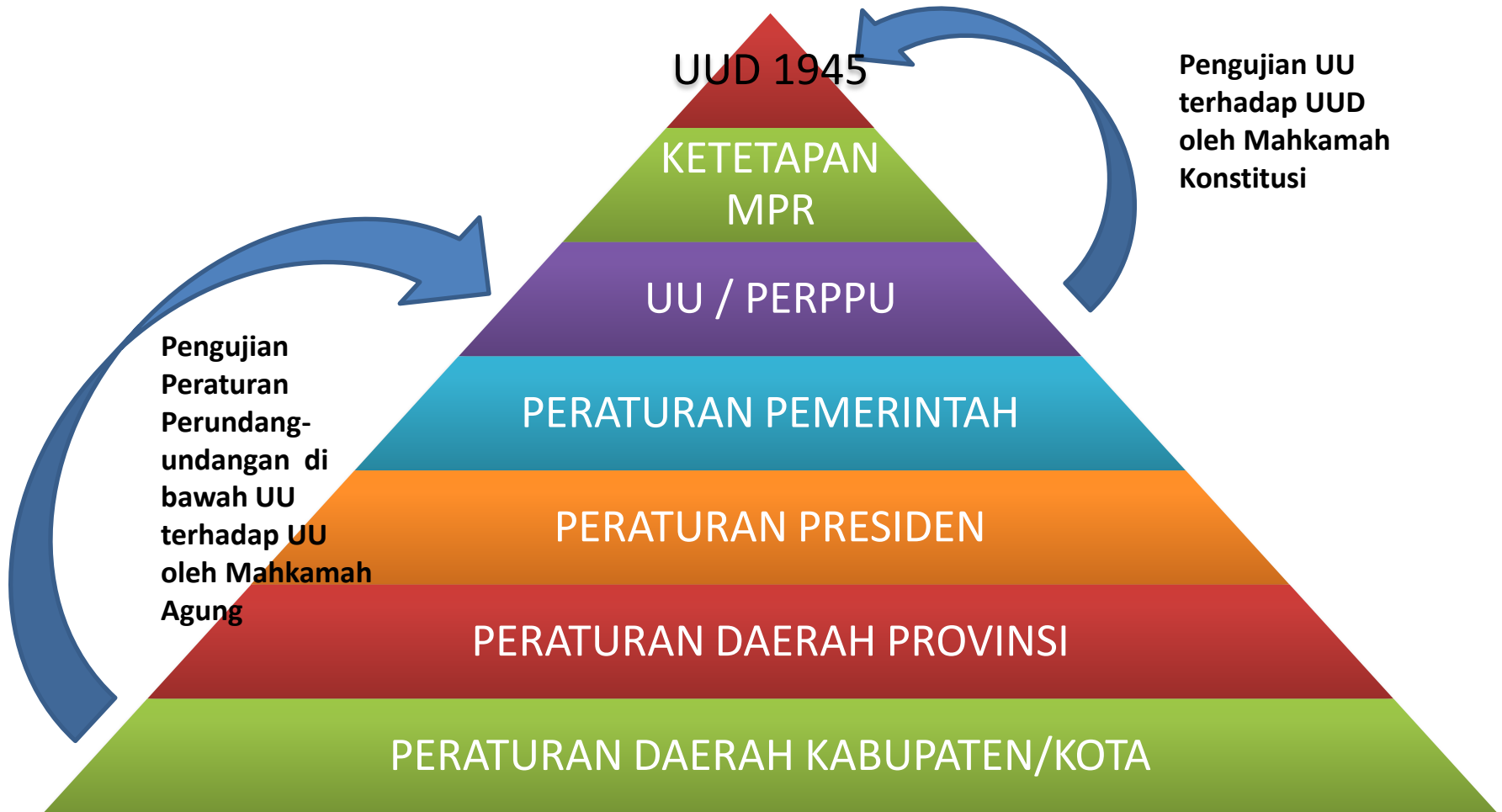
4

- **Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Hierarki Peraturan Perundang-undangan



Contoh Putusan PUU di MK

- Putusan-Putusan PUU terkait **PEMILU**:
 - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
 - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
 - Ambang Batas Parpol di Parlemen (*Electoral & Parliamentary Threshold*)
 - Pilpres dengan dua Pasangan Calon
 - Pelaksanaan Pemilu Serentak
 - Syarat Calon Anggota DPD



Contoh Putusan PUU di MK

■ Lanjutan:

- Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Kepala Daerah
- Calon Tunggal Kepala Daerah
- Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
- Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah
- Kampanye di Lembaga Pendidikan Kampus
- Persyaratan Partai Politik mengajukan Calon Kepala Daerah
- Persyaratan Usia Calon Kepala Daerah
- dsb.





Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

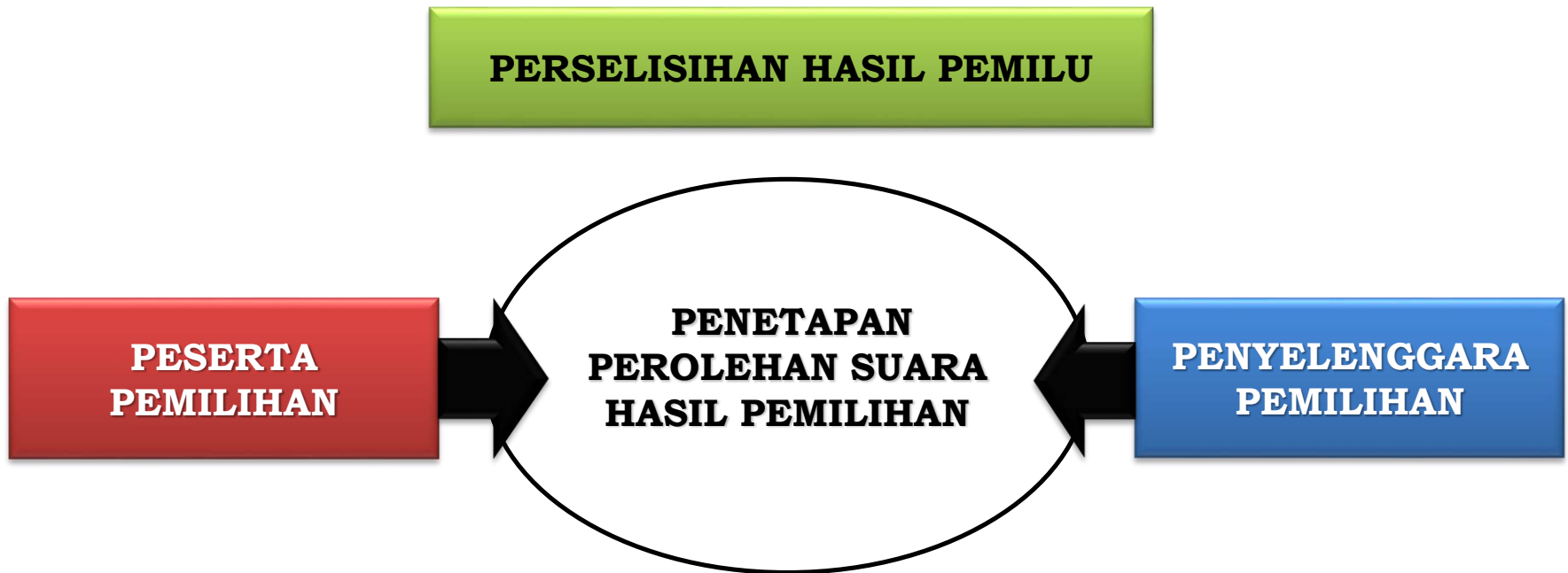


Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota: 45 hari



Tenggang Waktu mengajukan
Permohonan: 3 hari

OBJEK PERKARA PHP



Para Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilihan

☐ PEMOHON:

1. Pasangan Calon Gubernur, Bupati, Walikota
2. Pemantau Pemilihan yang telah Terakreditasi

☐ TERMOHON:

- KPU Provinsi
- KPU Kabupaten/Kota

☐ PIHAK TERKAIT

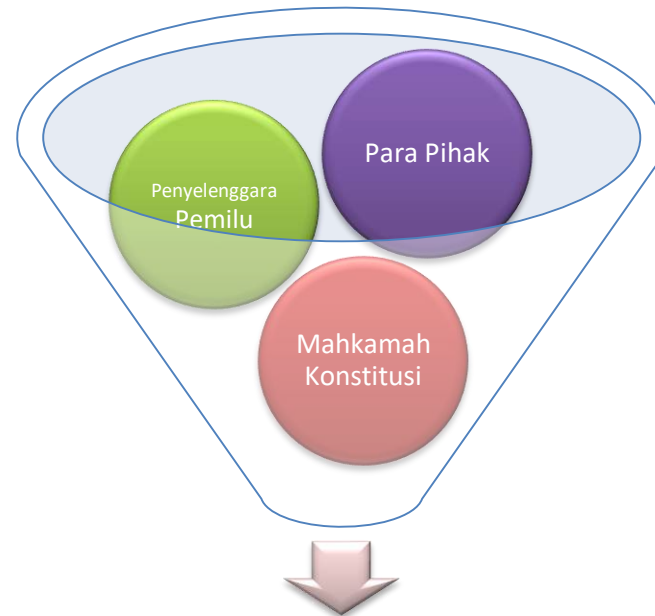
☐ PEMBERI KETERANGAN: BAWASLU



Dinamika dan Perkembangan Penanganan PHP



Adanya Perbedaan Perspektif



**Progresivitas Hukum Acara dan
Putusan MK**

Pergeseran Paradigma



Keadilan Prosedural

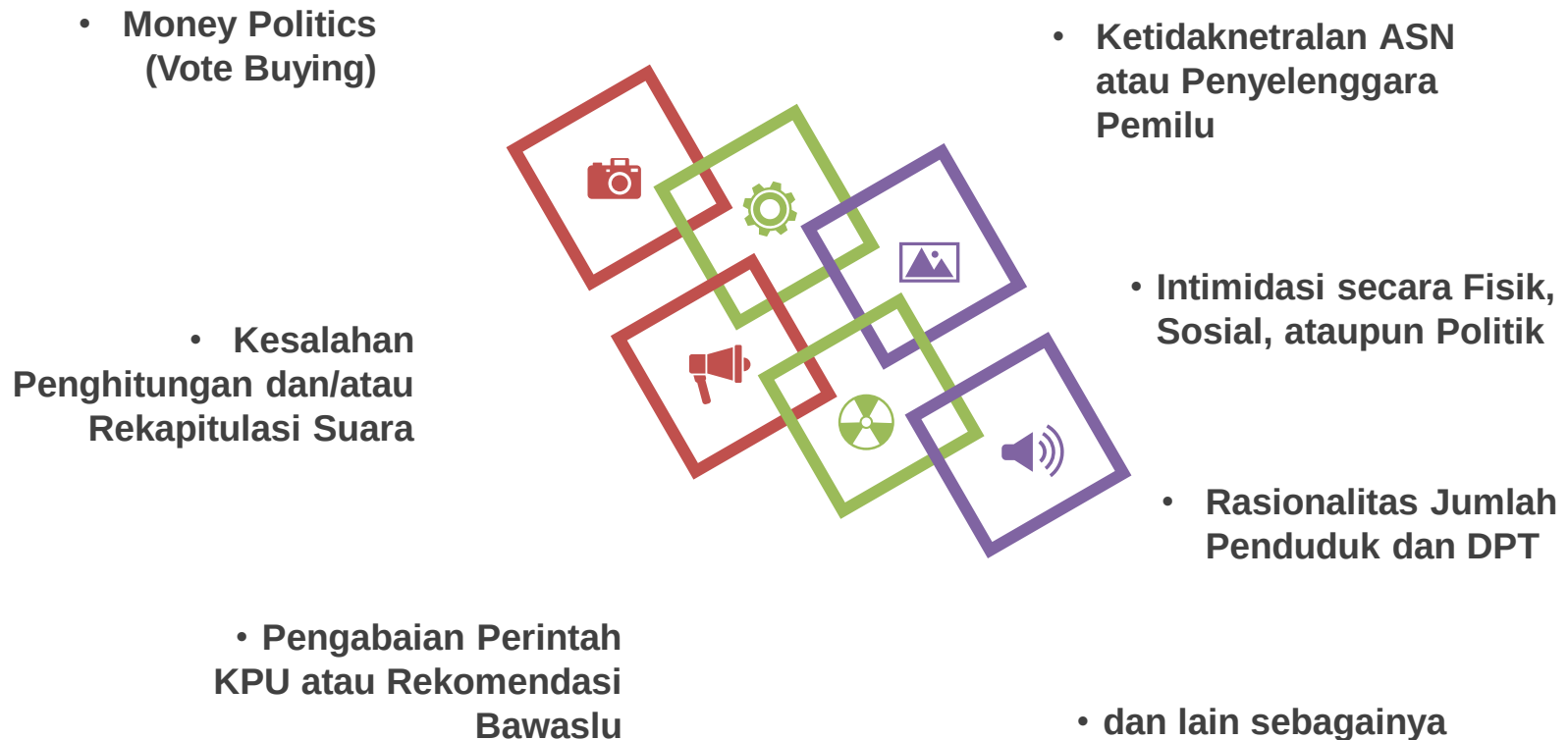
Sesuai dengan ketentuan UU dan terbatas pada hasil rekapitulasi penghitungan suara



Keadilan Substantif

Pendekatan progresif untuk mencapai keadilan substantif apabila terdapat kebuntuan atau ketiadaan hukum yang mengatur suatu persoalan

Contoh Jenis Pelanggaran Pemilu



Pelanggaran TSM dan Signifikan

Terstruktur

Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparaturnegara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenangan secara berjenjang

Sistematis

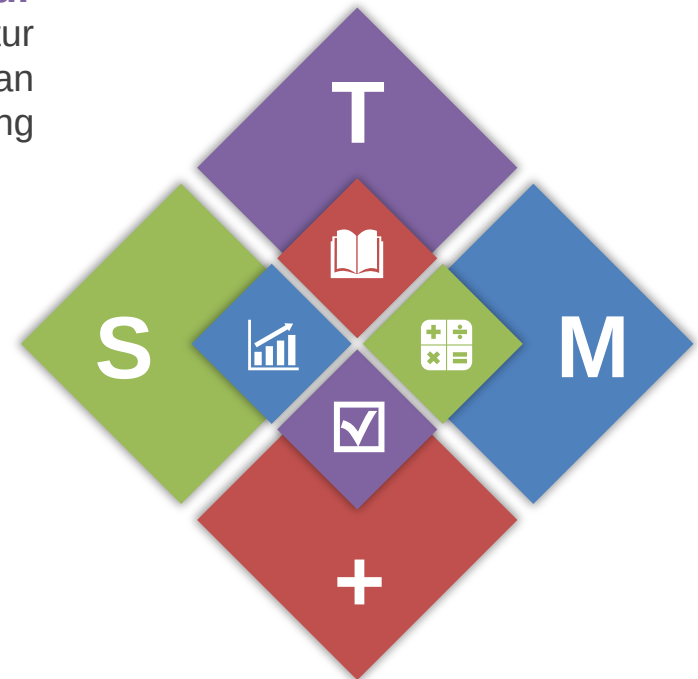
Pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya

Masif

Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal

Signifikan

Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan pasangan calon



Pergeseran Penerapan Ambang Batas Permohonan Sengketa Hasil Pilkada (Pasal 158 UU Pilkada)

Pilkada

2015/2016

2017-2018

2020/2021

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$

Persidangan
Pendahuluan



Persidangan
Pemeriksaan



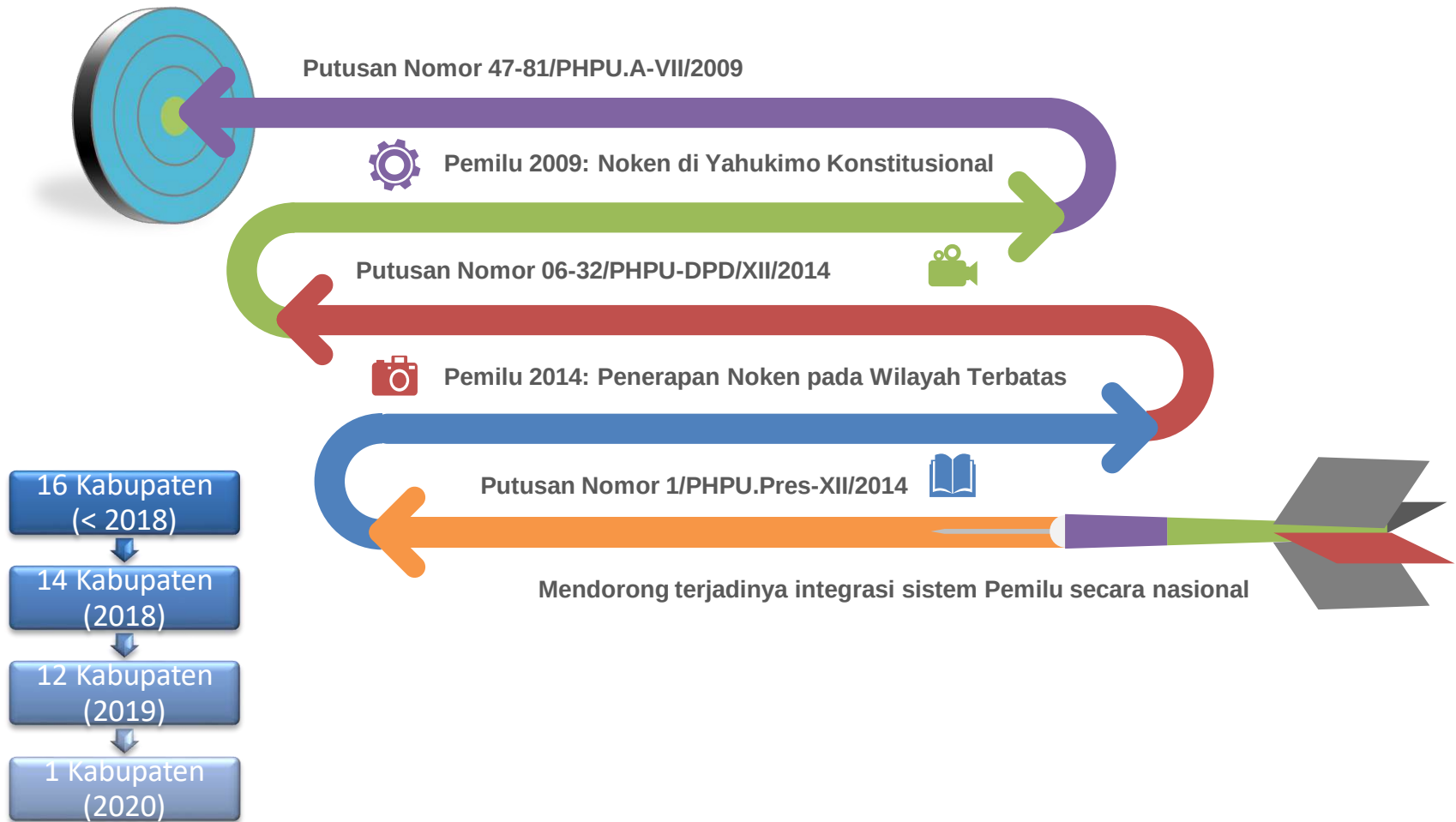
Persidangan
Pemeriksaan (Lanjutan)



Persidangan
Pembacaan Putusan

Setidaknya terdapat lima daerah yang disimpangi syarat ambang batas dalam PHP Tahun 2020/2021

Transformasi Sistem Noken



Tindak Lanjut Putusan

Umumnya: Tidak Diterima | Menolak | Mengabulkan

Penghitungan Suara Ulang



Apabila terjadi kesalahan penghitungan suara atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara ulang pada TPS atau wilayah tertentu

Pemungutan Suara Ulang



Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya hasil rekapitulasi yang ada maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang

Putusan Sela

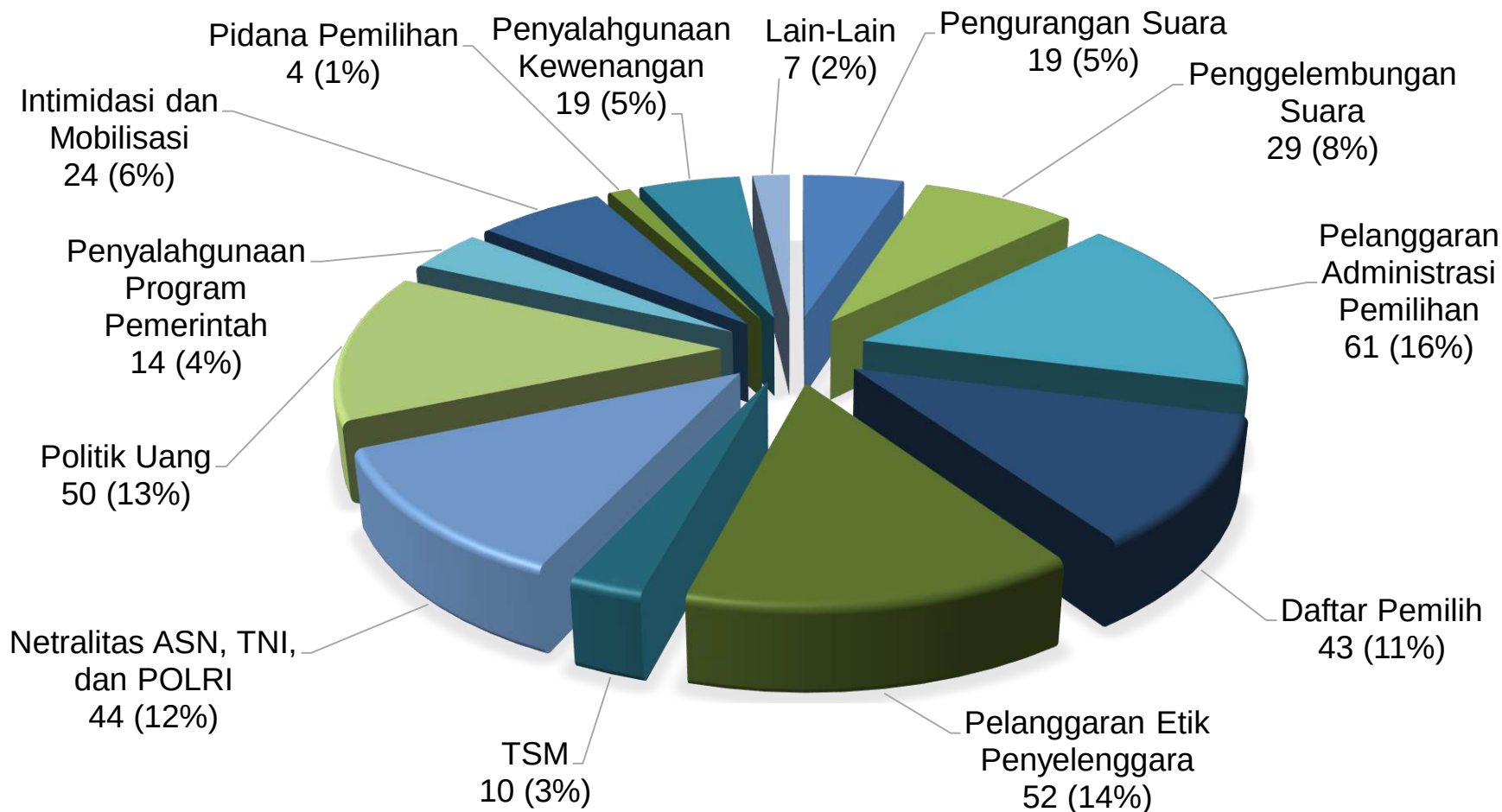


Putusan Akhir

Pasca PSU, terdapat daerah yang langsung mengusulkan pelantikan, bahkan sudah ada yang melantik Kepala Daerah tanpa menunggu PHP Pilkada Putaran ke-2. Seharusnya menunggu apakah ada yang mengajukan sengketa ke MK atau tidak

Catatan:
PSU ini juga berimplikasi pada Pengeluaran anggaran daerah

Dalil Permohonan dalam PHP 2020/2021



Statistik Perkara PHP di MK

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



Catatan: Dalam PHP Kepala Daerah 2020 tidak menggunakan pola PSU

Catatan untuk Pelaksanaan Pilkada 2024

Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Penyusunan DPT harus benar-benar dilakukan secara cermat dan logis

Sistem Noken

Konsistensi penerapan Keputusan KPU dalam hal penggunaan sistem noken di Papua

Pemenuhan Hak Memilih

Harus dipastikan tidak ada perusahaan atau pihak-pihak lain yang menghalangi penggunaan hak pilih warga negara, khususnya di masa pandemi

Menjaga Profesionalitas

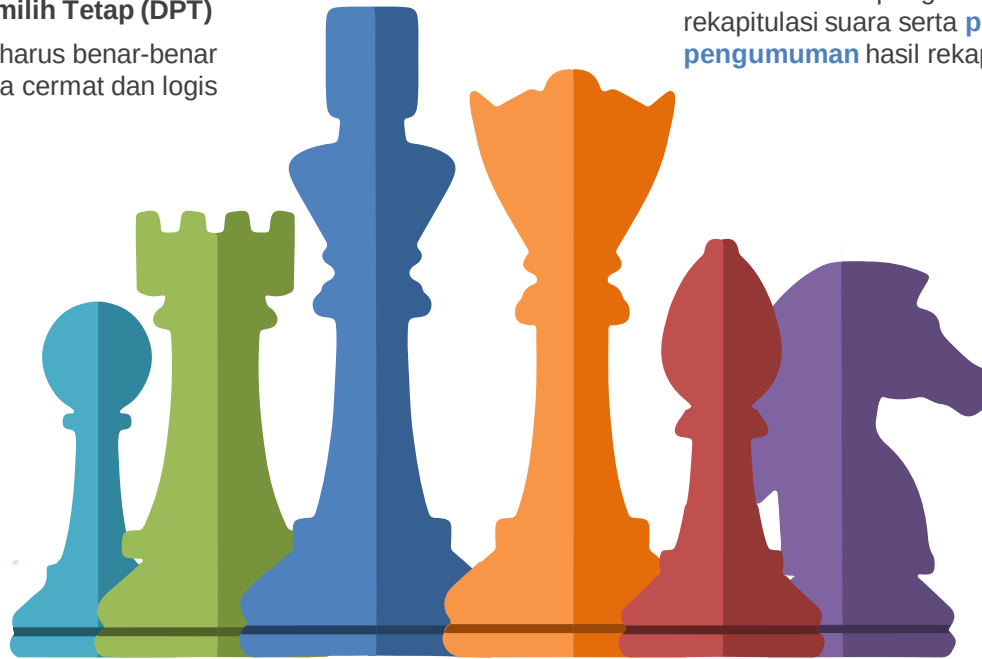
Penyelenggara Pemilu di setiap jenjang harus lebih profesional, khususnya pada saat melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara serta **penetapan dan pengumuman** hasil rekapitulasi

Perkuat Pengawasan

Optimalisasi pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran berupa mobilisasi, pencatatan daftar hadir, penggelembungan suara, penggunaan dan perusakan kertas suara, kotak suara tidak tersegel, dsb.

Verifikasi Syarat Pencalonan

Pemenuhan syarat pencalonan harus diteliti lebih baik lagi, antara lain, (1) persyaratan jeda waktu 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; dan (2) persyaratan kewarganegaraan Indonesia.





Diperlukan sinergitas dan profesionalitas dari seluruh penyelenggara pemilihan kepala daerah agar Pilkada serentak 2024 dapat terlaksana secara Jurdil dan Luber. Selain itu, seluruh sengketa selama proses Pemilu **sudah seharusnya diselesaikan dengan baik**, sehingga tidak berujung pada pengajuan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Dalam proses pemeriksaan sengketa hasil Pilkada, MK menggunakan paradigma **keadilan substantif** dengan tetap mempertimbangkan keadilan prosedural. Apabila diyakini telah terjadi kesalahan atau pelanggaran yang bersifat signifikan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, MK dapat membatalkan hasil penetapan perolehan suara dan memerintahkan dilakukannya **penghitungan** suara ulang, **pemungutan** suara ulang, atau bahkan **diskualifikasi** calon kepala daerah.



PENUTUP



Terima Kasih

faiz@mkri.id | www.panmohamadfaiz.com



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Judicial Training Program, the Hague University, Belanda



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com



@panmohamadfaiz

- **Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol**
- **Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi**
- **External Research Fellow di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia**
- **Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)**
- **Dosen Hukum Tata Negara di FH Universitas Brawijaya dan beberapa Universitas lainnya**
- **Pengajar Tetap “Hukum Acara MK” untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)**
- **Narasumber Bimtek “Hukum Acara MK” di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK**
- **Chief Editor dari Constitutional Review Journal (Scopus)**
- **Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI)**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MEKANISME, KEGIATAN, TAHAPAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024

OLEH:

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH
KONSTITUSI**

**Disampaikan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Tahun 2024**

DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

KEGIATAN DAN TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

- a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
- b. Pemenuhan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- d. Penerbitan e-HPKP3;
- e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
- f. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
- h. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait;
- i. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan;
- j. Pemeriksaan Pendahuluan;
- k. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- l. Pemeriksaan Persidangan;
- m. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase I);
- n. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
- o. Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
- p. Pemeriksaan Persidangan (pembuktian);
- q. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase II);
- r. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II); dan
- s. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II).

1. Pengajuan Permohonan Pemohon

- Permohonan dapat diajukan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*)
- Permohonan diajukan paling lama **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh KPU (Termohon)
- Permohonan baik secara luring atau secara daring hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan
- Permohonan diajukan sebanyak **4 (empat)** rangkap dan alat bukti **2 (dua)** rangkap
- Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul **08.00** WIB sampai dengan pukul **24.00** WIB pada hari kerja
- Jam layanan selain pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon, mulai pukul **08.00** WIB sampai dengan pukul **16.00** WIB pada hari kerja

Catatan:

Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024/2025, Penetapan perolehan suara hasil pemilihan terhitung sejak ditetapkan oleh Termohon. Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah Pengumuman Termohon.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan
27 Nov – 16 Des 2024

Penetapan: Rabu, 27 November 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu, 27 Nov 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Kamis, 28 Nov 2024
08.00-24.00 WIB**

**Jum'at, 29 Nov 2024
08.00- 24.00 WIB**

Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB

**Senin, 16 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08.00- 24.00 WIB**

**** Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah pengumuman Termohon**

PERSYARATAN FORMIL “AMBANG BATAS” PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158 UU 10/2016)

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$

- **Pasal 158 UU 10/2016** akan diberlakukan setelah pemeriksaan persidangan atau dipertimbangkan setelah pemeriksaan persidangan lanjutan bersama-sama dengan pokok permohonan
- Permohonan **tetap menguraikan Pasal 158 UU 10/2016** dengan menghubungkannya pada pokok permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan **Pasal 158 UU 10/2016** dapat ditunda keberlakuannya sehingga harus dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan (lanjutan)

PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan **2.000.000 (dua juta) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Contoh

Jumlah Penduduk:

Provinsi X berpenduduk **1.905.121** jiwa, sehingga masuk kategori **2%**.

Perolehan Suara:

PASLON	PEROLEHAN SUARA
Pasangan Calon (Paslon 1)	637.200 suara
Pasangan Calon (Paslon 2)	601.500 suara
Pasangan Calon (Paslon 3)	598.600 suara
Total suara sah	1.837.300 suara

Cara Penghitungan:

$2\% \times 1.837.300 = 36.746$ suara

- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2: $637.200 - 601.500 = 35.700$ suara
- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 3: $637.200 - 598.600 = 38.600$ suara

Kesimpulan:

- Paslon 2 memperoleh selisih suara dengan Paslon 1 sebesar **35.700** suara atau **kurang** dari **36.746** suara (**memenuhi syarat**)
- Paslon 3 memperoleh selisih suara dengan Paslon 1 sebesar **38.600** suara atau **lebih** dari **36.746** suara (**tidak memenuhi syarat**)

2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon

- Paling lama **3 (tiga)** hari kerja sejak diterimanya **e-AP3** oleh Pemohon atau kuasa hukum - **Offline**
- Paling lama **3 (tiga)** hari kerja sejak dikirimkannya **e-AP3** kepada Pemohon atau kuasa hukum - **Online**
- Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan **1 kali** selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon

4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon (e-HPKP3)

- Perbaikan dan Kelengkapan apabila melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, keterlambatan tercatat di **e-HPKP3**

5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK (registrasi)

- Dilaksanakan secara bertahap
- Penerbitan **e-ARPK**
- Penyampaian **e-ARPK** kepada Pemohon paling lama **2 (dua)** hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)

6. Penyampaian Salinan Permohonan

- Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
- Paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi) disertai dengan permintaan Jawaban kepada Termohon untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
- Tembusan disampaikan kepada **KPU RI** (sebagai koordinasi) dan **Bawaslu RI**
- Pemohon dapat mengajukan penarikan permohonan sebelum permohonan diputus oleh Mahkamah

7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait

- Paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam **e-BRPK**
- Permohonan sebagai Pihak Terkait hanya dapat diajukan **1 kali** dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait

8. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait

- Ketetapan menerima atau menolak permohonan sebagai Pihak Terkait
- Ketetapan sebagai Pihak Terkait disampaikan paling lama **2 (dua) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Ketetapan sebagai Pihak Terkait dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)

9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota)

- Sidang pertama (**Pemeriksaan Pendahuluan**) paling cepat **4 (empat) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)
- Penyampaian pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, dan Bawaslu paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)
- Penyampaian pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pihak Terkait paling lama **2 (dua) hari kerja** sebelum Hari Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Tembusan disampaikan kepada **KPU RI** dan **Bawaslu RI**

10. Pemeriksaan Pendahuluan

- Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- Memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon

11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota

- Jawaban Termohon disampaikan kepada Mahkamah paling lama **1 (satu) hari kerja** sebelum Sidang Pemeriksaan Persidangan
- Jawaban Termohon baik secara luring maupun secara daring diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan
- Jawaban Termohon sebanyak 4 (empat) rangkap, salah satunya asli ditandatangani Termohon atau Kuasa Hukum
- Termohon menyampaikan alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) dibubuhi meterai dan 1 (satu) penggandaan dari berkas asli

12. Pemeriksaan Persidangan

- Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu
- Memeriksa dan mengesahkan alat bukti para pihak

13. Rapat Permusyawaratan Hakim (Fase 1)

- Laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim
- Pembahasan perkara
- Pengambilan putusan
- Penyusunan putusan
- RPH sekurang-kurangnya ditangani oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi

14. Pengucapan Putusan/Ketetapan (Fase 1)

15. Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (Fase 1)

- Paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak pengucapan Putusan/Ketetapan
- Penyampaian kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

16. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (Pembuktian)

- Mendengar keterangan saksi/ahli
- Jumlah saksi/ahli ditentukan oleh Mahkamah
- Pengajuan daftar saksi dan/atau ahli beserta keterangan dan kelengkapannya paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum hari sidang pemeriksaan persidangan dengan acara pembuktian
- Sebelum memberikan keterangan, saksi/ahli diambil sumpah didampingi oleh petugas dan dipandu oleh Hakim Konstitusi
- Memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan sebelum hari sidang untuk pengesahan

17. Rapat Permusyawaratan Hakim (Fase 2)

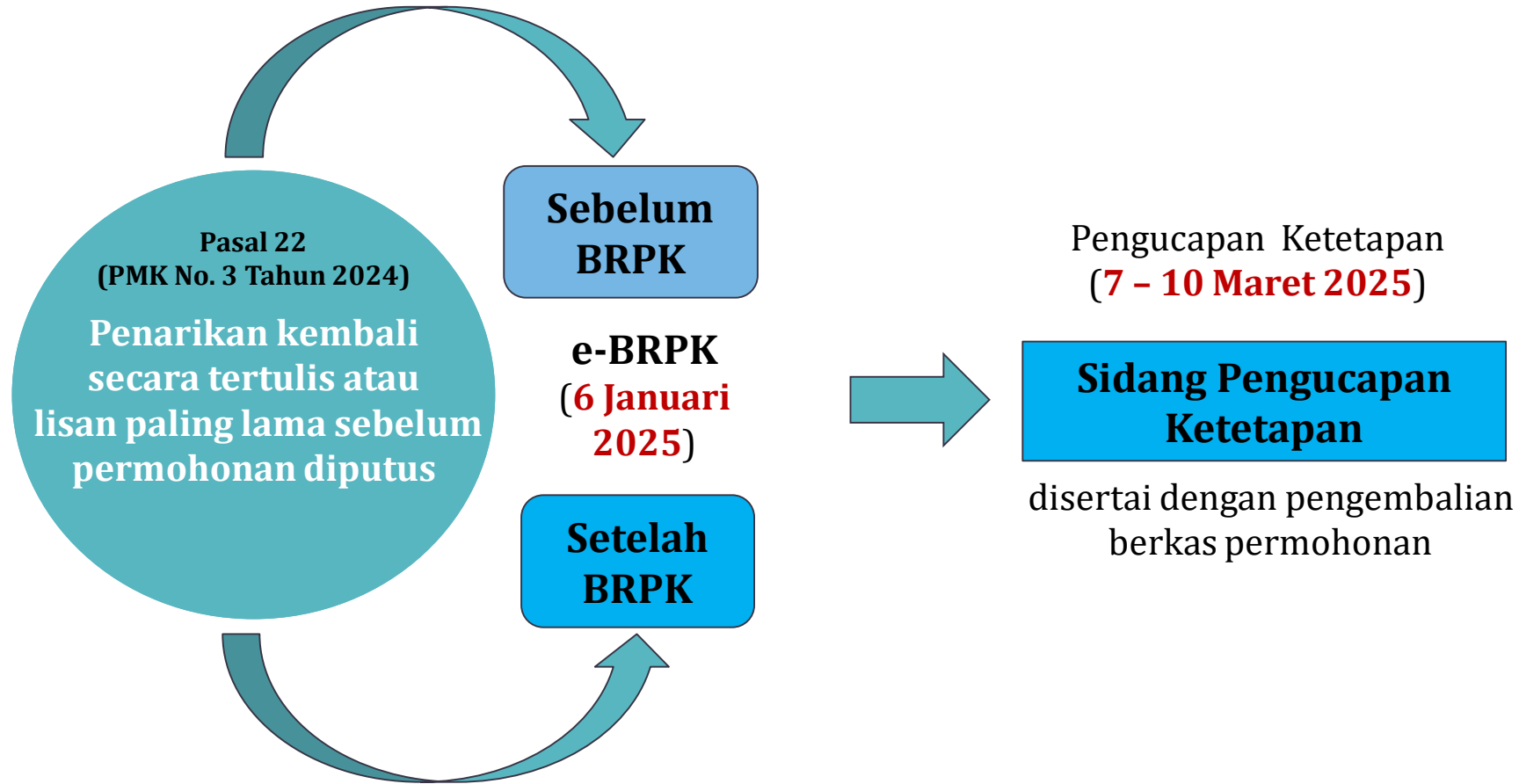
- Laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim
- Pembahasan perkara
- Pengambilan putusan
- Penyusunan putusan

18. Pengucapan Putusan/Ketetapan (Fase 2)

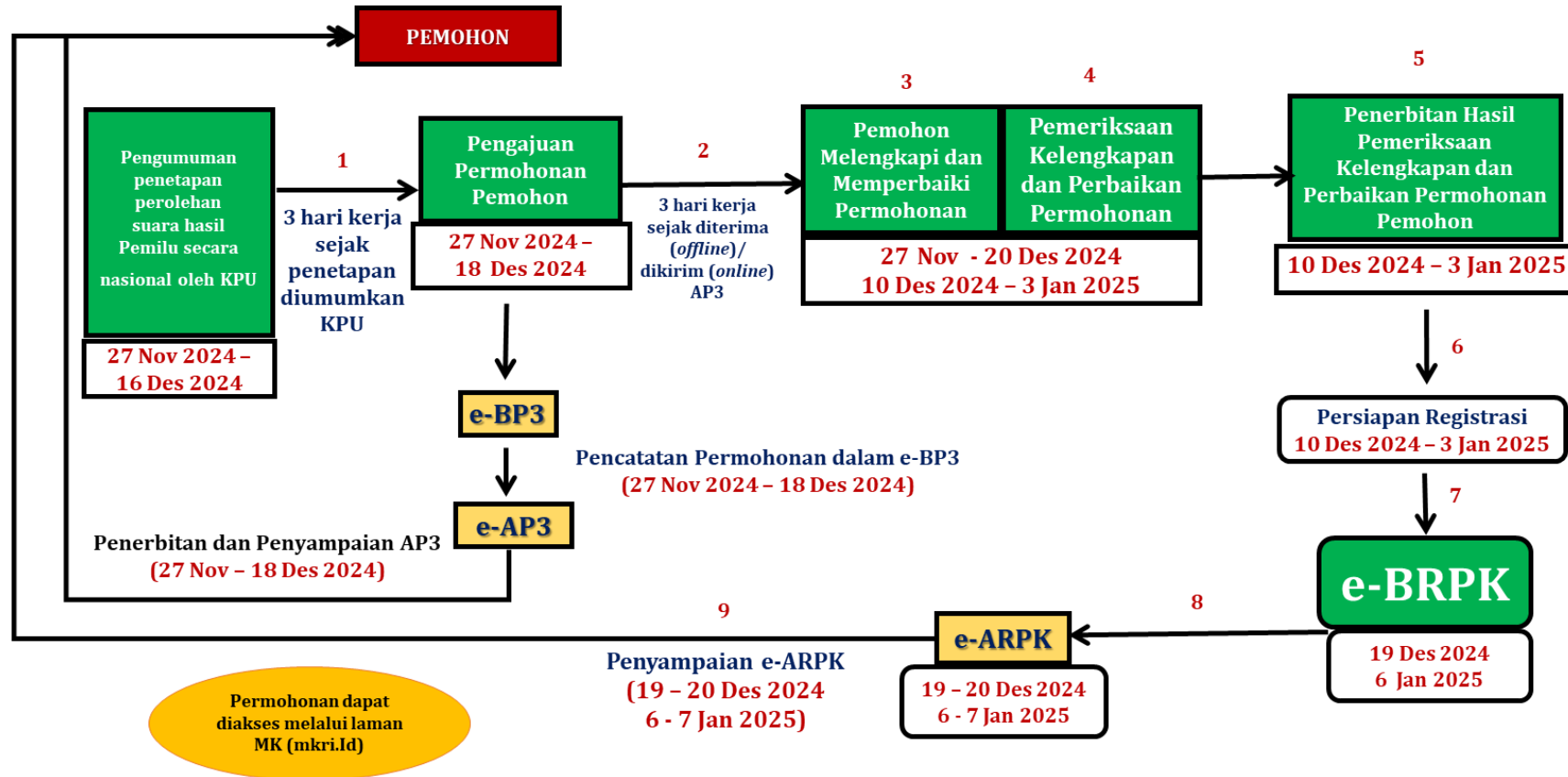
19. Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (Fase 2)

- Putusan paling lama **45 (tiga) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Penyampaian Salinan Putusan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak pengucapan Putusan/Ketetapan

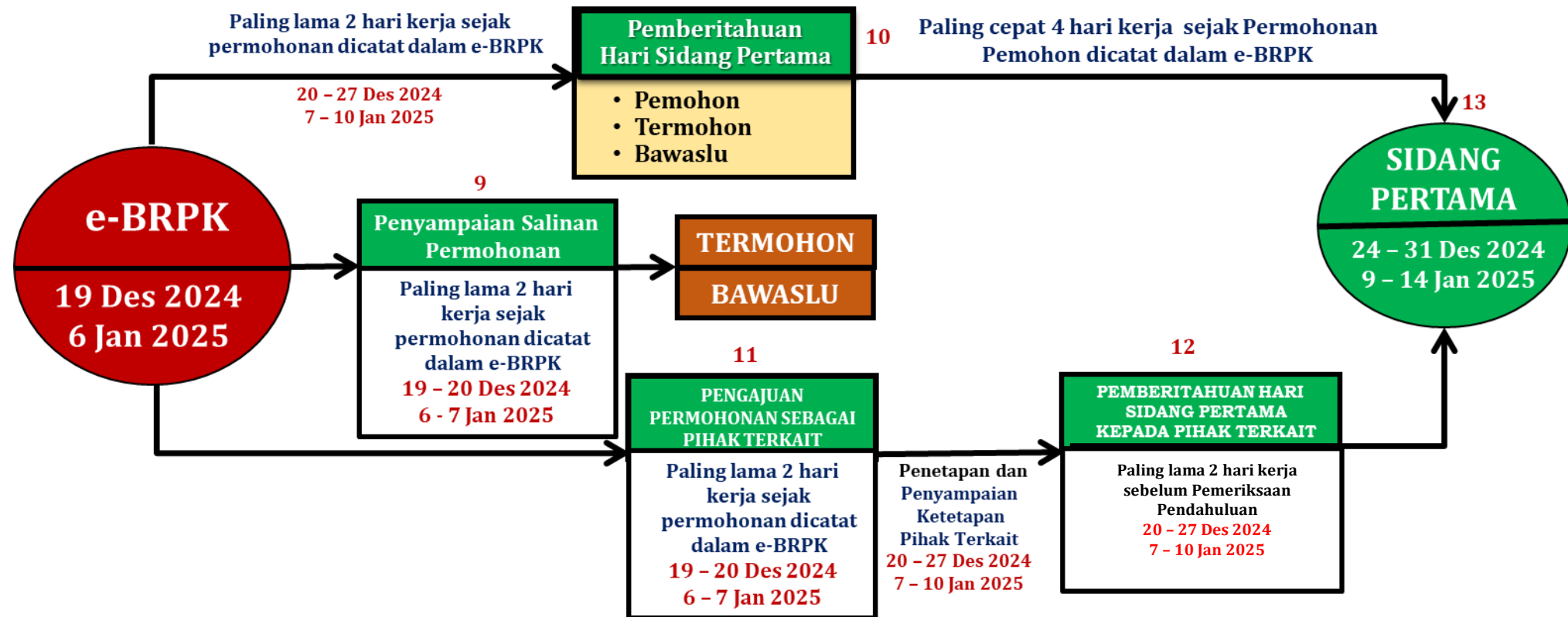
MEKANISME PENARIKAN KEMBALI



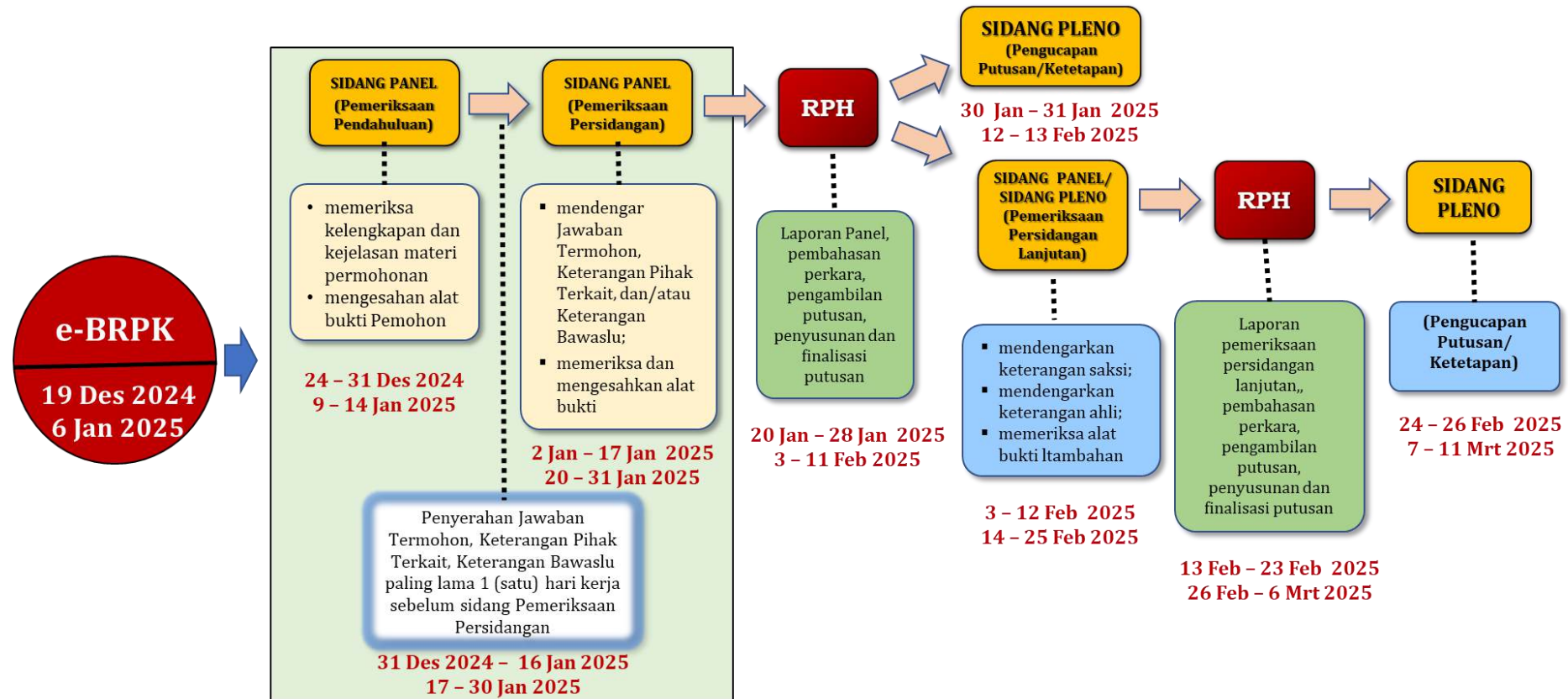
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN



MEKANISME DAN TAHAPAN PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



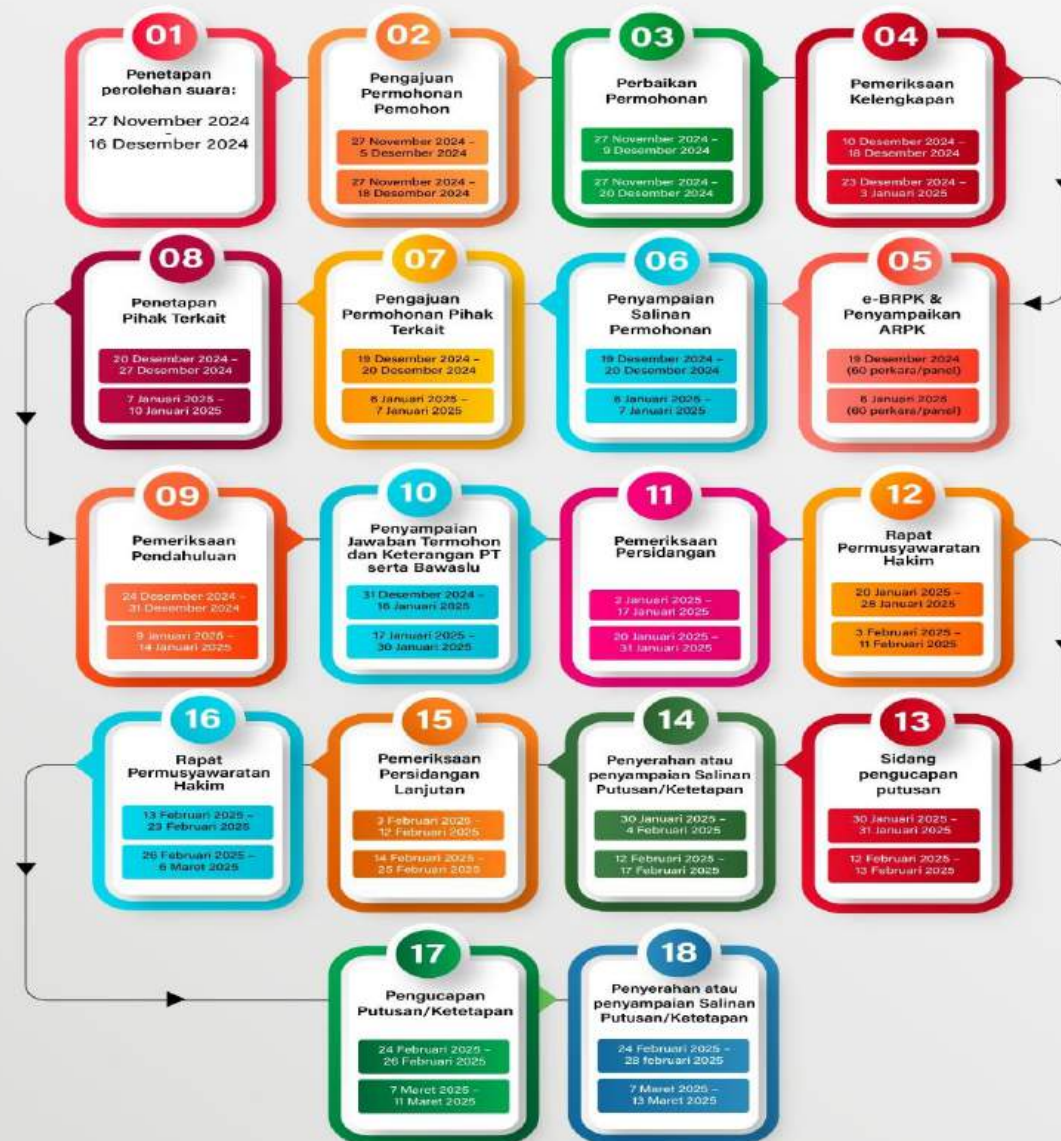
MEKANISME DAN TAHAPAN PERSIDANGAN



Catatan: Persidangan dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik lainnya dengan mengajukan Permohonan kepada Mahkamah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang. (Pasal 38, PMK No. 3 Tahun 2024)



Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpl.mkri.id)

3

Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

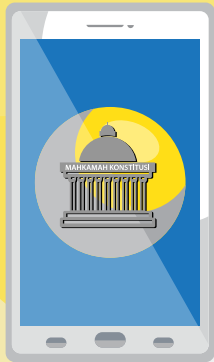
4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **tepercaya**”.

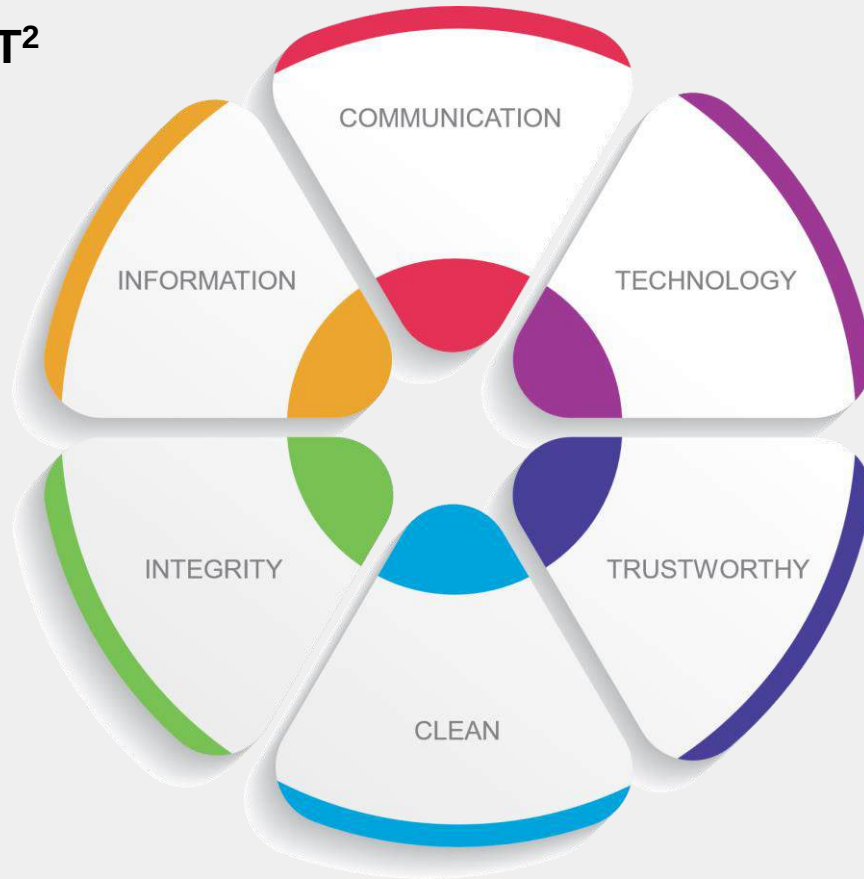




Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

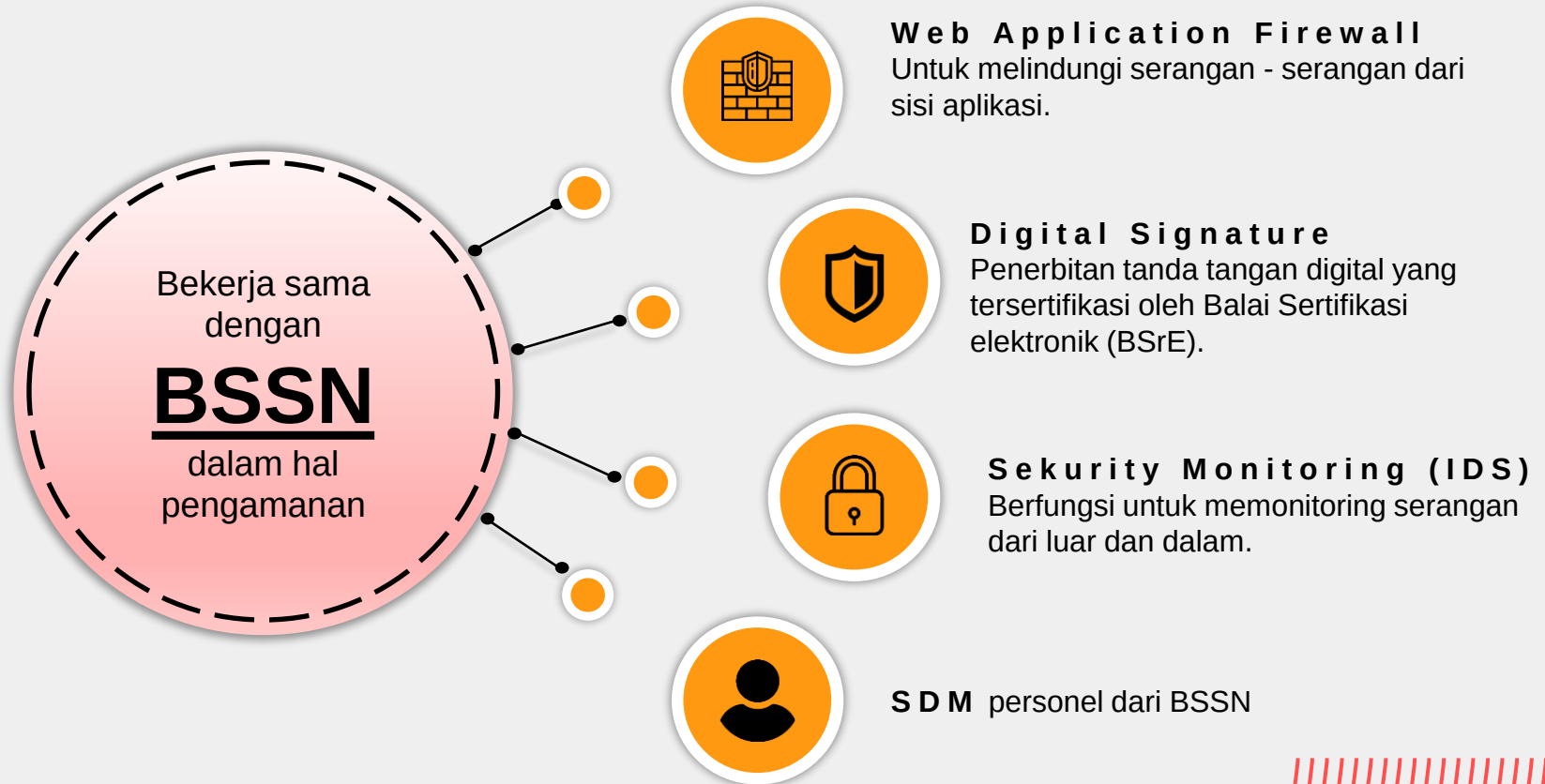


MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untuk antisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara luring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- a. Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- b. Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- c. Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- d. Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

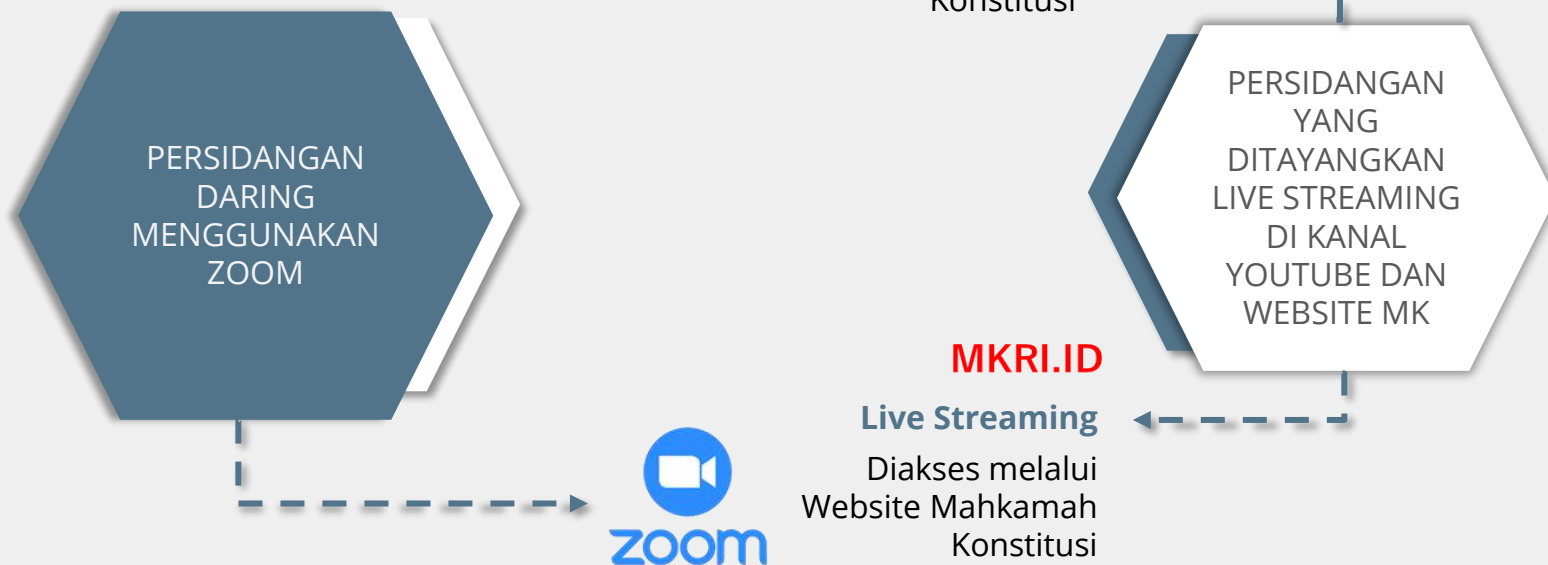
Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



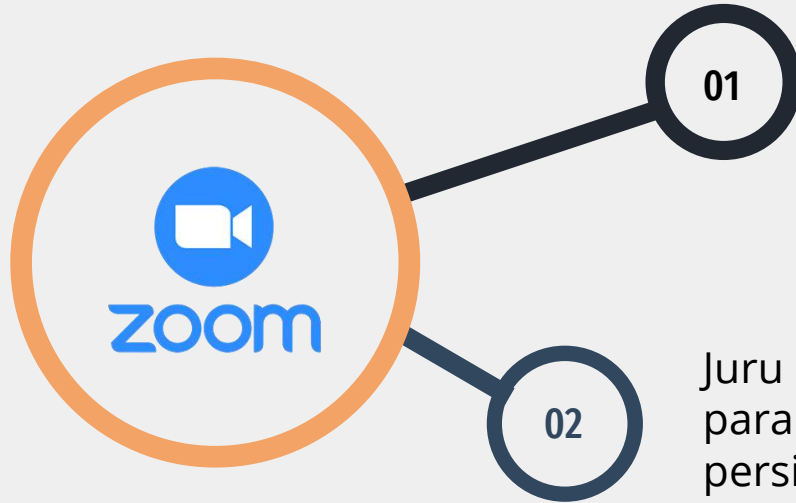
PERSIDANGAN VIRTUAL



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



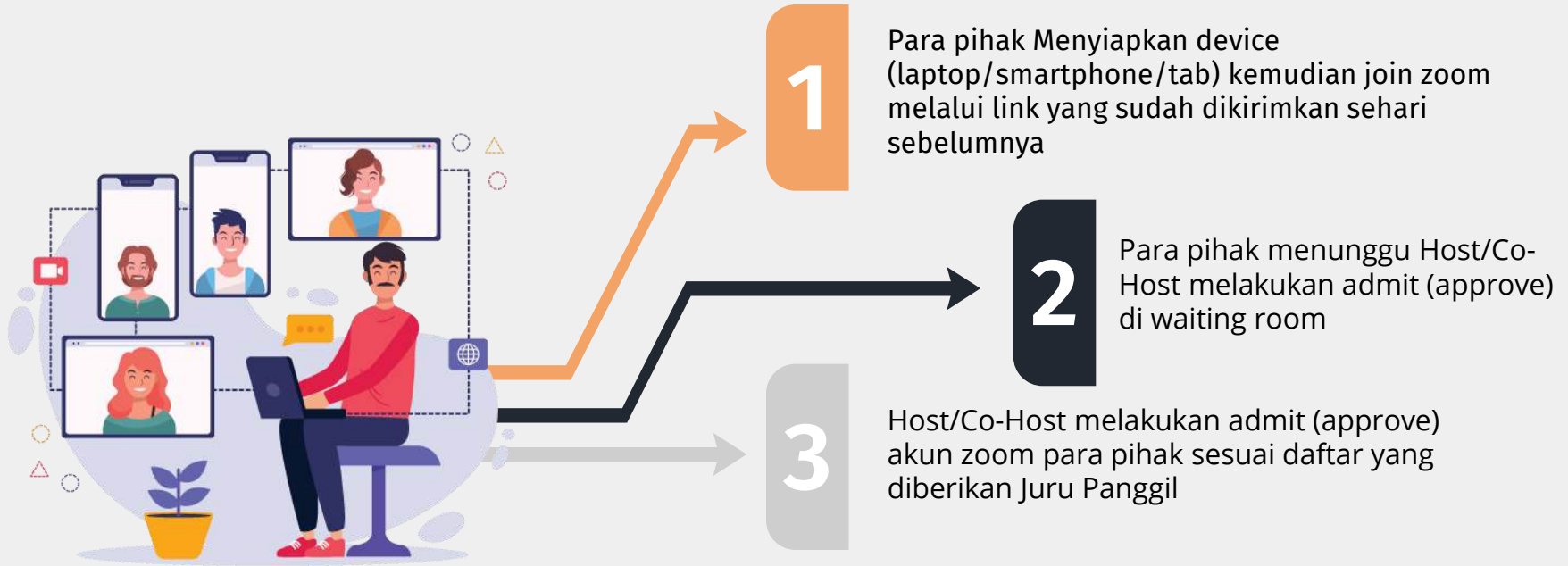
TAHAP PERSIAPAN



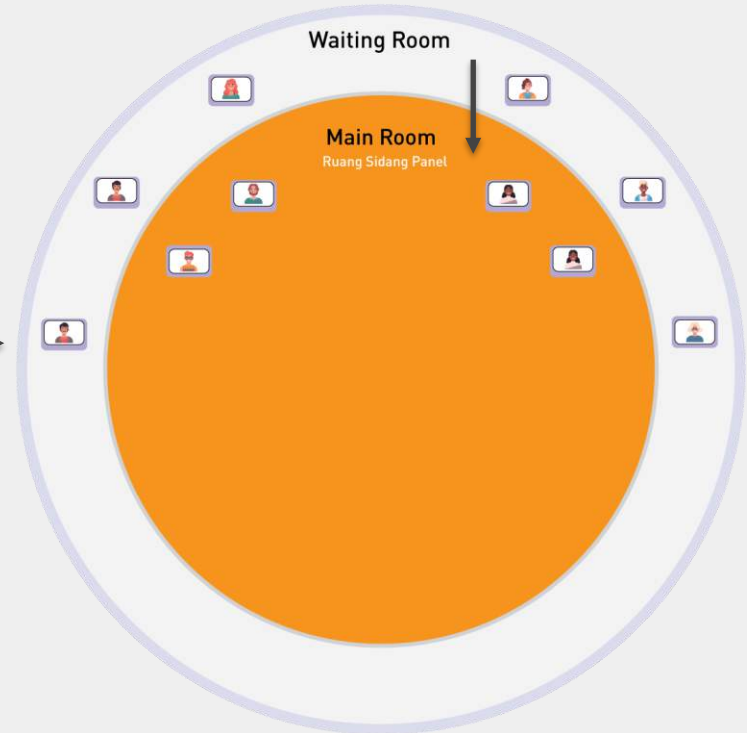
01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan

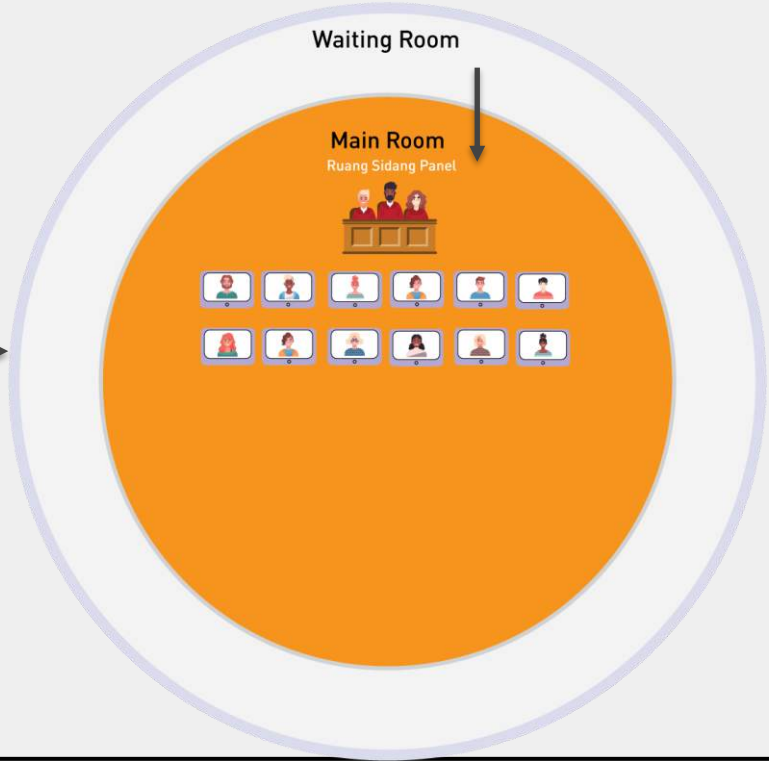
ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 68 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®

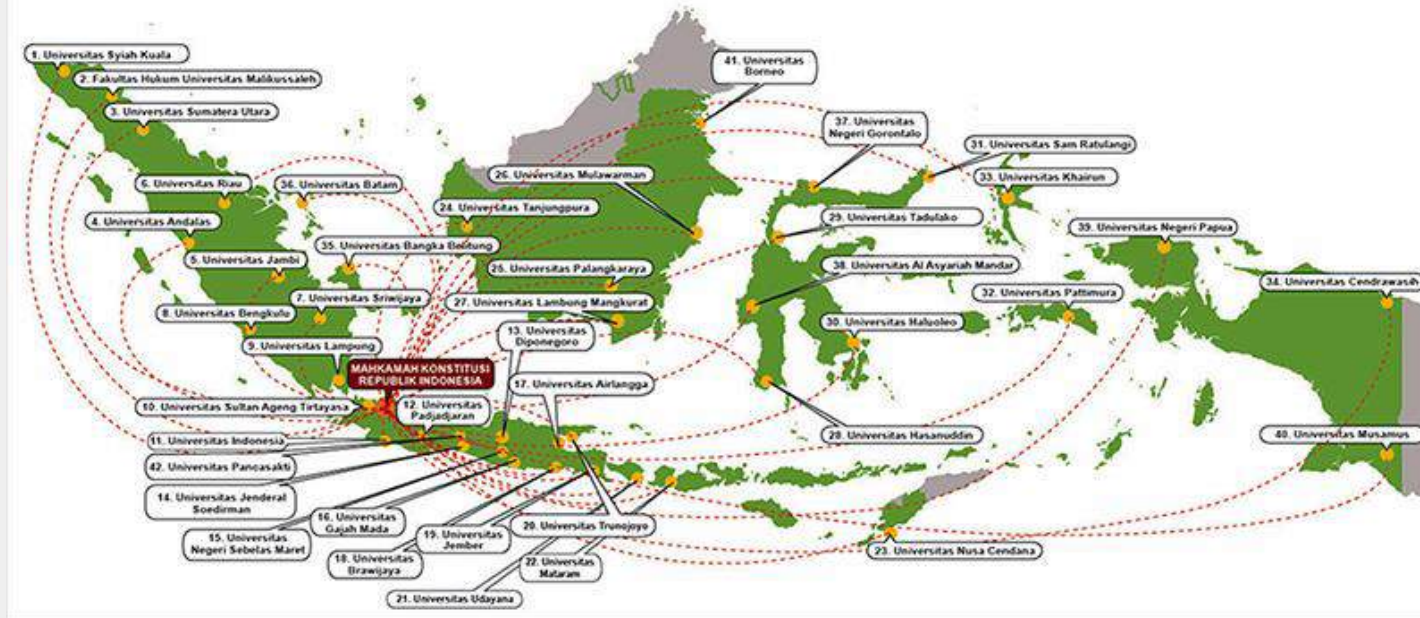


VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 68 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBRG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



No	FAKULTAS HUKUM	ALAMAT
54	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya Km.4, Terbuyo Kulon, Genuk, Semarang Jawa Tengah.
55	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek No.6 Kel. Nae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima-NTB
56	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meurebeo, Kab. Aceh Barat, Aceh
57	Universitas Islam Kadir	Jl. Sersan Sumarhaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri Jawa Timur
58	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kpt. Mukhtar Basri No.3 Medan, 20238 Sumatera Utara
59	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jalan, Timoho 317 Yogyakarta 55225
60	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya Gn. Bahagia Balikpapan
61	Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar	Jl. Sultan Alauddin No. 63 Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
62	Kampung Wasur	Kampung Wasur, Kab. Merauke Provinsi Papua
63	Desa Mekar Sari	Desa Mekar Sari, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
64	Universitas Negeri Padang	Jl. Prof.Dr.Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat
65	Universitas Nusa Lontar Rote	Kompleks UNSTAR Mokdale BA'A-Rote Ndao (85914) Nusa Tenggara Timur
66	Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan
67	Fakulta Hukum Universitas Ahmad Dahlan	598M+M7V, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191
68	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	Jl. Pegangsaan timur 56 No.1, Denpasar-Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA TAHUN 2024

NO	TANGGAL	NO PERKARA	POKOK PERKARA	ACARA SIDANG	TEMPAT
1	16-01-2024	148/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
2	23-04-2024	06/MMK/L/04/2024	Laporan Pelanggaran Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi	Sidang Pemeriksaan Lanjutan (mendengarkan keterangan pelapor dan/atau memeriksa alat bukti)	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
3	25-04-2024	06/MMK/L/04/2024 07/MMK/L/04/2024	Laporan Pelanggaran Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
4	28-05-2024	258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Dapil MALUKU TENGAH 1 Tahun 2024	Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan	Fakultas Hukum Universitas Pattimura
5	29-07-2024	88-89/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
6	12-08-2024	88-89-90/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-	Perbaikan Permohonan (II)	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
7	20-08-2024	88-89-90/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS VIDEO CONFERENCE PADA MINI COUTROOM DI 68 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



[illegible]

<https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUmN87ILAvoki5LFoxww/editing/images> num : Dr. Suhartoyo.

Sidang Pengucapan Putusan

Sidang Perkara Nomor

Sidang Perkara Nomor

Sidang Perkara Nomor

Sidang Perkara Nomor

PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

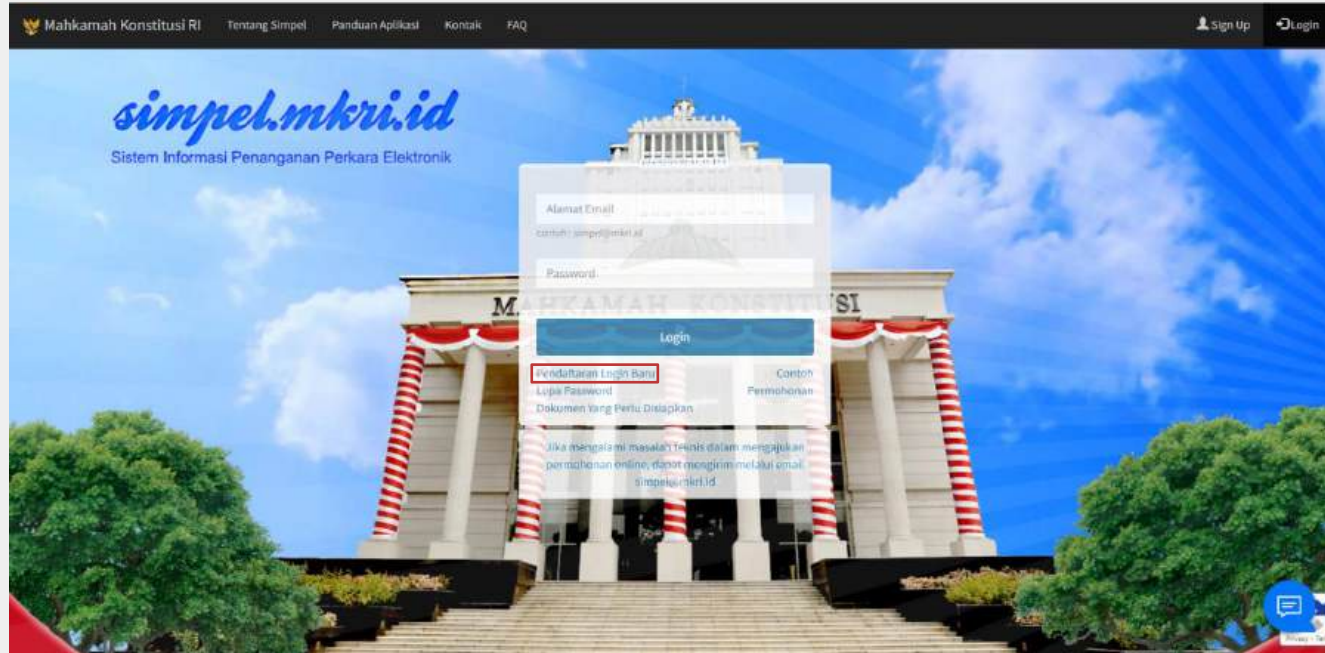
"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the registration form for the Mahkamah Konstitusi's electronic case management system. The form is overlaid on a background image of the building. The form fields are as follows:

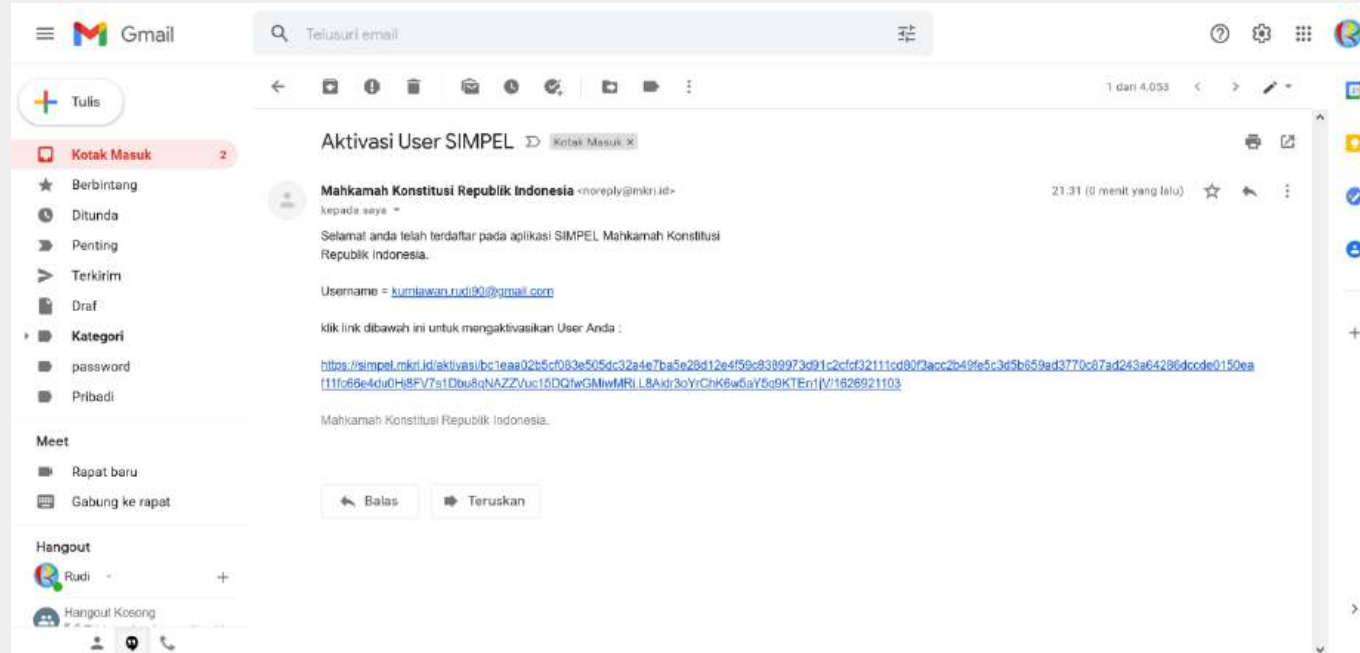
- Full Name: Rudi Kurniawan
- Phone Number: 081802622345
- Email: kurniawan.rudi90@gmail.com
- Password: (masked with asterisks)

Below the form fields are two buttons: "Register" (in a blue box) and "Lupa Password" (in a white box). At the bottom left of the form, there is a link: "Saya sudah punya akun".

The background image shows the entrance of the Mahkamah Konstitusi building with its distinctive red and white striped columns. The sky is blue with white clouds. In the top right corner of the website header, there are links for "Sign Up" and "Login".

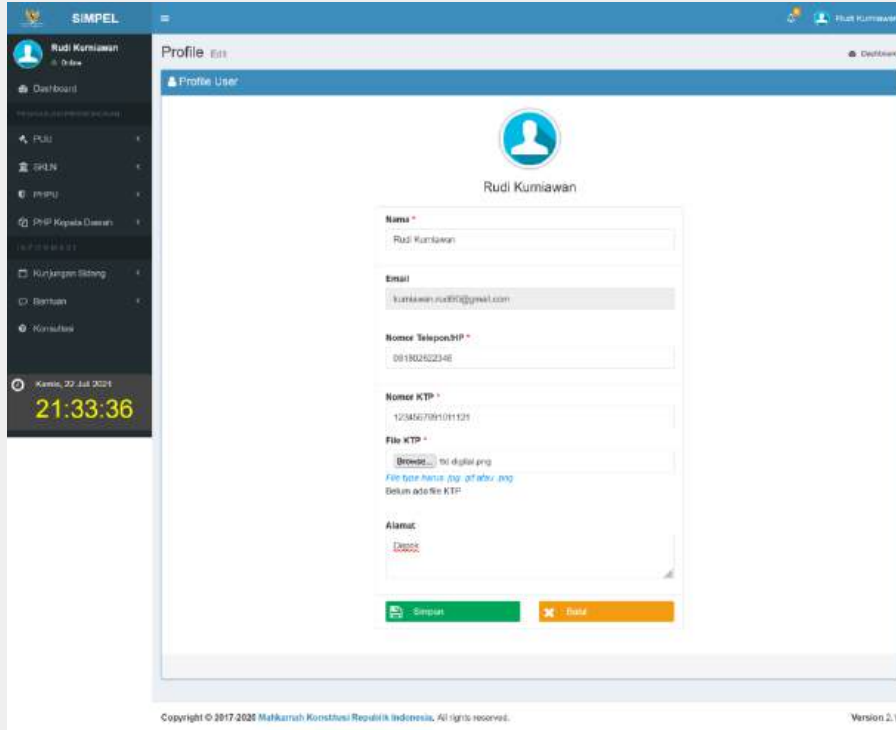
Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Elektronik) web application. The user is logged in as Rudi Kumiawan. The page displays the 'Profile User' section with the following fields:

- Nama ***: Rudi Kumiawan
- Email**: kumiawan.rudi@gmail.com
- Nomer Telepon SIP ***: 08180262348
- Nomer KTP ***: 1234567891011121
- File KTP ***: (no digital prog)
[File type harus jpg, gif atau png](#)
[Belum ada file KTP](#)
- Alamat**: (no digital prog)

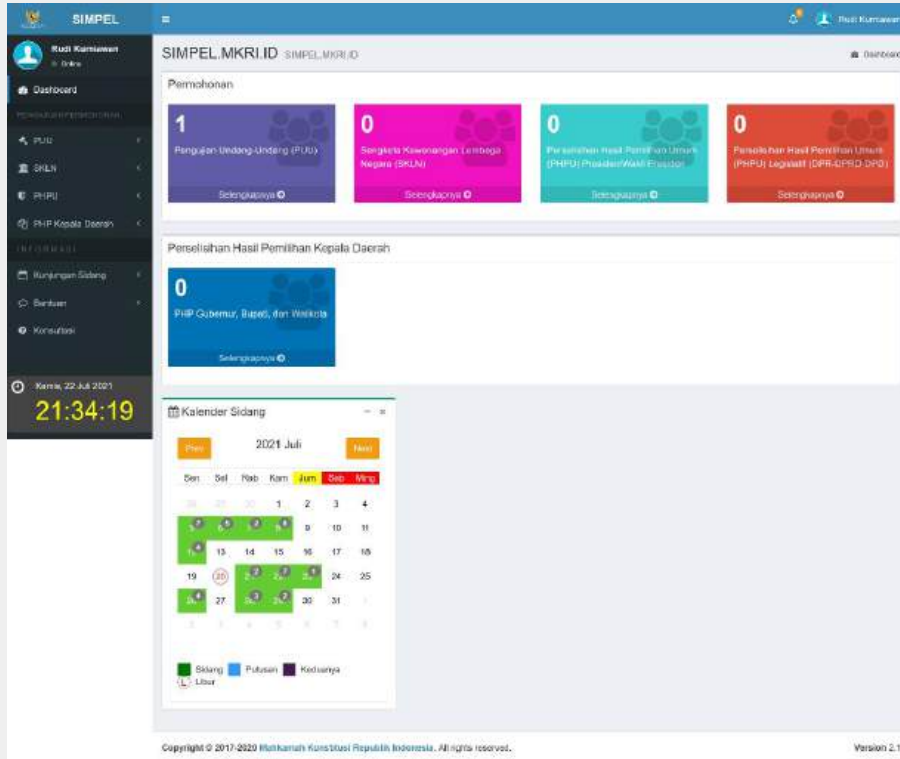
At the bottom of the form, there are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Hapus' (Delete).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PERMOHONAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFO UMUM

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021
21:34:52

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

Permohonan *

Uraian Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)

Dokumen yg harus disiapkan:

KTP Pemohon (dalam format .jpg)

Email Pemohon

KTP Kuasa (dalam format .jpg) **

Email Kuasa **

Surat Kuasa (dalam format .pdf) **

File KTA/BAS (bagi advokat) **

Permohonan (dalam format .pdf)

Permohonan (dalam format .doc/docx)

Daftar alat bukti (dalam format .doc)

Alat/dokumen bukti

Keterangan:
** jika menggunakan kuasa pemohon

Batal

Simpan

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard - Permohonan Online - Permohonan PUU

SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit

Pokok permohonan :

Contoh Pengujian Materiil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon

+ Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomer Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	 

Data Kuasa

+ Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomer Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	 

 Batal (Hapus Permohonan)

 Simpan Sementara

 Lanjutkan Upload Dokumen

Version 2.1

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGALUAN PERKORONGAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021
21:40:58

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

PUU(Pengujian Undang-Undang)

Proses Pengisian Pokok PermohonanProses Pengisian Data Permohonan dan KuasaProses Upload Dokumen

Berkas Permohonan

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

Tambah Berkas

Kembali (Edit Permohonan)

Batal (Hapus Permohonan)

Simpan Sementara

Kirim Permohonan

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

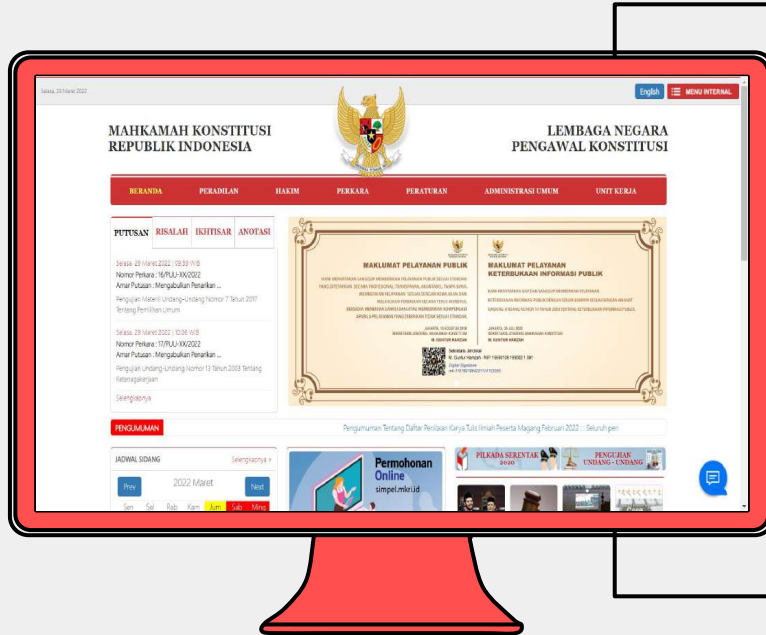
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE

Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN

RISALAH

IKHTISAR

ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**

HAKI MELAYANAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TAMPIL BUKAL, MELAKUKAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAKAN PERBARUKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERGESERA MELAKUKAKAN LARANG DAPATKAN MENGEKSPANSI KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 18 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
DR. GUNTUR HANZAN



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzan - NP 190401061900021001
Digital Signature
no: 1107001094027114103285

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

SEKSI KEMENTERIAN RIAP ENK SANGGUP MELAKUKAKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SUDUT BAKU DAN SUDUT DENGAN AKURAT SINGKAT, URAIAN NOYOR 31 TH 2018 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 20 JULI 2020
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
DR. GUNTUR HANZAN

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ... Seluruh per

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen

Sel

Rab

Kam

Jum

Sab

Ming

**Permohonan
Online**
simplm.kri.id

**PIKADA SERENTAK
2020**

**PENGUJIAN
UNDANG - UNDANG**





PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

[BERANDA](#)[PERADILAN](#)[HAKIM](#)[PERKARA](#)[PERATURAN](#)[ADMINISTRASI UMUM](#)[UNIT KERJA](#)

PUTUSAN

RISALAH

IKHTISAR

ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYERANGKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TAMPIL BUKAL, BERKUALITAS PELAYANAN, SESUAI DENGAN KEWILAYAHAN DAN MELAKUKAN PERBARUKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERGAYA, PRAHARA LAMBI DAPATKAN MENINGKATKAN KOMPETENSI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 18 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
DR. GUNTUR HANZAN



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzan - NPI 19040106190021001
Digital Signature
no: 1107001094027114103285

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYERANGKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SESUAI DENGAN PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 20 JULI 2020
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
DR. GUNTUR HANZAN

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per

JADWAL SIDANG
Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen

Sel

Rab

Kam

Jum

Sab

Ming









JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG [Selengkapnya >](#)

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Yedunya ■ Tunda ⌚ Ubur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik



simpel.mkri.id

BERITA

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PRAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:15 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partel Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendidikannya Bahwa Dewan Kehormatan



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Penelusuran Perkara



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sajian Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Controv



SP4N-LAPOR

Mahkamah Konstitusi

[Selengkapnya >>](#)



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Yedunya ■ Tunda ⌚ Ubur

 Agenda Sidang

 Silaran Pers

 Berlangganan

 LLM

 Konsultasi

 Dewan Etik



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PRAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partel Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Penderiannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

 Hakim Konstitusi

 Putusan

 Streaming dan Video Conference

 Case Tracking

 Informasi Anggaran

 AACC

 LPSE MKRI

 JDIH

 Pusdik MKRI

 Perpustakaan

 Pusat Sajian Konstitusi

 Gedung MK

 Majalah Konstitusi

 Jurnal Konstitusi

 Jurnal Contrev

 SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG [Selengkapnya >](#)

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Pengadilan ■ Tunda ⌚ Ubur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik



Permohonan Online
simpler.mkriid

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PRAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partel Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan



PILKADA SERENTAK 2020



PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Case Tracking



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sajian Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Controv



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

[Selengkapnya >>](#)



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Vedanya ■ Tunda ⌚ Ubur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Permohonan Online
simpl.mkriid

simpl.mkriid

BERITA

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PRAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partel Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendidikannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Penelusuran Perkara



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sajian Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Contrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



LIVE STREAMING PERSIDANGAN



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendidirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Constrev



SP4N-LAPOR

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan. Sela...



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa...



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin...



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin...



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin...



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...



2352-9000
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mki.go.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



© Copyright 2015 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
erat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

<https://www.youtube.com/watch?v=rU7ODR2kR2A>

Select Language

CASE TRACKING

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Pengadilan ■ Tunda ⌚ Ubur

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlangganan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

Permohonan Online
simplmkrj.id

simplmkrj.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PRAT
Jakarta, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partel Ummat
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKRI Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendidikannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Case Tracking

Informasi Anggaran

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Pusdik MKRI

Perpustakaan

Pusat Sajian Konstitusi

Gedung MK

Majalah Konstitusi

Jurnal Konstitusi

Jurnal Contrev

SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

MKRI

PUU

SKLN

PHPU

PHPKADA

Jenis dokumen

☐ Putusan

☐ Anotasi

☐ Ikhtisar Putusan

☐ Risalah Persidangan

Jenis perkara

☐ Semua jenis perkara

☐ PUU

☐ SKLN

☐ PHPU

☐ PHPU.A

☐ PHPU.C

☐ PHPU.D

☐ PHRGUB

Amar putusan

☐ Semua amar putusan

☐ Tidak dapat diterima

☐ Dikabulkan

☐ Dikabulkan sebagian

☐ Ditolak

☐ Ketidaksihan

12/PUU-XX/2022

Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.

Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

11/PUU-XX/2022

Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.

Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

10/PUU-XX/2022

Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.

Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

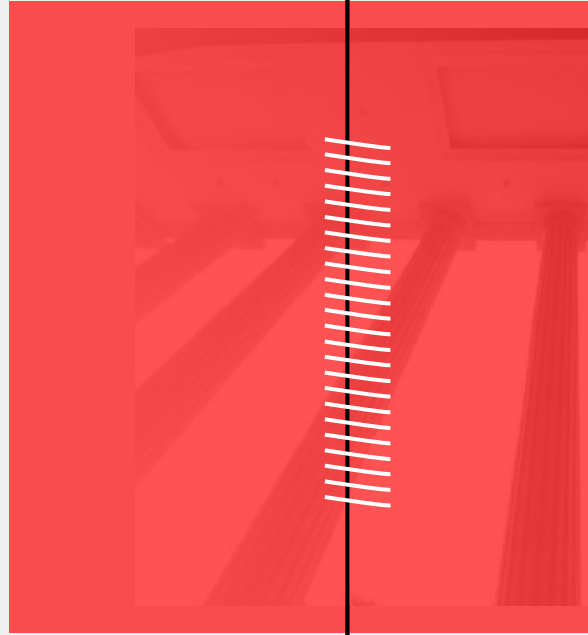
CASE TRACKING

[illegible]

CLICK MK



TERIMA KASIH



A hand holding a wooden gavel over a wooden surface with books in the background.

PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

**Oleh:
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM “BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA”
TAHUN 2024**

PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

1. Pemohon:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon)

2. Termohon

KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota

3. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon)



OBJEK PERMOHONAN

Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:

- **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur**
- **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**
- **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**

**TENGGANG WAKTU
PENGAJUAN
PERMOHONAN &
PERBAIKAN
PERMOHONAN
PEMOHON**

Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan.

Perbaikan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 (untuk permohonan offline) atau sejak dikirimkannya e-AP3 (untuk permohonan online)

**TENGGANG
WAKTU PENGAJUAN
PERMOHONAN
SEBAGAI PIHAK
TERKAIT**

Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK

**TENGGANG
WAKTU PENGAJUAN
JAWABAN DAN
KETERANGAN**

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan

SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan
27 Nov – 16 Des 2024

Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB

**Kamis, 5 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Jumat, 6 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB

**Senin, 16 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

SIMULASI PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan ke MK paling paling lam 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima/dikirimkannya e-AP3

e-AP3 diterima/dikirim: Jumat, 6 Desember 2024 pukul 13.00 WIB

**Jumat, 6 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Selasa, 10 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

e-AP3 diterima/dikirim: Selasa, 17 Desember 2024 pukul 10.00 WIB

**Selasa, 17 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Kamis, 19 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

Antara lain memuat:

- A. Identitas lengkap Pemohon;
- B. Uraian yang jelas mengenai:
 - 1. Kewenangan Mahkamah
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon
 - 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan
 - 4. Alasan-alasan Permohonan (posita)
 - 5. Hal-hal yang dimohonkan (Petitum)

Identitas lengkap Pemohon, paling kurang memuat:

- a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum,
- b. Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- c. Nomor kartu tanda advokat bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat.

Selain itu, Permohonan Pemohon juga memuat identitas Termohon:

- a) nama Termohon
- b) alamat Termohon

Lanjutan ...

Uraian yang jelas mengenai, antara lain:

1. Kewenangan Mahkamah, memuat:

Penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan

2. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat:

Penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah

3. Kedudukan hukum Pemohon, memuat:

Penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon

Lanjutan ...

4. Alasan-alasan Permohonan, antara lain memuat:

- a. Penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Penjelasan mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

5. Petitum, memuat antara lain:

- a. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Permintaan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS

Pemohon:

- nama dan alamat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan
- Email
- Identitas kuasa hukum (jika ada) memuat nama dan nomor kartu tanda advokat, nomor dan tanggal surat kuasa, dan alamat kuasa hukum.

Termohon:

nama dan alamat KPU/KIP Provinsi .. KPU/KIP Kabupaten/Kota ...

Lanjutan ...

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Pemohon menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang sejak Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 tidak lagi mengandung sifat kesementaraan.
- b. Pemohon menjelaskan mengenai objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan (Keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) yang memengaruhi penetapan calon terpilih.
- c. Pernyataan bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Lanjutan ...

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 2024 [permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon]
- b. Menjelaskan mengenai waktu (hari dan tanggal) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan ke MK
- c. Pernyataan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan

Lanjutan ...

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon
atau Pemohon adalah Pemantau Pemilihan (satu pasangan calon) yang terdaftar dan memperoleh akreditasi;
- b. Pemohon menjelaskan ketentuan pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016, yaitu:
 - 1) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon
 - 2) maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon
- c. Pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan

Lanjutan ...

4. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- a. Pemohon menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Pemohon menjelaskan mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- c. Pemohon dapat menguraikan dalil kualitatif yang dihubungkan dengan kesalahan penghitungan suara.

5. PETITUM

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan
- b. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota
- c. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon

Selain petitum di atas, Pemohon juga dapat meminta petitum alternatif berupa pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Pihak Terkait
- b. Uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait
- c. Petitum

Nama dan alamat Pihak Terkait, memuat:

- 1) Nama dan alamat Pihak Terkait sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota **atau** Pemantau Pemilihan dalam pemilihan satu pasangan calon dan/atau kuasa hukum,
- 2) Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- 3) Nomor kartu tanda advokat bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat

Lanjutan ...

Uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait, memuat:

Tanggapan Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon yang meliputi kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, kedudukan hukum Pemohon, posita Pemohon, petitum Permohonan, dan hal-hal lain mengenai Permohonan Pemohon

Petitum Pihak Terkait, memuat:

Mengabulkan eksepsi (jika mengajukan eksepsi)

Menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah benar dan tetap berlaku serta meminta penetapan suara yang benar (dalam pokok perkara)

PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

- a) nama dan alamat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan
- b) Email
- c) Identitas kuasa hukum (jika ada) memuat nama dan nomor kartu tanda advokat, nomor dan tanggal surat kuasa, dan alamat kuasa hukum.

Lanjutan ...

1. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1) Kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang sejak Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 tidak lagi mengandung sifat kesementaraan.
- 2) Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 2 PMK 2024.
- 3) Pernyataan Pihak Terkait bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota .

Lanjutan ...

B. Tenggang waktu pengajuan permohonan

- 1) Tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 2024 [permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon].
- 2) Waktu (hari dan tanggal) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan ke MK berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon.
- 3) Pernyataan Pihak Terkait bahwa Pemohon mengajukan Permohonan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Lanjutan ...

C. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon

atau Pemohon adalah Pemantau Pemilihan (satu pasangan calon) yang terdaftar dan memperoleh akreditasi

berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 2024;

2. Ketentuan pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016, yaitu:
 - jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon
 - maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon
3. Pernyataan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan

D. Eksepsi lainnya

Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa

Lanjutan ...

Dalam Pokok Permohonan

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- c. Dalil-dalil lainnya.

2. PETITUM PIHAK TERKAIT

Dalam Eksepsi (jika mengajukan eksepsi):

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

- 1) Menolak Permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.



**SEKIAN
TERIMA KASIH**

EVALUASI PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA TAHUN 2024

Oleh:
Triyono Edy Budhiarto
Plt. Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

**Disampaikan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Tahun 2024**

PERMOHONAN PEMOHON

1. Hal Permohonan:

- menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai keberatan terhadap keputusan KPU yang menjadi objek permohonan (*judul keputusan, nomor, tahun, tentang, tanggal, jam*)

2. Identitas:

Pemohon

- menguraikan dengan jelas dan lengkap identitas Pemohon (*nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (**menyesuaikan**) atau Pemantau Pemilihan dan/atau kuasa hukumnya (**jika ada**), alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang advokat].*

Termohon

- menguraikan dengan jelas dan lengkap *nama Termohon (Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi ...)* (**menyesuaikan**) dan tempat kedudukan

Lanjutan ...

3. Alasan Permohonan (*posita*):

3.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. menguraikan mengenai kewenangan MK untuk mengadili berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 beserta peraturan perundang-undangan perubahannya dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022
- b. menguraikan bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... Tahun 2024 (**menyesuaikan**)

Catatan:

Objek permohonan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih (bukan mengenai berita acara rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi)

- c. menyimpulkan bahwa menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... Tahun 2024 (**menyesuaikan**)

Lanjutan ...

3.2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Menguraikan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi ... (**menyesuaikan**);
- b. Menguraikan secara jelas dan lengkap Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... Tahun 2024 bertanggal ... 2024 yang diumumkan pada tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB) - (**menyesuaikan**) dan waktu pengajuan permohonan;
- c. Menyimpulkan menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Lanjutan ...

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling paling lama **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan



Penetapan Hasil Pemilihan
27 Nov – 16 Des 2024

Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis, 5 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Jumat, 6 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB

**Senin, 16 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

Catatan:

** Mahkamah memaknai **penetapan** dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon

Lanjutan ...

3.3. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. menguraikan mengenai ketentuan Pasal 4 PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- b. menguraikan mengenai kualifikasi Pemohon (pasangan calon) berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (misalnya: Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... Tahun 2024) dan Keputusan KPU/KIP Provinsi ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (misalnya: *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... Tahun 2024*) - (**menyesuaikan**)
- c. Hal-hal lain yang terkait dengan syarat formil lainnya (*jika diperlukan, antara lain ketentuan **Pasal 158 UU 10/2016***).

Persyaratan formil “**ambang batas**”:

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$

Lanjutan ...

Catatan:

- **Pasal 158 UU 10/2016** akan diberlakukan setelah **Pemeriksaan Persidangan** atau dipertimbangkan setelah **Pemeriksaan Persidangan** (lanjutan) bersama-sama dengan Pokok Permohonan
- Permohonan **tetap menguraikan Pasal 158 UU 10/2016** dalam kedudukan hukum dengan menghubungkannya pada Pokok Permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan **Pasal 158 UU 10/2016** dapat ditunda keberlakuaannya sehingga harus dibuktikan dalam **Pemeriksaan Persidangan** (lanjutan)

d. menyimpulkan bahwa menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... Tahun 2024 (**menyesuaikan**)

PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR

Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan **2.000.000 (dua juta) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Contoh

Jumlah Penduduk:

Provinsi X berpenduduk **1.905.121** jiwa, sehingga masuk kategori **2%**.

Perolehan Suara:

PASLON	PEROLEHAN SUARA
Pasangan Calon (Paslon 1)	637.200 suara
Pasangan Calon (Paslon 2)	601.500 suara
Pasangan Calon (Paslon 3)	598.600 suara
Total suara sah	1.837.300 suara

Cara Penghitungan:

$$2\% \times 1.837.300 = 36.746 \text{ suara}$$

- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2: $637.200 - 601.500 = 35.700$ suara
- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 3: $637.200 - 598.600 = 38.600$ suara

Kesimpulan:

- Paslon 2 memperoleh selisih suara dengan Paslon 1 sebesar **35.700** suara atau **kurang** dari **36.746** suara (**memenuhi syarat**)
- Paslon 3 memperoleh selisih suara dengan Paslon 1 sebesar **38.600** suara atau **lebih** dari **36.746** suara (**tidak memenuhi syarat**)

Lanjutan ...

3.4. Pokok Permohonan

1. Menguraikan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sebagai contoh:

Tabel 1

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	1.500.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.450.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	1.490.000
Total Suara Sah		4.440.000

(menyimpulkan berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **1.490.000** suara)

2. Menguraikan perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut penghitungan Pemohon, sebagai berikut:

Lanjutan ...

Tabel 2

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	1.450.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.490.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	1.500.000
Total Suara Sah		4.440.000

(menyimpulkan berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Pertama** dengan perolehan suara sebanyak **1.500.000** suara)

3. Menguraikan selisih perolehan suara Pemohon tersebut terjadi menurut Pemohon disebabkan karena apa (misalnya):
 - a. Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni ...
 - b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni ...
 - c. ...dst.

Lanjutan ...

3. Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*):

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan:
 - Keputusan KPU/KIP Provinsi ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon ... Tahun 2024, bertanggal ... 2024 pukul ...; (**menyesuaikan**) atau
 - Keputusan KPU/KIP Provinsi ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... Tahun 2024, bertanggal ... 2024 pukul ... sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK ...; (**menyesuaikan**)
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... Tahun 2024 dalam Keputusan KPU/KIP Provinsi ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... Tahun 2024 (**menyesuaikan**), yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Lanjutan ...

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	... suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	... suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	... suara
Total Suara Sah		... suara

(untuk petitem membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi keseluruhan) - (**menyesuaikan**)

4) Memerintahkan kepada:

- Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi ... (**menyesuaikan**) untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di ... atau
- Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi ... (**menyesuaikan**) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di ... atau
- Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi ... (**menyesuaikan**) untuk melaksanakan pemilihan ulang di ...

5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi ... (**menyesuaikan**) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN **(menghindari Permohonan tidak jelas / *Obscure Libels*)**

Posita:

1. Menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon
2. Hindari adanya kesalahan dalam penulisan (rincian kehilangan suara, nama TPS, nama desa, dan nama kecamatan dsb).
3. Uraian dalam posita harus sesuai dengan petitum
4. Dalil terdapat dalam posita tetapi tidak ada dalam petitum atau sebaliknya.

Petitum:

1. Petitum yang satu dengan lainnya kontradiktif, sebaiknya dibuat alternatif
2. Petitum harus meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi sepanjang yang didalilkan.
3. Petitum meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan Pihak Terkait, antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*) serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat
- b. Uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan
- c. Uraian yang jelas mengenai:
 - tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait
 - tanggapan Pihak Terkait terhadap Permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, kedudukan hukum Pemohon, *Posita* Permohonan, *Petitum* Permohonan, dan hal-hal lain mengenai Permohonan Pemohon
- d. Hal-hal yang dimohonkan (*Petitum*) oleh Pihak Terkait

KETERANGAN PIHAK TERKAIT (contoh)

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

- menguraikan dengan jelas dan lengkap identitas Pihak Terkait (*nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilhn (menyesuaikan)*, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang advokat].

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Keterangan/Tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang meliputi kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai objek perselisihan

Catatan:

Objek permohonan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih (bukan mengenai berita acara rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi)

1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- *Keterangan/Tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang meliputi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan **Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024**, yaitu diajukan dalam jangka waktu **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan **penetapan** perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.*

1.3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Keterangan/Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Pemohon yang meliputi:

- 1) *Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau*
- 2) *Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dalam hal satu pasangan calon.*
- 3) *Hal-hal lain yang terkait dengan syarat formil lainnya (jika diperlukan, antara lain ketentuan **Pasal 158 UU 10/2016**).*

Lanjutan ...

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menerangkan/menanggapi dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Posita Permohonan, Petitum Permohonan, dan hal-hal lain mengenai Permohonan Pemohon

(misalnya: mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon)

III. PETITUM

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*b. Menyatakan ... Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (**menyesuaikan**).*

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

SEKIAN dan TERIMA KASIH



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1764/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

07 Oktober 2024

Kepada,
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi
Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 7 Oktober 2024
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk570999513241007083400

Lampiran I

Nomor : 1764/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 07 Oktober 2024

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK
ANGKATAN III

Hari, Tanggal : Senin, 7 Oktober 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 7 Oktober 2024	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. - YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



Lampiran II

Nomor : 1764/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 07 Oktober 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota d. Ketentuan Permohonan Pemohon : 1) <i>Legal Standing</i> Pemohon 2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan 3) Pokok Permohonan 4) <i>Petitum</i> e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 1) Pemeriksaan Pendahuluan 2) Pemeriksaan Persidangan 3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli 4) Putusan Sela e. Putusan Mahkamah Konstitusi 1) Pengambilan Putusan 2) Sistematika Putusan f. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 961/DK.06.00/07/2024

17 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Presiden Partai Buruh

Bapak Ir. Said Iqbal

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1131048203240717101228



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1733/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

02 Oktober 2024

Kepada,

YM. Hakim Konstitusi

Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 7 Oktober 2024
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk570999513241001014447

Lampiran I

Nomor : 1733/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 02 Oktober 2024

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK
ANGKATAN III

Hari, Tanggal : Senin, 7 Oktober 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 7 Oktober 2024	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



Lampiran II

Nomor : 1733/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 02 Oktober 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota d. Ketentuan Permohonan Pemohon : 1) <i>Legal Standing</i> Pemohon 2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan 3) Pokok Permohonan 4) <i>Petitum</i> e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 1) Pemeriksaan Pendahuluan 2) Pemeriksaan Persidangan 3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli 4) Putusan Sela e. Putusan Mahkamah Konstitusi 1) Pengambilan Putusan 2) Sistematisa Putusan f. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1224/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

15 Agustus 2024

Kepada Yth.
Presiden Partai Buruh
Bapak Ir. Said Iqbal
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **15 (lima belas)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Buruh yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 8 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 7 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **1 (satu)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 23 September 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-405424515240731014716

Lampiran I

Nomor : 1224/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **15 (lima belas)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Buruh yang terdiri dari:
 - 8 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 7 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c. DPP Partai Buruh memberikan daftar nama peserta sebanyak **15 (lima belas)** orang paling lambat pada tanggal **23 September 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. ***Boarding pass***
Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
 - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
 - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
 - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
 - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
 - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
 - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
 - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
 - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. **Transport Darat/Laut**

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus **dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi**. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan kegiatan.

6. **Lain-lain**

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. **Kontak**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1224/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 7 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Selasa, 8 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 9 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 10 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1224/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
15										



Lampiran IV
Nomor : 1224/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Buruh menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
15.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
7 s.d. 10 Oktober 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Buruh
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1626/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

24 September 2024

Kepada Yth.

Presiden Partai Buruh

Bapak Ir. Said Iqbal

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 7 Oktober 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
[mk288467817240820120902](#)

Lampiran I

Nomor : 1626/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : **Senin, 7 Oktober 2024**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 7 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1732/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

02 Oktober 2024

Kepada Yth,

**Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.**
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 8 Oktober 2024
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk955468595241001014550

Lampiran I

Nomor : 1732/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 02 Oktober 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DINAMIKA PENANGANAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN
WALIKOTA TAHUN 2024

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili; b. Pembentukan Mahkamah Konstitusi; c. Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi; d. Struktur dan Mekanisme Kerja; e. Asas-asas Hukum Acara MK; f. Dinamika Penanganan PHPU dari tahun 2005 s.d. 2020; e. Landmark Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 960/DK.06.00/07/2024

17 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

Bapak H. Muhammad Anis Matta, Lc., M.A.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1131048203240717101329



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1223/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

15 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
Bapak H. Muhammad Anis Matta, Lc., M.A.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **15 (lima belas)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Gelora yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 8 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 7 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **1 (satu)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 23 September 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-405424515240731014856

Lampiran I

Nomor : 1223/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **15 (lima belas)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Gelora yang terdiri dari:
 - 8 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 7 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c. DPP Partai Gelora memberikan daftar nama peserta sebanyak **15 (lima belas)** orang paling lambat pada tanggal **23 September 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. ***Boarding pass***
Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
 - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
 - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
 - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
 - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
 - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
 - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
 - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
 - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. **Transport Darat/Laut**

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus **dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi**. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan kegiatan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1223/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 7 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Selasa, 8 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 9 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 10 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1223/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
15										



Lampiran IV
Nomor : 1223/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Gelora menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
15.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
7 s.d. 10 Oktober 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Gelora
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1625/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

24 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

Bapak H. Muhammad Anis Matta, Lc., M.A.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 7 Oktober 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1428090353240820120913

Lampiran I

Nomor : 1625/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : **Senin, 7 Oktober 2024**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 7 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1731/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

02 Oktober 2024

Kepada Yth.,
Panitera Muda III
Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 8 Oktober 2024
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Muda I dan II.



Digital Signature
mk-1110814328241001014704

Lampiran I

Nomor : 1731/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 02 Oktober 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI MEKANISME, TAHAPAN DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
TAHUN 2024

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya. 1) Secara Langsung 2) Secara Online c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 6805/2600/DK.06.00/08/2024

Kepada Yth. : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Permohonan Dukungan Tim Publikasi dan Dokumentasi pada Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024** yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. November 2024 secara *offline* (luring) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bersama ini kami sampaikan permohonan dukungan tenaga desain dan publikasi untuk menyukseskan penyelenggaraan kegiatan dimaksud sebanyak **3 (tiga)** orang yang terdiri dari **1 (satu) orang tenaga Desain/Fotografer, 1 (satu) orang tenaga Kameramen, dan 1 (satu) orang tenaga Reporter** dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jadwal	Tempat
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I	19 s.d. 22 Agustus 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi IKA FH Universitas Andalas dan Wartawan	26 s.d. 29 Agustus 2024	
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	30 Agustus s.d. 1 September 2024	Hotel Sultan Solo
4..	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil	3 s.d. 6 September 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



No.	Kegiatan	Jadwal	Tempat
	Wali Kota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II		
5.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan I	9 s.d. 12 September 2024	
6.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan II	10 s.d. 13 September 2024	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
7.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III	17 s.d. 20 September 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
8.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV	18 s.d. 20 September 2024	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
9.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan I	23 s.d. 26 September 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
10.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II	30 September s.d. 3 Oktober 2024	



No.	Kegiatan	Jadwal	Tempat
11.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III	7 s.d. 10 Oktober 2024	
12.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat (Peradi Papua dan Peradi SAI Papua)	11 s.d. 13 Oktober 2024	Hotel di Jayapura
13.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi KPU Papua Barat Barat Daya	18 s.d. 20 Oktober 2024	Hotel di Sorong/Raja Ampat
14.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I	22 s.d. 25 Oktober 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
15.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan II	28 s.d. 31 Oktober 2024	
16.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan III	4 s.d. 7 November 2024	
17.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil	11 s.d. 14 November 2024	



No.	Kegiatan	Jadwal	Tempat
	Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan IV		

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1033152743240815090631



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 959/DK.06.00/07/2024

17 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

Bapak I Gede Pasek Suardika, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1131048203240717101416



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1222/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

15 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
Bapak I Gede Pasek Suardika, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **15 (lima belas)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Kebangkitan Nusantara yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 8 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 7 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **1 (satu)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 23 September 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-405424515240731014934

Lampiran I

Nomor : 1222/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **15 (lima belas)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Kebangkitan Nusantara yang terdiri dari:
 - 8 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 7 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c. DPP Partai Kebangkitan Nusantara memberikan daftar nama peserta sebanyak **15 (lima belas)** orang paling lambat pada tanggal **23 September 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. ***Boarding pass***
Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
 - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
 - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
 - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
 - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
 - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
 - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
 - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
 - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. **Transport Darat/Laut**

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus **dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi**. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan kegiatan.

6. **Lain-lain**

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. **Kontak**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1222/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 7 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Selasa, 8 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 9 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 10 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1222/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
15										



Lampiran IV
Nomor : 1222/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
15.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
7 s.d. 10 Oktober 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Kebangkitan Nusantara
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1614/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

24 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

Bapak I Gede Pasek Suardika, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 7 Oktober 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1511794142240820120926

Lampiran I

Nomor : 1614/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : **Senin, 7 Oktober 2024**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 7 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1730/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

02 Oktober 2024

Kepada Ykh. Saudara:

1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.

2. Rudi Kurniawan

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 8 Oktober 2024
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk851563382241001014754

Lampiran I

Nomor : 1730/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 02 Oktober 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Dasar Infrastruktur TIK, Persidangan jarak jauh dan streaming persidangan MK; b. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik; c. Website MK; d. Click MK.	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 6808/2600/DK.06.00/08/2024

Kepada Yth. : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Permohonan Nama Narasumber IT pada Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024** yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. November 2024 secara *offline* (luring), bersama ini kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan nama narasumber sesi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik pada kegiatan-kegiatan dimaksud, dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I	Selasa, 20 Agustus 2024	15.30 – 17.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi IKA FH Universitas Andalas dan Wartawan	Selasa, 27 Agustus 2024	13.00 – 15.00 WIB	
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II	Rabu, 4 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	



No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
4..	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan I	Selasa, 10 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	
5.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan II	Rabu, 11 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
6.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III	Rabu, 18 September 2024	15.30 – 17.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
7.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV	Jumat, 20 September 2024	09.00 – 11.00 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
8.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Tim	Selasa, 24 September 2024	13.00 – 15.00 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan



No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
	Hukum Partai Politik Angkatan I			Pancasila dan Konstitusi
9.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II	Selasa, 1 Oktober 2024	13.00 – 15.00 WIB	
10.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III	Selasa, 8 Oktober 2024	13.00 – 15.00 WIB	
11.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat (Peradi Papua dan Peradi SAI Papua)	Sabtu, 12 Oktober 2024	13.00 – 15.00 WIT	Hotel di Jayapura
12.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi KPU Papua Barat Barat Daya	Sabtu, 19 Oktober 2024	13.00 – 15.00 WIT	Hotel di Sorong/Raja Ampat
13.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Rabu, 23 Oktober 2024	13.00 – 15.00 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan



No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
	Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I			Pancasila dan Konstitusi
14.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan II	Selasa, 29 Oktober 2024	13.00 – 15.00 WIB	
15.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan III	Selasa, 5 November 2024	13.00 – 15.00 WIB	
16.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan IV	Selasa, 12 November 2024	13.00 – 15.00 WIB	

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1587319261240815090743



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 958/DK.06.00/07/2024

17 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Bapak Dr. (H.C.) H. Oesman Sapta Odang

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1131048203240717101518



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1221/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

15 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Bapak Dr. (H.C.) H. Oesman Sapta Odang

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **15 (lima belas)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Hati Nurani Rakyat yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 8 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 7 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **1 (satu)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 23 September 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-405424515240731015018

Lampiran I

Nomor : 1221/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **15 (lima belas)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Hati Nurani Rakyat yang terdiri dari:
 - 8 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 7 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c. DPP Partai Hati Nurani Rakyat memberikan daftar nama peserta sebanyak **15 (lima belas)** orang paling lambat pada tanggal **23 September 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. ***Boarding pass***
Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
 - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
 - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
 - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
 - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
 - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
 - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
 - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
 - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. **Transport Darat/Laut**

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus **dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi**. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan kegiatan.

6. **Lain-lain**

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. **Kontak**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1221/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 7 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Selasa, 8 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 9 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 10 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1221/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
15										



Lampiran IV
Nomor : 1221/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
15.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
7 s.d. 10 Oktober 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Hati Nurani Rakyat
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1624/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

24 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Bapak Dr. (H.C.) H. Oesman Sapta Odang

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 7 Oktober 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
[mk1123511109240820120938](#)

Lampiran I

Nomor : 1624/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : **Senin, 7 Oktober 2024**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 7 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1729/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

02 Oktober 2024

Kepada Yth,
Saudara Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 9 Oktober 2024
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk-1457354278241001014854

Lampiran I

Nomor : 1729/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 02 Oktober 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024

POKOK BAHASAN	WAKTU
Penyusunan Permohonan Pemohon a. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon b. Identitas Lengkap Pemohon c. Uraian yang Jelas Mengenai : 1) Kewenangan Mahkamah 2) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon 3) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan 4) Pokok Permohonan Pemohon 5) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pemohon d. Contoh Penyusunan Permohonan Pemohon Penyusunan Keterangan Pihak Terkait a. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait 1) Nama dan Alamat Pihak Terkait 2) Uraian yang Jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon : a) Permohonan Pemohon b) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon c) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan d) Pokok Permohonan Pemohon 3) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pihak Terkait b. Contoh Penyusunan Keterangan Pihak Terkait	90 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 957/DK.06.00/07/2024

17 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)

Bapak H. Ahmad Ridha Sabana, S.E.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1131048203240717101617



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1220/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

15 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)

Bapak H. Ahmad Ridha Sabana, S.E.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **15 (lima belas)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Gerakan Perubahan Indonesia yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 8 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 7 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **1 (satu)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 23 September 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-405424515240731015106

Lampiran I

Nomor : 1220/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **15 (lima belas)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Gerakan Perubahan Indonesia yang terdiri dari:
 - 8 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 7 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c. DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **15 (lima belas)** orang paling lambat pada tanggal **23 September 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. ***Boarding pass***
Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
 - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
 - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
 - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
 - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
 - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
 - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
 - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
 - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. **Transport Darat/Laut**

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus **dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi**. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan kegiatan.

6. **Lain-lain**

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. **Kontak**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1220/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 7 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Selasa, 8 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 9 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 10 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1220/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
15										



Lampiran IV
Nomor : 1220/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Perubahan Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
15.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
7 s.d. 10 Oktober 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1639/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

24 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Garda Republik Indonesia

Bapak H. Ahmad Ridha Sabana, S.E.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 7 Oktober 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1726815614240924123809

Lampiran I

Nomor : 1639/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : **Senin, 7 Oktober 2024**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 7 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1728/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

02 Oktober 2024

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Mardian Wibowo**
 - 2. Ria Indriyani**
 - 3. Dian Chusnul Chatimah**
 - 4. Ananthia Ayu Devitasari**
- di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Rabu, 9 Oktober 2024	10.00 s.d. 15.00 WIB	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Kamis, 10 Oktober 2024	08.00 s.d. 10.00 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
- Panitera Muda I, II, dan III;
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-1349703692241001014957

Lampiran I

Nomor : 1728/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 02 Oktober 2024

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN

MATERI	POKOK BAHASAN	WAKTU
Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Simulasi Penyusunan Permohonan a. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon b. Identitas Lengkap Pemohon c. Uraian yang Jelas Mengenai: 1) Kewenangan Mahkamah 2) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon 3) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan 4) Pokok Permohonan Pemohon 5) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pemohon Simulasi Penyusunan Keterangan Pihak Terkait a. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait 1) Nama dan Alamat Pihak Terkait 2) Uraian yang Jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon : a) Permohonan Pemohon b) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon c) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan d) Pokok Permohonan Pemohon e) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pihak Terkait	4 x 60 menit
Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Evaluasi Penyusunan Permohonan a. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon b. Identitas Lengkap Pemohon c. Uraian yang Jelas Mengenai: 1) Kewenangan Mahkamah 2) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon 3) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan 4) Pokok Permohonan Pemohon 5) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pemohon Evaluasi Penyusunan Keterangan Pihak Terkait a. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait 1) Nama dan Alamat Pihak Terkait 2) Uraian yang Jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon : a) Permohonan Pemohon b) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon c) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan d) Pokok Permohonan Pemohon e) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pihak Terkait	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1411/DK.06.00/09/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Memberikan Ceramah
Kunci dan Membuka Acara**

04 September 2024

Kepada,
Ketua Mahkamah Konstitusi
YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024** yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. November 2024 secara *offline* (luring), bersama ini kami mohon perkenan Yang Mulia untuk memberikan ceramah kunci sekaligus membuka secara resmi kegiatan-kegiatan dimaksud, dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan I	Senin, 9 September 2024	16.30 – 18.00 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan II	Selasa, 10 September 2024	16.30 – 18.00 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi	Selasa, 17 September 2024	16.30 – 18.00 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
	Pemilihan Umum Angkatan III			
4.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV	Rabu, 18 September 2024	16.30 – 18.00 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
5.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan I	Senin, 23 September 2024	16.30 – 18.00 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
6.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II	Senin, 30 September 2024	16.30 – 18.00 WIB	
7.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III	Senin, 7 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	
8.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Selasa, 22 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	



No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat
	Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I			
9.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan II	Senin, 28 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	
10.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan III	Senin, 4 November 2024	16.30 – 18.00 WIB	
11.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan IV	Senin, 11 November 2024	16.30 – 18.00 WIB	

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-2063021294240903041520



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : \${xxxnomor} \${xxxtanggal}
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB)

Bapak Dr. Fahri Bachmid, S.H, M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti - NIP:19741118 200604 1 002

Digital Signature
mk-1131048203240718111240

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1219/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

15 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB)

Bapak Dr. Fahri Bachmid, S.H, M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **15 (lima belas)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Bulan Bintang yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 8 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 7 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **1 (satu)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 23 September 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-405424515240731015144

Lampiran I

Nomor : 1219/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **15 (lima belas)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Bulan Bintang yang terdiri dari:
 - 8 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 7 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c. DPP Partai Bulan Bintang memberikan daftar nama peserta sebanyak **15 (lima belas)** orang paling lambat pada tanggal **23 September 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. ***Boarding pass***
Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
 - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
 - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
 - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
 - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
 - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
 - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
 - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
 - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. **Transport Darat/Laut**

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus **dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi**. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan kegiatan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1219/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 7 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Selasa, 8 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 9 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 10 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1219/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
15										



Lampiran IV
Nomor : 1219/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
15.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
7 s.d. 10 Oktober 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Bulan Bintang
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1622/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

24 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB)

Bapak Dr. Fahri Bachmid, S.H, M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 7 Oktober 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1664192532240820121009

Lampiran I

Nomor : 1622/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : **Senin, 7 Oktober 2024**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 7 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1727/DK.06.00/10/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

02 Oktober 2024

Kepada Yth.,
Panitera Muda I
Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon berkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan berkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature
mk-269145229241001015100



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1407/DK.06.00/09/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Memberikan Laporan
Kegiatan dan Sambutan Acara Penutupan**

04 September 2024

Kepada,
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Bapak Heru Setiawan
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024** yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. November 2024 secara *offline* (luring), bersama ini kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan laporan dalam acara pembukaan dan menyampaikan sambutan sekaligus menutup kegiatan dimaksud, dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pembukaan	Penutupan	Tempat
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan I	Senin, 9 September 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Kamis, 12 September 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan II	Selasa, 10 September 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Kamis, 12 September 2024 Pukul 16.00 – 17.30 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi	Selasa, 17 September 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Jumat, 20 September 2024 Pukul 10.15 – 11.30 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



No.	Kegiatan	Pembukaan	Penutupan	Tempat
	Pemilihan Umum Angkatan III			
4.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV	Rabu, 18 September 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Jumat, 20 September 2024 Pukul 16.00 – 17.30 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor
5.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan I	Senin, 23 September 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Kamis, 26 September 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	Ruang Aula Grha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
6.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan II	Senin, 30 September 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Kamis, 3 Oktober 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
7.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III	Senin, 7 Oktober 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Kamis, 10 Oktober 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
8.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali	Selasa, 22 Oktober 2024	Jumat, 25 Oktober 2024	



No.	Kegiatan	Pembukaan	Penutupan	Tempat
	Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan I	Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Pukul 10.15 – 11.30 WIB	
9.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan II	Senin, 28 Oktober 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Kamis, 31 Oktober 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
10.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan III	Senin, 4 November 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Kamis, 7 November 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	
11.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan IV	Senin, 11 November 2024 Pukul 16.30 – 18.00 WIB	Kamis, 14 November 2024 Pukul 10.15 – 12.15 WIB	

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti



Digital Signature
mk2127795379240904111525



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 955/DK.06.00/07/2024

17 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Bapak Kaesang Pangarep, B.Sc.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1131048203240717101756



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1218/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

15 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Bapak Kaesang Pangarep, B.Sc.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **15 (lima belas)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Solidaritas Indonesia yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 8 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 7 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **1 (satu)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 23 September 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-405424515240731015224

Lampiran I

Nomor : 1218/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **15 (lima belas)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Solidaritas Indonesia yang terdiri dari:
 - 8 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 7 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c. DPP Partai Solidaritas Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **15 (lima belas)** orang paling lambat pada tanggal **23 September 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. ***Boarding pass***
Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
 - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
 - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
 - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
 - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
 - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
 - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
 - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
 - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. **Transport Darat/Laut**

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus **dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi**. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan kegiatan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1218/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 7 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Selasa, 8 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 9 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 10 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1218/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
15										



Lampiran IV
Nomor : 1218/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
15.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
7 s.d. 10 Oktober 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Solidaritas Indonesia
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1621/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

24 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Bapak Kaesang Pangarep, B.Sc.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 7 Oktober 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1802999698240820121025

Lampiran I

Nomor : 1621/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : **Senin, 7 Oktober 2024**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 7 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1773/DK.06.00/10/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

07 Oktober 2024

Kepada Ykh. Saudara/i:

1. **Ganggas Wibisono, S.Sos., M.Sc.**
2. **Hatika Al Shafa, S.Sos.**

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Rabu, 9 Oktober 2024	10.00 s.d. 15.00 WIB	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Kamis, 10 Oktober 2024	08.00 s.d. 10.00 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Digital Signature
mk-1198438486241007054556



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 954/DK.06.00/07/2024

17 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Perindo

Bapak Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo, B.Com., M.B.A.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-2056117187240717113415



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1217/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

15 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Perindo

Ibu Angela Herliani Tanoesoedibjo, B.A., M.Com.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ibu untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **15 (lima belas)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Perindo yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 8 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 7 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Ibu untuk menunjuk **1 (satu)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 23 September 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk278090074240801085450

Lampiran I

Nomor : 1217/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **15 (lima belas)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Perindo yang terdiri dari:
 - 8 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 7 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c. DPP Partai Perindo memberikan daftar nama peserta sebanyak **15 (lima belas)** orang paling lambat pada tanggal **23 September 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. ***Boarding pass***
Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
 - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
 - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
 - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
 - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
 - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
 - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
 - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
 - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. **Transport Darat/Laut**

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus **dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi**. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan kegiatan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1217/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 7 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Selasa, 8 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 9 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 10 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1217/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
15										



Lampiran IV
Nomor : 1217/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Perindo menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
15.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
7 s.d. 10 Oktober 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Perindo
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1619/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

24 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Perindo

Ibu Angela Herliani Tanoesoedibjo, B.A., M.Com.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Ibu untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 7 Oktober 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
[mk-895326499240820121039](#)

Lampiran I

Nomor : 1619/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : **Senin, 7 Oktober 2024**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 7 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 953/DK.06.00/07/2024

17 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Plt. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Bapak H. Muhamad Mardiono

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1131048203240717101948



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1216/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

15 Agustus 2024

Kepada Yth.

Plt. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Bapak H. Muhamad Mardiono

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **15 (lima belas)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Persatuan Pembangunan yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 8 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 7 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **1 (satu)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 23 September 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-405424515240731015349

Lampiran I

Nomor : 1216/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **15 (lima belas)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Persatuan Pembangunan yang terdiri dari:
 - 8 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 7 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c. DPP Partai Persatuan Pembangunan memberikan daftar nama peserta sebanyak **15 (lima belas)** orang paling lambat pada tanggal **23 September 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. ***Boarding pass***
Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
 - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
 - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
 - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
 - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
 - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
 - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
 - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
 - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. **Transport Darat/Laut**

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus **dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi**. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan kegiatan.

6. **Lain-lain**

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. **Kontak**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1216/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 7 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Selasa, 8 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 9 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 10 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1216/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
15										



Lampiran IV
Nomor : 1216/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
15.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
7 s.d. 10 Oktober 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Persatuan Pembangunan
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1618/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

24 September 2024

Kepada Yth.

Plt. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Bapak H. Muhamad Mardiono

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 7 Oktober 2024

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk967934350240820121053

Lampiran I

Nomor : 1618/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : **Senin, 7 Oktober 2024**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 7 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 952/DK.06.00/07/2024

17 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Adil Sejahtera Aceh
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-2024992373240717113317



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1215/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

15 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Adil Sejahtera Aceh

Bapak Tgk. H. Bulqaini, S.Sos.I.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **5 (lima)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Adil Sejahtera Aceh yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 23 September 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-405424515240731015436

Lampiran I

Nomor : 1215/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak 5 (**lima**) orang pengurus dan/atau anggota Partai Adil Sejahtera Aceh.
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c. DPP Partai Adil Sejahtera Aceh memberikan daftar nama peserta sebanyak 5 (**lima**) orang paling lambat pada tanggal **23 September 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar



- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. ***Boarding pass***
Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
 - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
 - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
 - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
 - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
 - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
 - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
 - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
 - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. Transport Darat/Laut

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus **dilampirkan**



bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan kegiatan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1215/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 7 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Selasa, 8 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 9 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 10 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1215/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/ DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										



Lampiran IV
Nomor : 1215/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Adil Sejahtera Aceh menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
7 s.d. 10 Oktober 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Adil Sejahtera Aceh
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1617/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

24 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Adil Sejahtera Aceh

Bapak Tgk. H. Bulqaini, S.Sos.I.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 7 Oktober 2024
Waktu : 16.30 – 18.00 WIB
Tempat : Melalui Aplikasi Zoom Meeting
(Link akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
[mk1977556273240820121105](#)

Lampiran I

Nomor : 1617/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : **Senin, 7 Oktober 2024**

Tempat : Melalui Aplikasi Zoom Meeting

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 7 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 951/DK.06.00/07/2024

17 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-627434380240717102226



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1214/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

15 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA)

Bapak Muslim Syamsuddin, ST., MAP.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah 5 (**lima**) orang pengurus dan/atau anggota Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 23 September 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-405424515240731015520

Lampiran I

Nomor : 1214/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **5 (lima)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh.
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c. DPP Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh memberikan daftar nama peserta sebanyak **5 (lima)** orang paling lambat pada tanggal **23 September 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar



- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. ***Boarding pass***
Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
 - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
 - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
 - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
 - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
 - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
 - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
 - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
 - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.
- f. **Transport Darat/Laut**
 - 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus **dilampirkan**



bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan kegiatan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1214/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 7 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Selasa, 8 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 9 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 10 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1214/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										



Lampiran IV
Nomor : 1214/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
7 s.d. 10 Oktober 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1616/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

24 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA)

Bapak Muslim Syamsuddin, ST., MAP.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 7 Oktober 2024
Waktu : 16.30 – 18.00 WIB
Tempat : Melalui Aplikasi Zoom Meeting
(Link akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
[mk671617230240820121117](#)

Lampiran I

Nomor : 1616/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : **Senin, 7 Oktober 2024**

Tempat : Melalui Aplikasi Zoom Meeting

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 7 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 950/DK.06.00/07/2024

17 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Ummat

Bapak Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1131048203240717102329



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1213/DK.06.00/08/2024
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

15 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Ummat

Bapak Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **15 (lima belas)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Ummat yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 8 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 7 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **1 (satu)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 23 September 2024**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-405424515240731015605

Lampiran I

Nomor : 1213/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **15 (lima belas)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Ummat yang terdiri dari:
 - 8 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 7 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- c. DPP Partai Ummat memberikan daftar nama peserta sebanyak **15 (lima belas)** orang paling lambat pada tanggal **23 September 2024**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.
- d. ***Boarding pass***
Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.
- e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**
 - 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
 - 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
 - 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
 - 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
 - 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
 - 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
 - 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
 - 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. **Transport Darat/Laut**

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus **dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi**. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan kegiatan.

6. **Lain-lain**

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. **Kontak**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1213/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 7 Oktober 2024	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik



		2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEDUA				
Selasa, 8 Oktober 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 9 Oktober 2024	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik



	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 10 Oktober 2024	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHP Kepala Daerah	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt. Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1213/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 15 Agustus 2024

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua	Jl. Konstitusi, Bogor, Jawa Barat	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
15										



Lampiran IV
Nomor : 1213/DK.06.00/08/2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Ummat menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
15.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
7 s.d. 10 Oktober 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Ummat
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1615/DK.06.00/09/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Menghadiri Pembukaan**

24 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Ummat
Bapak Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan pada:

Hari, tanggal : Senin, 7 Oktober 2024
Waktu : 16.30 – 18.00 WIB
Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk324466423240820121128

Lampiran I

Nomor : 1615/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

Jadwal Kegiatan

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III

Hari, Tanggal : **Senin, 7 Oktober 2024**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Tim Hukum Partai Politik

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 7 Oktober 2024	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal MK 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 981/DK.06.00/07/2024

18 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Daerah

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB)

Bapak Dr. Fahmi Bachmid, S.H, M.H.

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1131048203240718111240



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 998/DK.06.00/07/2024
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : **Undangan Rapat**

19 Juli 2024

Kepada Yth.

Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
(Nama Terlampir)
di Tempat

Dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menghadiri rapat pembahasan rencana kegiatan dengan target grup pada:

Hari, tanggal : Hari dan tanggal pada jadwal terlampir
Waktu : Waktu pada jadwal terlampir
Tempat : Luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi/ Daring di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (link rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti

Tembusan Yth.:

Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk331110044240718035631

Lampiran I

Nomor : 998/DK.06.00/07/2024

Tanggal : 19 Juli 2024

Daftar Peserta Rapat

1. Nanang Subekti
2. Budi Hari Wibowo
3. Ardiansyah Salim
4. Bambang Sukmadi
5. Hadian Taofik Rochman
6. Santhy Kustrihardiani
7. Nanda Adytiansyah
8. Andy Fahri
9. Angga Putri Gardina
10. Chafid Sugianto
11. Edwin Aditya Irawan
12. Edwin Rivano
13. Muhlis Nova
14. Suhardi
15. Yahya Amarullah Taufik



Lampiran II

Nomor : 998/DK.06.00/07/2024

Tanggal : 19 Juli 2024

Jadwal Rapat Koordinasi Bimtek PHP Kepala Daerah dengan Target Grup

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Peserta Rapat Eksternal
1	Senin, 22 Juli 2024	09.00 - 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi KPU dan Bawaslu	1. KPU 2. Bawaslu
2		13.30 - 15.30 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Wartawan dan Akademisi	1. Achmad Dodi Haryadi (Kasubbag Humas) 2. FH IKA UNAND
3	Selasa, 23 Juli 2024	09.00 - 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik Angkatan I	1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 4. Partai Golongan Karya (Golkar) 5. Partai Nanggroe Aceh (PNA) 6. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (Gabthat)
4		13.30 - 15.30 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik Angkatan II	1. Partai Nasdem 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3. Partai Amanat Nasional (PAN) 4. Partai Demokrat 5. Partai Darul Aceh 6. Partai Aceh



No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Peserta Rapat Eksternal
5	Rabu, 24 Juli 2024	09.00 - 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik Angkatan III	1. Partai Buruh 2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) 3. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 5. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) 6. Partai Bulan Bintang (PBB) 7. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 8. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 10. Partai Adil Sejahtera Aceh 11. Partai Soliditas Independen Rakyat Indonesia 12. Partai Ummat
6		13.30 - 15.30 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Advokat Angkatan I	1. Peradi Otto 2. Perhakhi 3. Peradin 4. DPN Ind
7	Senin, 29 Juli 2024	09.00 - 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Advokat Angkatan II	1. KAI SJL 2. Ferari 3. Peradan 4. Peradi Luhut
8		13.30 - 15.30 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Advokat Angkatan III	1. KAI TSH 2. Peradi Juniver 3. IKADIN 4. DPP ABI
9	Selasa, 30 Juli 2024	09.00 - 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Advokat Angkatan IV	1. Pengacara MK 2. FPK 3. IPHI 4. Serikat Pengacara Indonesia 5. BPP PAI 6. KAI Erman
10		13.30 - 15.30 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Bawaslu Jawa Tengah	1. Bawaslu Jawa Tengah





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1741/DK.06.00/10/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan Rapat**

04 Oktober 2024

Kepada Yth.

Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
(Nama Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka evaluasi dan persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan III serta persiapan agenda terdekat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat koordinasi dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 7 Oktober 2024
Tempat : Ruang Vicon, Grha Konstitusi 2
Waktu : Pukul 08.30 WIB - selesai
Agenda :
1. Evaluasi Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan II
2. Persiapan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan III

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti



Digital Signature
mk-1025656381241004013905

Lampiran Surat

Nomor : 1741/DK.06.00/10/2024

Tanggal : 04 Oktober 2024

Daftar Peserta Rapat

1. Nanang Subekti
2. Mundiri
3. Budi Hari Wibowo
4. Santhy Kustrihardiani
5. Mastiur Afrilidiany Pasaribu
6. Nanda Adityansyah
7. Ardiansyah Salim
8. Bambang Sukmadi
9. Hadian Taofik Rochman
10. Santi Widiastuti
11. Medi Kurniadi
12. Muhlis Nova
13. Yahya Amarullah Taufik
14. Chafid Sugianto
15. Edwin Rivano
16. Suhardi
17. Angga Putri Gardina
18. Edwin Aditya Irawan
19. Andy Fahri





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

Nomor 626/ST.SPD/2000/10/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konsitusi menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 7 Oktober 2024

a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Inspektur.



Digital Signature
mk-749659764241008070551

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 626/ST.SPD/2000/10/2024

Tanggal : 7 Oktober 2024

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024 BAGI
PARTAI POLITIK ANGKATAN III**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1.	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	7 Oktober 2024
2.	Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Narasumber	7 Oktober 2024
3.	Ida Ria Tambunan	Narasumber	8 Oktober 2024
4.	Triyono Edy Budhiarto	Narasumber	10 Oktober 2024
5.	Pan Mohamad Faiz Kusuma W.	Narasumber	8 Oktober 2024
6.	Syukri Asy'ari	Narasumber	9 Oktober 2024
7.	Mardian Wibowo	Narasumber	9 dan 10 Oktober 2024
8.	Abdul Ghoffar	Narasumber	9 dan 10 Oktober 2024
9.	Luthfi Widagdo Eddyono	Narasumber	9 dan 10 Oktober 2024
10.	Ananthia Ayu Devitasari	Narasumber	9 dan 10 Oktober 2024
11.	Nanda Adytiansyah	Narasumber	8 Oktober 2024
12.	Rudi Kurniawan	Narasumber	8 Oktober 2024



SURAT TUGAS

Nomor: 191/ORG/EXCO-P/X/2024

**EXECUTIVE COMMITTEE - KOMITE EKSEKUTIF
PARTAI BURUH**

MENUGASKAN,

1. SAID SALAHUDIN, S.H.,M.H	EXCO PUSAT
2. MARLAN IFANTRI LASE, S.IP., M.IP	EXCO PUSAT
3. AGUS SARJANTO, S.HH	EXCO PUSAT
4. SAIPUL ANWAR, S.H	EXCO PUSAT
5. SUCIPTO, S.H., M.H	EXCO PUSAT
6. PANDJI BUDI SANTOSA, S.H	EXCO JAWA BARAT
7. HIDAYAH, S.H.	EXCO JAWA BARAT
8. WAWAFTAHNI, S.H	EXCO BANTEN
9. RASTINGKEM, S.H	EXCO JAWA BARAT
10. AGUS SUPRIYANTO, S.H.	EXCO JAWA TIMUR
11. JHONAL PRAYOHO, S.SOS., M.H	EXCO SULAWESI TENGGARA
12. L.LIFKOI VANTAR, S.H., M.HUM	EXCO KALIMANTAN BARAT
13. YUICE SINTA ENJELITA	EXCO NUSA TENGGARA TIMUR
14. YOHANIS LARITMAS, S.H.,M.H	EXCO MALUKU
15. MUHAMAD HAFIS SARAGIH, S.H	EXCO SUMATERA UTARA

UNTUK,

Menghadiri kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024** bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 07 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat
Demikian surat tugas ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03 Oktober 2024

KOMITE EKSEKUTIF
[EXECUTIVE COMMITTEE – EXCO]
PARTAI BURUH



IR. H. SAID IQBAL, M.E.
Presiden



FERRI NUZARLI, S.E., S.H.
Sekretaris Jenderal



**DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA**

**SURAT TUGAS
NOMOR: 095/TGS/DPN-GLR/X/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mahfuz Sidik**

Jabatan : **Sekretaris Jenderal**

Dengan ini memberikan tugas sebagai Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat kepada nama-nama Fungsionaris Partai Gelora berikut ini:

NO	NAMA	JABATAN
1	Slamet, S.H.	Sekretaris Mahkamah Partai
2	Dr. Junef Ismailiyanto	Wasekjen DPN
3	Amin Fahrudin, SH. MH	Kabid Hukum DPN
4	Ahmad Hafiz, S.H	Ketua LBH DPN
5	Saiful Bahri, M.Ap	Biro Adm Kesekjenan, DPN
6	La Ode Muhammad Nikmat Z. SE, M.Si	Fungsionaris BangTer V DPN
7	Ratno Timur, S.H	Anggota LBH DPN
8	Yasen, S.H.	Bidang Hukum DPW Banten
9	Syaiful Arifin, S.H.	Sekretaris DPW Sumatera Utara
10	Misbakhul Munir, S.Pd, M.M	Sekretaris DPW Jawa Timur
11	Ahmad Yani, S.H	Tim Hukum DPW Kalimantan Timur
12	Muhammad Isnaini, S.H.	Tim Hukum DPW Nusa Tenggara Barat
13	Saiful Aziz, S.Sos	Bidang Pengembangan Teritorial DPN
14	Zuhria Rauf, S.H.	Kabid Hukum DPW Gorontalo
15	Dr. Ariyanto, S.H., M.H.	Anggota Bid.Hukum DPW Papua

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 Oktober 2024
Dewan Pimpinan Nasional
Partai Gelora Indonesia



**DEWAN PIMPINAN NASIONAL
GELORA
INDONESIA**


Mahfuz Sidik

Sekretaris Jenderal



SURAT TUGAS

Nomor : 026/ST/PIMNAS-PKN/X/2024

Bersamaan dengan surat ini, Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (Pimnas PKN) menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Tugas ini untuk mewakili Partai Kebangkitan Nusantara berdasarkan surat undangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor: 1222/DK.06.00/08/2024 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin s.d Kamis, 07 s.d 10 Oktober 2024.
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan setelah selesai mengikuti kegiatan agar menyampaikan laporan secara tertulis.

Jakarta, 01 Oktober 2024

**PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA**

KETUA UMUM  **ANAS URBANINGRUM**

SEKRETARIS JENDERAL  **SRI MULYONO**


PIMPINAN NASIONAL

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

No	Nama + Gelar	Asal DPP/DPW Prov.	Alamat Domisili
1	Tabroni Bin M. Cahya, SH	Ketua LBH Prov. Papua Tengah	L. WORKSHOP DPU RT.008/RW.002 KELURAHAN WONOREJO, NABIRE, PAPUA TENGAH 98813
2	Sudharmono K. Lewa Yusuf, SH.	Anggota LBH Pimnas PKN	Kp rawa kalong Rt/Rw. 03/05, kel. Karang satria, kec. Tambun utara, bekasi, jawa barat.
3	Un Latuamury, SH	Anggota LBH Pimnas PKN	Margonda/Depok, Jawa Barat
4	Wahyudi, SH, MH	Anggota LBH Pimnas PKN	grya Tanah Baru kav. 3 Tanah Baru Depok
5	Andi Syamsul Bahri, S.H	Anggota LBH Pimnas PKN	Jln Ki Mangunsarkoro No.16A Menteng Jakarta Pusat
6	Fi'ili Latuamury, S.H	Anggota LBH Pimnas PKN	Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
7	Galang Rezky Perdana, SH	Anggota LBH Pimnas PKN	Jl. Brigjen M. Joenoes Lr. 10 November RT. 037/008, Bende, Kadia, Kendari
8	Eka Rahmawati, SH, MH	Anggota LBH Pimnas PKN	Jl. Majapahit 3 No. 233 Kel.Mekarjaya Kec.Sukmajaya Kota Depok
9	I Wayan Supadiyasa, S.Sos., S.H.,M.Si	Ketua LBH Prov. Sulawesi Tengah	Palu Sulawesi Tengah
10	Moin Tualeka, SH	Sekretaris LBH Pimnas PKN	Ambon
11	Remsy M Nuniary, SH	Ketua LBH Prov. Maluku	Jl. Skip Atas, RT 001/RW 01,Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
12	Hayani Imbu, S.Sos	Sekretaris Pimda Prov. Sulawesi Tenggara	Jl. Brigjen M. Joenoes Lr. 10 November RT. 037/008, Bende, Kadia, Kendari
13	I Nyoman Widayana Rahayu, SH	Anggota LBH Pimnas PKN	Br. Batan Tanjung Cemagi, Mengwi, Badung
14	I Putu Budi Astika, SH	Anggota LBH Pimnas PKN	Jl. Narakusuma Gang 1 No. 1.
15	Putu Aditya Darmeindra, SH	Anggota LBH Pimnas PKN	Jalan Gunung Welirang GG II Nomor. 2, Denpasar
16	Billey Cheguev Abualech K Kogoya, SH	Ketua LBH Prov. Papua Pegunungan	Yimribaga Lanny jaya Papua Pegunungan



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

SURAT TUGAS

Nomor : SGAS/059/DPP-HANURA/IX/2024

Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) menugaskan kepada yang namanya dicantumkan dalam Surat Tugas ini :

No	Nama	Jabatan
1.	Rudy Imanuel, S.H., M.H	Ketua LBH Partai HANURA
2.	Dirzy Zidan, S.H. M.H	Bidang Hukum DPP Partai HANURA
3.	Delinar, S.I.Kom	Staff Bidang Organisasi
4.	Firman Hasurungan S, S.H., M.H	LBH PARTAI HANURA
5.	Harry J. Hasman, S.H	LBH PARTAI HANURA
6.	Ujang Priyatna, S.H	LBH PARTAI HANURA
7.	Nurul Fajris S.Sos., S.H., M.H	LBH PARTAI HANURA
8.	Rocky Prawira Pasaeno, S.H., M.H	LBH PARTAI HANURA
9.	Budi Susilo, S.H., M.H	Sekretaris DPD Partai HANURA Provinsi Jawa Tengah
10.	Nasrudin, S.H	Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai HANURA Provinsi Banten
11.	Muhamad Haikal Yusfendri, S.H., M.H	Wakil Sekretaris DPD Partai HANURA Provinsi Jawa Barat
12.	Stefen Alves Mau, S.H	Bidang Hukum DPC Kabupaten Belu Provinsi NTT
13.	Tiopan Tarigan, SH., M.H	LBH DPD Partai HANURA Provinsi Sumatera Utara
14.	Lestari Manurung, S.H	Bendahara DPD Partai HANURA Provinsi DKI Jakarta
15.	Yeniwyat Silviyany Ataupah, S.H	Bidang Hukum DPC Kabupaten Belu Provinsi NTT

Untuk menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin-Kamis, 7-10 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor-Jawa Barat

Demikian surat ini dibuat untuk dilaksanakan. Pelaksanaan penugasan ini. dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA.

Jakarta, 25 September 2024

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

Wakil Ketua Umum

Sekretaris Jenderal


H. HERRY LONTUNG SIREGAR


BENNY RHAMDANI



Tembusan :

1. Yth. Ketua Umum DPP Partai HANURA sebagai Laporan
2. Arsip



SURAT TUGAS

Nomor:005/SM/DPP/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Plt.Sekretaris Jenderal Partai Garda Republik Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III sebagai berikut:

No	Nama + Gelar	Jabatan	Asal DPP/DPD Prov.
1	Dr. Ir Jeffry Yuliyanto Waisapy., ST., SH., MM., M.Eng., PHd., DBA	Wakil Ketua DPP	DPP Partai Garuda
2	Achmad Eri Prayoga., S.H.	Anggota	DPP Partai Garuda
3	Dhian Priyan Raga., S.Pd.	Anggota	DPP Partai Garuda
4	Galih Setya Putra Dewantara	Anggota	DPP Partai Garuda
5	Annisa Amelia Putri	Anggota	DPP Partai Garuda
6	Astri Maulania Sasti., S.M.	Anggota	DPP Partai Garuda
7	Rusyaima Farha Salsabila., S.M.	Anggota	DPP Partai Garuda
8	Dwi Sukwanto	Anggota	DPP Partai Garuda
9	Zebulon T. Yohame. S.T.	Sekretaris DPD	DPD Papua Pegunungan
10	Johni Boyke Makal	Ketua DPD	DPD Papua Selatan
11	Alfian Arongger., S.H.	Anggota	DPD Papua
12	Esau Boma	Anggota	DPD Papua Tengah
13	Andi Alvin Woof	Sekretaris DPD	DPD Papua Barat
14	Yohanes Kossay	Sekretaris DPD	DPD Papua Barat Daya
15	George Leonard Meijners	Anggota	DPD Papua

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
7 s.d. 10 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GARUDA



Hsian Jauhari, SE., M. Si
Plt. Sekretaris Jenderal



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79120734, 79180765, Email: dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

PBB

SURAT TUGAS

Nomor: AT.432/DPP/Sek/IX/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Jenderal **Ir. H. Muhammad Masduki, S.H., M.H.**, Partai Bulan Bintang menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1	Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si (Han)	Ketua Umum LABH Bulan Bintang	DPP, Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No. 18 Jakarta Selatan
2	Okta Heriawan, S.H., M.H.	Bendahara Umum LABH Bulan Bintang	DPP, Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No. 18 Jakarta Selatan
3	M. Irfan Alghifari, S.H.	Kadiv Riset dan Program LABH Bulan Bintang	DPP, Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No. 18 Jakarta Selatan
4	Asriyadi Tanama, S.H.	Kadiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa LABH Bulan Bintang	DPP, Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No. 18 Jakarta Selatan
5	Anang Yuliardi, S.H.	Mahkamah Partai	DPP, Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No. 18 Jakarta Selatan
6	Ahmad Hatim, S.H.	Anggota LABH Bulan Bintang	DPP, Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No. 18 Jakarta Selatan
7	Lisa Nur Azizah, S.H.	Anggota LABH Bulan Bintang	DPP, Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No. 18 Jakarta Selatan
8	Dela Khoirunisa, S.H., M.H.	Anggota LABH Bulan Bintang	DPP, Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No. 18 Jakarta Selatan
9	Hamili, S.P	Ketua DPC PBB Kota Kendari	DPW Sulawesi Tenggara, Bende, Kadia, Kota Kendari
10	Dr. Hamjah, M.Pd	Wakil Sekretaris DPW PBB NTB	DPW NTB, Jl. Lingkar Selatan No. 10, Dasan Cermen, Sandubaya, Kota Mataram
11	Yudi Hardiansyah, S.H.	Ketua LABH Bulan Bintang Jawa Timur	DPW Jawa Timur, Jl. Pagesangan Baru IV No. 5, Jambangan, Surabaya

		Jawa Timur	Surabaya
12	Haris Kudianto, S.E.	Wakil Bendahara DPW Jawa Timur	DPW Jawa Timur, Jl. Pagesangan Baru IV No. 5, Jambangan, Surabaya
13	Zulkarnain Muslim Asrialdo, S.H.I	Ketua DPW Papua	DPW Papua, Jl. Youtefa Gang Dahlia Abepura, RT 002, RW. 002, Kelurahan Yobe
14	Dal Jahra, S.Mat	Admin/Legal Officer	DPW Papua, Jl. Youtefa Gang Dahlia Abepura, RT 002, RW. 002, Kelurahan Yobe
15	Raina Salsabilla Erlizal, S.H.	PAC Bekasi Selatan DPC Bekasi	DPP Jawa Barat, Jl. Pungkur No. 151, Kelurahan Balonggede

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua,
Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami, 

DPP Partai Bulan Bintang

Sekretaris Jenderal



Ir. H. Mohammad Masduki, S.H., M.H.



SURAT TUGAS
Nomor: 237/TUGAS/DPP/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia menugaskan nama-nama yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW [Alamat Lengkap DPP/DPW]
1.	Nasrullah S.H.	LBH PSI	DPP PSI, Jl. K.H. Wahid Hasyim 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
2.	Kamaruddin, S.H., M.H.	LBH PSI	s.d.a
3.	A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H.	LBH PSI	s.d.a
4.	Octo Arystho Emerson, S.H. CIRP	LBH PSI	s.d.a
5.	Denny Alan Pakiding, S.H.	LBH PSI	s.d.a
6.	Aditya Linardo, S.H.	LBH PSI	s.d.a
7.	Francine Widjojo, S.H., M.H.	Juru Bicara	s.d.a
8.	Heriyanto, S.H.	LBH PSI	s.d.a
9.	Ranto Sibarani, S.H.	Wakil Ketua Bidang Hukum	DPW PSI Prov. Sumatera Utara (Grand Pavilion Nomor 7, Jl. Melati Raya, Kel. Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan.)
10.	Ikbal, S.H.	Divisi Hukum dan Advokasi DPW PSI Sulteng	DPW PSI Sulawesi Tengah (Jl. Maleo No. 83, Kel. Lasoani, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah.)
11.	Ramon Franky, S.H.	Biro Advokasi	DPW PSI Kepulauan Riau (Taman Cipta Asri 2 Blok Cemara Nomor 82, Batam.)

DEWAN PIMPINAN PUSAT

📍 Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250
☎ +62 21 39 222 13 📠 +62 21 31907814
✉ sekretariat@psi.id





12.	Bangkit Mahanantiyo S.H., M.H.	Ketua DPD	DPD Kota Semarang (Jl. Karonsih Utara 05/03 Kec. Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah.)
13.	Donny Victorius, S.E., S.H., M.H	Divisi Hukum	DPW PSI Jawa Timur (Jl. Simpang Grajakan Blom 1/5, Kec. Blimbing, Kota Malang)
14.	Lourensius Milla Dadi, S.Sos	Wakil Ketua DPW	DPW PSI NTT (Dusun 2, Desa Kandaghu Tana, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.)
15.	Agustinus Bangun, S.H., M.H.	Bendahara DPD	DPD PSI Kota Makassar (Jl. Samalona Timur 55 Tanjung Bunga Makassar)

Hari, Tanggal : Senin, s.d. Kamis
7 s.d. 10 Oktober 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 3 Oktober 2024
Dewan Pimpinan Pusat
Partai Solidaritas Indonesia


Raja Juli Antoni
Sekretaris Jenderal DPP PSI



DEWAN PIMPINAN PUSAT

📍 Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250
☎ +62 21 39 222 13 📠 +62 21 31907814
✉ sekretariat@psi.id



SURAT TUGAS

Nomor: 163-i/ST/DPP-PARTAI PERINDO/IX/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal (DPP/DPW)
1.	Agus Kristanto Djajusman	Tim Hukum DPP	DPP
2.	Jimmi Yansen, S.H., M.H.	Tim Hukum DPP	DPP
3.	Salman Alfarisi Simanjuntak, S.H., M.H.	Tim Hukum DPP	DPP
4.	Muhamad Iqbal L. Nazim, S.H.	Tim Hukum DPP	DPP
5.	Mashuri Nasution, S.H.	Tim Hukum DPP	DPP
6.	Osvaldo Gautama Putra, S.H.	Tim Hukum DPP	DPP
7.	Rimhot Turnip, S.Hut	Wakil Ketua DPW	DPW DK Jakarta
8.	Tanit Prayitno, S.H.	Sekretaris DPW	DPW Kalimantan Tengah
9.	Lukman Matutu, S.H.	Ketua DPD Kota Tual	DPD Kota Tual, Maluku
10.	Ahmad Yani Alhaddad, S.H.	Wakil Ketua DPW	DPW Maluku Utara
11.	Hendro Purba, S.H.	Wakil Ketua DPW Bara Perindo	DPW NTB
12.	Gerson Tanuap, S.H.	Wakil Ketua DPW	DPW NTT
13.	Markus Souissa, S.H.	Anggota Dewan Penasehat	DPW Papua Barat Daya
14.	Victor Nero Ratumbanua, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPW	DPW Sulawesi Utara
15.	Ramli Tambunan, S.H., M.H	Ketua DPW LBH Perindo	DPW Sumatera Utara

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 25 September 2024

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)

Ketua Bidang Hukum dan HAM,

Sekretaris Jenderal,


Tama Satrya Langkun




**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONESIA**

Ahmad Rofiq



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
(Central Board of United Development Party)

SURAT TUGAS

Nomor : 3933/TG/DPP/IX/2024

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan memberikan tugas kepada:

1. Nama : **H. Andi Surya Wijaya, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Bidang Hukum PH DPP PPP
2. Nama : **Erfandi, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua LABH DPP PPP
3. Nama : **Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H.**
Jabatan : Sekretaris LABH DPP PPP
4. Nama : **Akhmad Leksono, S.H.**
Jabatan : Anggota LABH DPP PPP
5. Nama : **Bakas Manyata, S.H., M.Kn.**
Jabatan : Anggota LABH DPP PPP
6. Nama : **Muallim Bahar, S.H.**
Jabatan : Anggota LABH DPP PPP
7. Nama : **Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H.**
Jabatan : Anggota LABH DPP PPP
8. Nama : **Memed Adiwinata, S.H.**
Jabatan : Anggota LABH DPP PPP
9. Nama : **Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H.**
Jabatan : Anggota LABH DPP PPP
10. Nama : **Adi Syahrudin Jamaludin, S.H.**
Jabatan : Staf LABH DPP PPP
11. Nama : **Muhammad Naryoko**
Jabatan : Utusan DPW PPP Jawa Tengah
12. Nama : **Ir. Rachmad Taufik Hidayat**
Jabatan : Utusan DPW PPP Jawa Timur

13. Nama.....



13. Nama : **Gugun Kurniawan**
Jabatan : Utusan DPW PPP Jawa Barat
14. Nama : **Dr. Muhamad Yusuf, S.H., M.H.**
Jabatan : Utusan DPW PPP Papua
15. Nama : **Sukmawaty Amrullah, S.H.**
Jabatan : Utusan DPW PPP Papua Pegunungan

Untuk menghadiri acara **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024** bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III yang diselenggarakan pada tanggal 7 s.d 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Rabiul Awal, 1446 H
30 September, 2024 M



Sekretaris Jenderal,

Moh. Arwani Thomafi
3171.01.21111975.01.001



PARTAI UMMAT

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI UMMAT

Jalan Tebet Timur Dalam Raya No.63, RT.011 RW.007, Tebet, Jakarta Selatan
Telepon: 021-83788748, Email: sekretariat@partaiummat.id

www.partaiummat.id

SURAT TUGAS

Nomor : 539.A/Partai Ummat/KU-SJ/IX/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Teriring salam, semoga Allah SWT mencurahkan segala rahmat dan hidayah kepada kita dalam menjalankan tugas dan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Sehubungan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 s.d. 10 Oktober 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Dengan ini, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Ummat menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta :

No.	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap)
1.	Dr. Herman Kadir, S.H., M.Hum.	Mahkamah Partai	DPP Partai Ummat
2.	Muhammad Yuntri, S.H., M.H.	Ketua DPP	DPP Partai Ummat
3.	Dwi Tjahyo Soewarsono	Wasekjen DPP	DPP Partai Ummat
4.	Setio Pambudi, S.T.	Tim Pilkada Pusat	DPP Partai Ummat
5.	Dewani Nanziah Dalimunte	Tim Pilkada Pusat	DPP Partai Ummat
6.	Dian Rahmawati	Tim Pilkada Pusat	DPP Partai Ummat
7.	Muhammad Arif Fadhlurrahman	Anggota Partai Ummat	DPP Partai Ummat
8.	Muhammad Romzul Islam, S.H.	Wakil Ketua DPW	DPW Jawa Timur
9.	Imam Wahyudi, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPW	DPW Jawa Timur
10.	Mgs Abdul Roni.S.Ip.	Wakil Ketua DPW	DPW Jawa Barat
11.	Duli Rajendra Yudadi	Wakil Ketua DPW	DPW Jawa Barat
12.	Triprasodjo Setyotomo, S.T.	Wakil Ketua DPW	DPW Jawa Tengah



PARTAI UMMAT

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI UMMAT

Jalan Tebet Timur Dalam Raya No.63, RT.011 RW.007, Tebet, Jakarta Selatan

Telepon: 021-83788748, Email: sekretariat@partaiummata.id

www.partaiaummat.id

13.	Faizzan Ardhi Mutaqobb	Wakil Ketua DPW	DPW Jawa Tengah
14.	Amelia Suhaili, SH., MH., CPHM., CPArb.	Wakil Ketua DPW	DPW Banten
15.	Mastika S	Wakil Bend. DPW	DPW Banten

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
7 s.d. 10 Oktober 2024

Tempat : Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

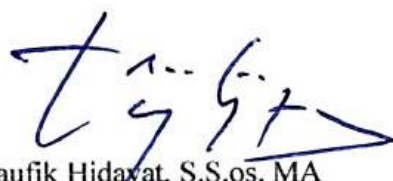
Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, 26 September 2024

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI UMMAT


Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc.
KETUA UMUM


DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI UMMAT


Taufik Hidayat, S.S.os. MA
SEKRETARIS JENDERAL



**MAJELIS PIMPINAN PUSAT
PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH (PAS ACEH)**

Jl. Unmuha 94, Batoh, Lueng Data, Kota Banda Aceh, Kode Pos. 23245
Tlp: 081296798619, Email: mpppasaceh@gmail.com website: pas-aceh.org

Banda Aceh, 23 September 2024

SURAT TUGAS

Nomor: 69/ST/MPP-PAS ACEH/XI/2024

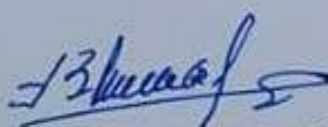
Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Umum/sekretaris Jenderal Partai Adil Sejahtera Aceh menugaskan kepada yang tesebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal MPP/MPW
1	Boihaqqi	Wakil Ketua	MPP
2	Sayed Nazar, S.Th.I	Wakil Ketua	MPP
3	Muhammad Hafidhi	Wakil Sekretaris	MPP
4	Intan Irdawani	Bidang Hukum	MPP
5	Agus Dian Purnama	Wakil Ketua	MPW Aceh Timur

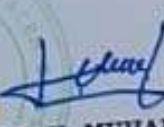
Hari, Tanggal : Senin s.d Kamis
7 S.d 10 Oktober 2024
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**MAJELIS PIMPINAN PUSAT
PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH (PAS ACEH)**


TGK. H. TU BULQAINI TANJONGAN
KETUA UMUM




TGK. H. MUHAMMAD ZIKRI S.SOS
SEKRETARIS JENDERAL



DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) **PARTAI SIRA**

(SOLIDITAS INDEPENDEN RAKYAT ACEH)

Jl. T. Nyak Arief No. 266 dan 268 Lamgugob Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh 23115
Email: dpppartaisira17@gmail.com, Website: www.partaisira.org

SURAT TUGAS

Nomor : 03/TGS/DPP/VII/2024

Dewan Pimpinan Pusat Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh), dengan ini menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 bagi Tim Hukum Partai Politik Angkatan III sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Muslim Syamsuddin, ST.,MAP	Ketua Umum DPP	Banda Aceh
2	Muhammad Daud, SKM.,M.Si	Sekretaris Jenderal DPP	Banda Aceh
3	M. Herizal	Ketua III DPP	Banda Aceh
4	ZulHelmi	Wakil Sekjend DPP	Banda Aceh
5	Rizanur	Kepala PPID DPP	Banda Aceh

Hari/Tanggal : Senin s.d. Kamis
7 s.d 10 Oktober 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak Km. 83, Cisarua, Bogor

Demikianlah Surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Terima Kasih.

Banda Aceh : 24 September 2024 M
20 Rabiulawal 1446 H

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI SIRA
(SOLIDITAS INDEPENDEN RAKYAT ACEH)


f MUSLIM SYAMSUDDIN, ST., MAP
Ketua Umum



MUHAMMAD DAUD, SKM., M.Si
Sekretaris Jenderal

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Bakas Manyata	07-10-2024 14:33:58 WIB
	Muallim Bahar	07-10-2024 14:34:36 WIB
	Eka Rahmawati	07-10-2024 14:44:14 WIB
	Ahmad Yani	07-10-2024 14:46:53 WIB
	Putu Aditya Darmeindra	07-10-2024 14:47:51 WIB
	Tanit Prayitno	07-10-2024 14:47:57 WIB
	I Nyoman Widayana Rahayu	07-10-2024 14:48:09 WIB
	Hendro Purba	07-10-2024 14:48:14 WIB
	Nasri Zarman	07-10-2024 14:48:26 WIB
0	Alfian Aronggear	07-10-2024 14:48:48 WIB
1	Dewani Nanziah Dalimunthe	07-10-2024 14:48:48 WIB

IO	NAME	TTD
2	M. Herizal	07-10-2024 14:48:48 WIB
3	Agus Dian Purnama	07-10-2024 14:49:31 WIB
4	Bambang Wahyu Ganindra	07-10-2024 14:50:00 WIB
5	Kamaruddin	07-10-2024 14:50:03 WIB
6	I Putu Budi Astika	07-10-2024 14:51:16 WIB
7	Saiful Aziz	07-10-2024 14:52:58 WIB
8	Ranto Sibarani	07-10-2024 14:54:30 WIB
9	Wahyudi, SH.	07-10-2024 14:55:04 WIB
0	Ahmad Hafiz	07-10-2024 14:57:05 WIB
1	Junef Ismailiyanto	07-10-2024 14:57:06 WIB
2	Muhammad Isnaini	07-10-2024 14:57:37 WIB
3	Sukmawaty Amrullah	07-10-2024 14:58:06 WIB
4	Jou Hasyim Waimahing	07-10-2024 14:59:10 WIB

IO	NAME	TTD
5	Intan Irdawani	07-10-2024 14:59:45 WIB
6	Muhammad Arif Fadhlurrahman	07-10-2024 15:04:23 WIB
7	Boihaqqi	07-10-2024 15:04:25 WIB
8	Muhammad Yusuf	07-10-2024 15:04:49 WIB
9	Zuel Helmi	07-10-2024 15:05:10 WIB
0	Syaiful Arifin	07-10-2024 15:05:56 WIB
1	Saiful Bahri	07-10-2024 15:07:39 WIB
2	Zuhria Rauf	07-10-2024 15:07:40 WIB
3	RAMON FRANKY	07-10-2024 15:10:49 WIB
4	Dwi Tjahyo Soewarsono	07-10-2024 15:11:00 WIB
5	La Ode Muhammad Nikmat	07-10-2024 15:11:28 WIB
6	Galih Setya Putra Dewantara	07-10-2024 15:15:58 WIB
7	Astri Maulania Sasti	07-10-2024 15:17:07 WIB

IO	NAME	TTD
8	Rusyaima Farha Salsabila	07-10-2024 15:17:12 WIB
9	Misbakhul Munir	07-10-2024 15:17:32 WIB
0	Un Latuamury	07-10-2024 15:17:40 WIB
1	Bangkit Mahanantiyo	07-10-2024 15:18:29 WIB
2	Annisa Amelia Putri	07-10-2024 15:18:49 WIB
3	Ratno Timur	07-10-2024 15:23:01 WIB
4	Amin Fahrudin	07-10-2024 15:27:18 WIB
5	Delinar	07-10-2024 15:32:08 WIB
6	Nurul Fajri	07-10-2024 15:34:26 WIB
7	STEFEN ALVES TES MAU	07-10-2024 15:35:22 WIB
8	Agustinus Bangun	07-10-2024 15:35:50 WIB
9	Dian Rahmawati	07-10-2024 15:40:44 WIB
0	Denny Alan Pakiding	07-10-2024 15:43:53 WIB

IO	NAME	TTD
1	Asriyadi Tanama	07-10-2024 15:44:49 WIB
2	Dedy Nor Ardiyanto	07-10-2024 15:45:03 WIB
3	M. Irfan Alghifari	07-10-2024 15:46:35 WIB
4	Sayed Nazar	07-10-2024 15:47:28 WIB
5	Setio Pambudi	07-10-2024 15:47:37 WIB
6	Mulyadi	07-10-2024 15:47:37 WIB
7	Raina Salsabilla Erlizal	07-10-2024 15:47:38 WIB
8	Muhammad Hafidhi	07-10-2024 15:47:46 WIB
9	Adi Syahrudin Jamaluddin	07-10-2024 15:48:41 WIB
0	Nasrullah	07-10-2024 15:49:22 WIB
1	GALANG REZKY PERDANA	07-10-2024 15:49:35 WIB
2	CUT DARA KARTIKA	07-10-2024 15:49:40 WIB
3	Fiili Latuamury	07-10-2024 15:49:54 WIB

IO	NAME	TTD
4	Ahmad Hatim	07-10-2024 15:50:38 WIB
5	Donny Victorius	07-10-2024 15:51:00 WIB
6	Moin Tualeka	07-10-2024 15:51:13 WIB
7	Dhian Priyan Raga	07-10-2024 15:52:47 WIB
8	Hayani Imbu	07-10-2024 15:52:56 WIB
9	A. Habib Amanatullah Rahdar	07-10-2024 15:53:01 WIB
0	Francine Widjojo	07-10-2024 15:53:41 WIB
1	Memed Adiwinata	07-10-2024 15:55:58 WIB
2	Rizky Demores Lerian	07-10-2024 15:56:42 WIB
3	MOH,HILMAN BA	07-10-2024 15:56:59 WIB
4	Herman Kadir	07-10-2024 16:08:37 WIB
5	I Wayan Supadiyasa	07-10-2024 16:09:04 WIB
6	Achmad Eri Arif Prayoga	07-10-2024 16:09:04 WIB

IO	NAME	TTD
7	Dwi Sukwanto	07-10-2024 16:20:51 WIB
8	Jimy Yansen	07-10-2024 16:33:22 WIB
9	Dal Jahra	07-10-2024 16:41:48 WIB
0	Yohanis Laritmas	07-10-2024 16:43:53 WIB
1	Jhonal Prayogo	07-10-2024 16:44:17 WIB
2	Okta Heriawan	07-10-2024 16:44:29 WIB
3	Pandji Budi Santosa	07-10-2024 16:47:21 WIB
4	Lourensius Milla Dadi	07-10-2024 16:47:41 WIB
5	Yuice Sinta Enjelita Taneo	07-10-2024 16:49:47 WIB
6	Zulkarnain Muslim Asrialdo	07-10-2024 16:51:07 WIB
7	Rachmad Taufik Hidayat	07-10-2024 16:51:27 WIB
8	Osvaldo Gautama Putra	07-10-2024 16:51:42 WIB
9	Gerzon Tanuab	07-10-2024 16:51:56 WIB

IO	NAME	TTD
0	Saipul Anwar	07-10-2024 16:54:06 WIB
1	Lisa Nur Azizah	07-10-2024 16:54:11 WIB
2	Sucipto	07-10-2024 16:54:19 WIB
3	George Leonard Meijners	07-10-2024 16:56:03 WIB
4	Haris Kudianto	07-10-2024 16:56:29 WIB
5	Anang Yuliardi	07-10-2024 16:59:55 WIB
6	Yudi Hardiansyah	07-10-2024 17:01:03 WIB
7	Rastingkem	07-10-2024 17:12:50 WIB
8	Nasruddin	07-10-2024 17:24:37 WIB
9	Dela Khoirunisa	07-10-2024 17:28:21 WIB
00	Firman Hasurungan S	07-10-2024 17:29:44 WIB
01	Sudharmono K. Lewa Yusuf	07-10-2024 17:39:48 WIB
02	FAIZZAN ARDHI MUTAQOBB	07-10-2024 17:56:17 WIB

IO	NAME	TTD
03	Agus Sarjanto	07-10-2024 18:04:35 WIB
04	Moch. Ainul Yaqin	07-10-2024 18:05:29 WIB
05	Wawaftahni	07-10-2024 18:05:59 WIB
06	Amelia Suhaili	07-10-2024 18:51:52 WIB
07	Imam Wahyudi	07-10-2024 18:59:19 WIB
08	Agus Kristianto Djajusman	07-10-2024 19:05:15 WIB
09	Ramli Tambunan	07-10-2024 19:06:35 WIB
10	Muhammad Naryoko	07-10-2024 19:09:07 WIB
11	Dega Kautsar Pradana	07-10-2024 19:13:00 WIB
12	Lestari Manurung	07-10-2024 19:16:47 WIB
13	Rini Sundari	07-10-2024 19:20:37 WIB
14	Rizanur	07-10-2024 19:21:49 WIB
15	Aditya Linardo Putra	07-10-2024 19:24:25 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Ahmad Yani	07-10-2024 16:31:05 WIB
	Wahyudi, SH.	07-10-2024 16:31:17 WIB
	Jimmy Yansen	07-10-2024 16:33:25 WIB
	Hendro Purba	07-10-2024 16:36:37 WIB
	Muhammad Yusuf	07-10-2024 16:37:53 WIB
	Sukmawaty Amrullah	07-10-2024 16:38:23 WIB
	Syaiful Arifin	07-10-2024 16:38:28 WIB
	Ahmad Hafiz	07-10-2024 16:39:53 WIB
	Donny Victorius	07-10-2024 16:41:16 WIB
0	Rizky Demores Lorian	07-10-2024 16:41:34 WIB
1	Agus Dian Purnama	07-10-2024 16:41:44 WIB

IO	NAME	TTD
2	RAMON FRANKY	07-10-2024 16:41:54 WIB
3	Dal Jahra	07-10-2024 16:41:55 WIB
4	Ahmad Hatim	07-10-2024 16:42:12 WIB
5	Dwi Tjahyo Soewarsono	07-10-2024 16:42:19 WIB
6	MOH,HILMAN BA	07-10-2024 16:43:35 WIB
7	Okta Heriawan	07-10-2024 16:44:34 WIB
8	Memed Adiwinata	07-10-2024 16:45:40 WIB
9	Boihaqqi	07-10-2024 16:47:15 WIB
0	Dian Rahmawati	07-10-2024 16:47:19 WIB
1	Pandji Budi Santosa	07-10-2024 16:47:29 WIB
2	Intan Irdawani	07-10-2024 16:47:40 WIB
3	Lourensius Milla Dadi	07-10-2024 16:47:44 WIB
4	Muhammad Hafidhi	07-10-2024 16:48:16 WIB

IO	NAME	TTD
5	Dewani Nanziah Dalimunthe	07-10-2024 16:48:44 WIB
6	CUT DARA KARTIKA	07-10-2024 16:48:57 WIB
7	Bambang Wahyu Ganindra	07-10-2024 16:49:08 WIB
8	Zulkarnain Muslim Asrialdo	07-10-2024 16:51:12 WIB
9	Rachmad Taufik Hidayat	07-10-2024 16:51:33 WIB
0	Osvaldo Gautama Putra	07-10-2024 16:51:47 WIB
1	Gerzon Tanuab	07-10-2024 16:51:59 WIB
2	M. Irfan Alghifari	07-10-2024 16:52:21 WIB
3	Lisa Nur Azizah	07-10-2024 16:54:15 WIB
4	Saipul Anwar	07-10-2024 16:54:35 WIB
5	Sucipto	07-10-2024 16:54:35 WIB
6	Fiili Latuamury	07-10-2024 16:54:41 WIB
7	George Leonard Meijners	07-10-2024 16:56:13 WIB

IO	NAME	TTD
8	Alfian Aronggear	07-10-2024 16:56:25 WIB
9	Haris Kudianto	07-10-2024 16:56:55 WIB
0	Herman Kadir	07-10-2024 16:58:48 WIB
1	Muhammad Arif Fadhlurrahman	07-10-2024 16:58:49 WIB
2	Zuhria Rauf	07-10-2024 16:59:18 WIB
3	Dedy Nor Ardiyanto	07-10-2024 16:59:53 WIB
4	Anang Yuliardi	07-10-2024 17:00:00 WIB
5	Dwi Sukwanto	07-10-2024 17:00:32 WIB
6	Francine Widjojo	07-10-2024 17:01:02 WIB
7	Yudi Hardiansyah	07-10-2024 17:01:07 WIB
8	Saiful Bahri	07-10-2024 17:04:17 WIB
9	Saiful Aziz	07-10-2024 17:04:23 WIB
0	La Ode Muhammad Nikmat	07-10-2024 17:04:29 WIB

IO	NAME	TTD
1	Delinar	07-10-2024 17:05:14 WIB
2	Bakas Manyata	07-10-2024 17:05:21 WIB
3	I Wayan Supadiyasa	07-10-2024 17:12:41 WIB
4	Rastingkem	07-10-2024 17:14:00 WIB
5	Bangkit Mahanantiyo	07-10-2024 17:14:05 WIB
6	Kamaruddin	07-10-2024 17:14:38 WIB
7	Denny Alan Pakiding	07-10-2024 17:14:53 WIB
8	Ranto Sibarani	07-10-2024 17:14:55 WIB
9	Amin Fahrudin	07-10-2024 17:15:09 WIB
0	I Nyoman Widayana Rahayu	07-10-2024 17:16:41 WIB
1	Nasrullah	07-10-2024 17:17:36 WIB
2	Eka Rahmawati	07-10-2024 17:20:41 WIB
3	Adi Syahrudin Jamaluddin	07-10-2024 17:21:29 WIB

IO	NAME	TTD
4	Setio Pambudi	07-10-2024 17:21:44 WIB
5	Mulyadi	07-10-2024 17:22:35 WIB
6	Zuel Helmi	07-10-2024 17:22:37 WIB
7	Nasruddin	07-10-2024 17:24:35 WIB
8	Un Latuamury	07-10-2024 17:25:36 WIB
9	Dela Khoirunisa	07-10-2024 17:28:18 WIB
0	Nurul Fajri	07-10-2024 17:28:39 WIB
1	Yohanis Laritmas	07-10-2024 17:29:45 WIB
2	Firman Hasurungan S	07-10-2024 17:29:49 WIB
3	Muhammad Isnaini	07-10-2024 17:30:17 WIB
4	Rusyaima Farha Salsabila	07-10-2024 17:31:48 WIB
5	Ratno Timur	07-10-2024 17:31:50 WIB
6	Astri Maulania Sasti	07-10-2024 17:31:56 WIB

IO	NAME	TTD
7	A. Habib Amanatullah Rahdar	07-10-2024 17:33:08 WIB
8	Annisa Amelia Putri	07-10-2024 17:34:36 WIB
9	Yuice Sinta Enjelita Taneo	07-10-2024 17:35:45 WIB
0	GALANG REZKY PERDANA	07-10-2024 17:36:12 WIB
1	Sudharmono K. Lewa Yusuf	07-10-2024 17:39:53 WIB
2	Agustinus Bangun	07-10-2024 17:50:24 WIB
3	Misbakhul Munir	07-10-2024 17:51:16 WIB
4	FAIZZAN ARDHI MUTAQOBB	07-10-2024 17:56:19 WIB
5	Agus Sarjanto	07-10-2024 18:04:47 WIB
6	Moch. Ainul Yaqin	07-10-2024 18:05:32 WIB
7	Wawaftahni	07-10-2024 18:06:22 WIB
8	Moin Tualeka	07-10-2024 18:09:48 WIB
9	Muallim Bahar	07-10-2024 18:45:02 WIB

IO	NAME	TTD
0	Amelia Suhaili	07-10-2024 18:51:53 WIB
1	Imam Wahyudi	07-10-2024 18:59:23 WIB
2	Putu Aditya Darmeindra	07-10-2024 19:00:59 WIB
3	STEFEN ALVES TES MAU	07-10-2024 19:01:17 WIB
4	Nasri Zarman	07-10-2024 19:01:25 WIB
5	I Putu Budi Astika	07-10-2024 19:01:31 WIB
6	Tanit Prayitno	07-10-2024 19:02:44 WIB
7	Sayed Nazar	07-10-2024 19:03:37 WIB
8	M. Herizal	07-10-2024 19:04:42 WIB
9	Agus Kristianto Djajusman	07-10-2024 19:05:17 WIB
00	Asriyadi Tanama	07-10-2024 19:05:21 WIB
01	Ramli Tambunan	07-10-2024 19:06:38 WIB
02	Muhammad Naryoko	07-10-2024 19:09:38 WIB

IO	NAME	TTD
03	Jou Hasyim Waimahing	07-10-2024 19:10:09 WIB
04	Junef Ismailiyanto	07-10-2024 19:10:27 WIB
05	Dega Kautsar Pradana	07-10-2024 19:13:04 WIB
06	Lestari Manurung	07-10-2024 19:16:49 WIB
07	Duli Rajendra Yudadi	07-10-2024 19:18:41 WIB
08	Rini Sundari	07-10-2024 19:20:40 WIB
09	Rizanur	07-10-2024 19:21:55 WIB
10	Aditya Linardo Putra	07-10-2024 19:24:28 WIB
11	Akhmad Leksono	07-10-2024 19:38:38 WIB
12	Gugun Kurniawan	07-10-2024 19:44:07 WIB
13	Esau Boma	07-10-2024 19:45:49 WIB
14	Salman Alfarisi Simanjuntak	07-10-2024 19:57:04 WIB
15	Muhamad Iqbal L. Nazim	07-10-2024 19:57:27 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Donny Victorius	07-10-2024 19:00:15 WIB
	Hendro Purba	07-10-2024 19:00:29 WIB
	Dwi Sukwanto	07-10-2024 19:00:48 WIB
	Francine Widjojo	07-10-2024 19:00:49 WIB
	Delinar	07-10-2024 19:00:50 WIB
	Putu Aditya Darmeindra	07-10-2024 19:01:02 WIB
	I Nyoman Widayana Rahayu	07-10-2024 19:01:03 WIB
	Nasruddin	07-10-2024 19:01:08 WIB
	Ahmad Yani	07-10-2024 19:01:10 WIB
0	STEFEN ALVES TES MAU	07-10-2024 19:01:23 WIB

IO	NAME	TTD
1	I Putu Budi Astika	07-10-2024 19:01:33 WIB
2	Nasri Zarman	07-10-2024 19:01:44 WIB
3	CUT DARA KARTIKA	07-10-2024 19:01:49 WIB
4	Osvaldo Gautama Putra	07-10-2024 19:01:56 WIB
5	Mulyadi	07-10-2024 19:01:57 WIB
6	M. Irfan Alghifari	07-10-2024 19:02:11 WIB
7	Saiful Aziz	07-10-2024 19:02:27 WIB
8	Rizky Demores Lerian	07-10-2024 19:02:30 WIB
9	Yohanis Laritmas	07-10-2024 19:02:33 WIB
0	Anang Yuliardi	07-10-2024 19:02:37 WIB
1	Memed Adiwinata	07-10-2024 19:02:45 WIB
2	Sudharmono K. Lewa Yusuf	07-10-2024 19:02:52 WIB
3	Dela Khoirunisa	07-10-2024 19:02:52 WIB

IO	NAME	TTD
4	Dewani Nanziah Dalimunthe	07-10-2024 19:03:20 WIB
5	Moch. Ainul Yaqin	07-10-2024 19:03:28 WIB
6	Sucipto	07-10-2024 19:03:30 WIB
7	Moin Tualeka	07-10-2024 19:03:32 WIB
8	Muhammad Hafidhi	07-10-2024 19:03:34 WIB
9	Dwi Tjahyo Soewarsono	07-10-2024 19:04:01 WIB
0	Dian Rahmawati	07-10-2024 19:04:02 WIB
1	Wahyudi, SH.	07-10-2024 19:04:04 WIB
2	Un Latuamury	07-10-2024 19:04:14 WIB
3	Setio Pambudi	07-10-2024 19:04:15 WIB
4	Eka Rahmawati	07-10-2024 19:04:33 WIB
5	Gerzon Tanuab	07-10-2024 19:04:38 WIB
6	Syaiful Arifin	07-10-2024 19:04:40 WIB

IO	NAME	TTD
7	M. Herizal	07-10-2024 19:04:54 WIB
8	Zuhria Rauf	07-10-2024 19:04:58 WIB
9	Nurul Fajri	07-10-2024 19:05:10 WIB
0	Agus Kristianto Djajusman	07-10-2024 19:05:23 WIB
1	Asriyadi Tanama	07-10-2024 19:05:24 WIB
2	Ahmad Hatim	07-10-2024 19:05:35 WIB
3	La Ode Muhammad Nikmat	07-10-2024 19:05:38 WIB
4	Intan Irdawani	07-10-2024 19:05:40 WIB
5	Lourensius Milla Dadi	07-10-2024 19:05:54 WIB
6	Lisa Nur Azizah	07-10-2024 19:05:55 WIB
7	FAIZZAN ARDHI MUTAQOBB	07-10-2024 19:05:57 WIB
8	Dedy Nor Ardiyanto	07-10-2024 19:06:05 WIB
9	Rachmad Taufik Hidayat	07-10-2024 19:06:13 WIB

IO	NAME	TTD
0	Ramli Tambunan	07-10-2024 19:06:41 WIB
1	Fiili Latuamury	07-10-2024 19:07:07 WIB
2	Alfian Aronggear	07-10-2024 19:07:19 WIB
3	Muhammad Arif Fadhlurrahman	07-10-2024 19:07:23 WIB
4	Saipul Anwar	07-10-2024 19:07:34 WIB
5	Annisa Amelia Putri	07-10-2024 19:07:36 WIB
6	Ramli Tambunan	07-10-2024 19:07:49 WIB
7	George Leonard Meijners	07-10-2024 19:07:52 WIB
8	Ramli Tambunan	07-10-2024 19:07:59 WIB
9	Nasrullah	07-10-2024 19:08:24 WIB
0	Bambang Wahyu Ganindra	07-10-2024 19:08:41 WIB
1	Zuel Helmi	07-10-2024 19:08:44 WIB
2	Okta Heriawan	07-10-2024 19:08:46 WIB

IO	NAME	TTD
3	Saiful Bahri	07-10-2024 19:08:48 WIB
4	Firman Hasurungan S	07-10-2024 19:08:56 WIB
5	Muhammad Naryoko	07-10-2024 19:09:44 WIB
6	Jou Hasyim Waimahing	07-10-2024 19:10:14 WIB
7	Junef Ismailiyanto	07-10-2024 19:10:32 WIB
8	Muhammad Isnaini	07-10-2024 19:10:33 WIB
9	Dal Jahra	07-10-2024 19:11:04 WIB
0	Ahmad Hafiz	07-10-2024 19:12:06 WIB
1	I Wayan Supadiyasa	07-10-2024 19:12:31 WIB
2	Bakas Manyata	07-10-2024 19:12:38 WIB
3	Denny Alan Pakiding	07-10-2024 19:13:02 WIB
4	Dega Kautsar Pradana	07-10-2024 19:13:06 WIB
5	Adi Syahrudin Jamaluddin	07-10-2024 19:13:23 WIB

IO	NAME	TTD
6	RAMON FRANKY	07-10-2024 19:13:48 WIB
7	GALANG REZKY PERDANA	07-10-2024 19:14:04 WIB
8	Lestari Manurung	07-10-2024 19:16:52 WIB
9	Boihaqqi	07-10-2024 19:17:31 WIB
0	Duli Rajendra Yudadi	07-10-2024 19:18:59 WIB
1	Agus Dian Purnama	07-10-2024 19:19:06 WIB
2	Rini Sundari	07-10-2024 19:20:42 WIB
3	Rizanur	07-10-2024 19:22:01 WIB
4	Herman Kadir	07-10-2024 19:22:48 WIB
5	Aditya Linardo Putra	07-10-2024 19:24:32 WIB
6	Ratno Timur	07-10-2024 19:25:21 WIB
7	Muallim Bahar	07-10-2024 19:25:53 WIB
8	Misbakhul Munir	07-10-2024 19:27:59 WIB

IO	NAME	TTD
9	Pandji Budi Santosa	07-10-2024 19:28:50 WIB
0	Kamaruddin	07-10-2024 19:29:54 WIB
1	Ranto Sibarani	07-10-2024 19:30:25 WIB
2	Bangkit Mahanantiyo	07-10-2024 19:32:50 WIB
3	Heriyanto	07-10-2024 19:34:56 WIB
4	Wawaftahni	07-10-2024 19:37:23 WIB
5	Akhmad Leksono	07-10-2024 19:38:45 WIB
6	Gugun Kurniawan	07-10-2024 19:44:11 WIB
7	Esau Boma	07-10-2024 19:46:51 WIB
8	Jimmy Yansen	07-10-2024 19:51:43 WIB
9	Salman Alfarisi Simanjuntak	07-10-2024 19:56:55 WIB
00	Muhamad Iqbal L. Nazim	07-10-2024 19:57:34 WIB
01	Mashuri Nasution	07-10-2024 19:57:53 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	RAMON FRANKY	08-10-2024 07:30:29 WIB
	MUHAMMAD ROMZUL ISLAM	08-10-2024 07:31:57 WIB
	Zuhria Rauf	08-10-2024 07:33:08 WIB
	Osvaldo Gautama Putra	08-10-2024 07:33:54 WIB
	Gerzon Tanuab	08-10-2024 07:34:44 WIB
	Imam Wahyudi	08-10-2024 07:35:01 WIB
	Agus Kristianto Djajusman	08-10-2024 07:36:25 WIB
	Agus Dian Purnama	08-10-2024 07:36:57 WIB
	Hendro Purba	08-10-2024 07:37:10 WIB
0	Tanit Prayitno	08-10-2024 07:37:36 WIB

IO	NAME	TTD
1	Ahmad Yani	08-10-2024 07:37:59 WIB
2	Donny Victorius	08-10-2024 07:38:37 WIB
3	Syaiful Arifin	08-10-2024 07:39:04 WIB
4	M. Herizal	08-10-2024 07:39:07 WIB
5	Rizanur	08-10-2024 07:39:17 WIB
6	Intan Irdawani	08-10-2024 07:39:22 WIB
7	Sukmawaty Amrullah	08-10-2024 07:39:27 WIB
8	Muhammad Yusuf	08-10-2024 07:39:29 WIB
9	MOH,HILMAN BA	08-10-2024 07:40:00 WIB
0	Rastingkem	08-10-2024 07:40:02 WIB
1	Alfian Aronggear	08-10-2024 07:40:38 WIB
2	Heriyanto	08-10-2024 07:40:50 WIB
3	Muhammad Hafidhi	08-10-2024 07:41:05 WIB

IO	NAME	TTD
4	Dwi Sukwanto	08-10-2024 07:41:19 WIB
5	Rizky Demores Larian	08-10-2024 07:41:23 WIB
6	Memed Adiwinata	08-10-2024 07:41:27 WIB
7	Lourensius Milla Dadi	08-10-2024 07:41:31 WIB
8	Ahmad Hafiz	08-10-2024 07:41:39 WIB
9	Nasruddin	08-10-2024 07:41:51 WIB
0	Fiili Latuamury	08-10-2024 07:42:16 WIB
1	Pandji Budi Santosa	08-10-2024 07:43:12 WIB
2	GALANG REZKY PERDANA	08-10-2024 07:43:17 WIB
3	Un Latuamury	08-10-2024 07:43:20 WIB
4	Saiful Aziz	08-10-2024 07:43:23 WIB
5	Moin Tualeka	08-10-2024 07:43:41 WIB
6	Nurul Fajri	08-10-2024 07:43:49 WIB

IO	NAME	TTD
7	Dhian Priyan Raga	08-10-2024 07:44:02 WIB
8	Hayani Imbu	08-10-2024 07:44:06 WIB
9	Anang Yuliardi	08-10-2024 07:44:13 WIB
0	Dewani Nanziah Dalimunthe	08-10-2024 07:44:16 WIB
1	Hidayah	08-10-2024 07:44:35 WIB
2	Delinar	08-10-2024 07:45:00 WIB
3	La Ode Muhammad Nikmat	08-10-2024 07:45:24 WIB
4	Dian Rahmawati	08-10-2024 07:45:27 WIB
5	Rusyaima Farha Salsabila	08-10-2024 07:45:34 WIB
6	Kamaruddin	08-10-2024 07:45:35 WIB
7	Ramli Tambunan	08-10-2024 07:45:38 WIB
8	Galih Setya Putra Dewantara	08-10-2024 07:45:40 WIB
9	Nasri Zarman	08-10-2024 07:46:00 WIB

IO	NAME	TTD
0	Okta Heriawan	08-10-2024 07:46:03 WIB
1	Yuice Sinta Enjelita Taneo	08-10-2024 07:46:07 WIB
2	Agus Supriyanto	08-10-2024 07:46:10 WIB
3	YENIWATY SILVIAN Y ATAUPAH	08-10-2024 07:46:16 WIB
4	Sucipto	08-10-2024 07:46:21 WIB
5	Dega Kautsar Pradana	08-10-2024 07:46:22 WIB
6	Setio Pambudi	08-10-2024 07:46:30 WIB
7	Sayed Nazar	08-10-2024 07:46:47 WIB
8	Agustinus Bangun	08-10-2024 07:47:31 WIB
9	Raina Salsabilla Erlizal	08-10-2024 07:47:55 WIB
0	Rachmad Taufik Hidayat	08-10-2024 07:47:59 WIB
1	Mashuri Nasution	08-10-2024 07:48:23 WIB
2	Wawaftahni	08-10-2024 07:48:33 WIB

IO	NAME	TTD
3	Yudi Hardiansyah	08-10-2024 07:48:52 WIB
4	Junef Ismailiyanto	08-10-2024 07:48:55 WIB
5	Afrizal Muslim	08-10-2024 07:48:58 WIB
6	Nasrullah	08-10-2024 07:50:06 WIB
7	Asriyadi Tanama	08-10-2024 07:50:45 WIB
8	Misbakhul Munir	08-10-2024 07:51:07 WIB
9	Haris Kudianto	08-10-2024 07:51:09 WIB
0	Muhammad Isnaini	08-10-2024 07:51:16 WIB
1	STEFEN ALVES TES MAU	08-10-2024 07:51:24 WIB
2	Saipul Anwar	08-10-2024 07:51:24 WIB
3	Francine Widjojo	08-10-2024 07:52:32 WIB
4	Salman Alfarisi Simanjuntak	08-10-2024 07:52:37 WIB
5	Salman Alfarisi Simanjuntak	08-10-2024 07:52:37 WIB

IO	NAME	TTD
6	Ahmad Hatim	08-10-2024 07:52:48 WIB
7	Jhonal Prayogo	08-10-2024 07:53:02 WIB
8	Eka Rahmawati	08-10-2024 07:54:12 WIB
9	Gugun Kurniawan	08-10-2024 07:54:54 WIB
0	Octo Arystho Emerson	08-10-2024 07:55:02 WIB
1	Boihaqqi	08-10-2024 07:55:05 WIB
2	Ratno Timur	08-10-2024 07:55:30 WIB
3	Muhammad Naryoko	08-10-2024 07:55:30 WIB
4	Yohanis Laritmas	08-10-2024 07:55:42 WIB
5	Dela Khoirunisa	08-10-2024 07:55:52 WIB
6	CUT DARA KARTIKA	08-10-2024 07:56:20 WIB
7	Lisa Nur Azizah	08-10-2024 07:57:03 WIB
8	Muhamad Iqbal L. Nazim	08-10-2024 07:57:08 WIB

IO	NAME	TTD
9	Sudharmono K. Lewa Yusuf	08-10-2024 07:57:23 WIB
0	Muhammad Arif Fadhlurrahman	08-10-2024 07:57:45 WIB
1	Dedy Nor Ardiyanto	08-10-2024 07:57:51 WIB
2	Bakas Manyata	08-10-2024 07:59:06 WIB
3	Wahyudi, SH.	08-10-2024 08:00:02 WIB
4	Saiful Bahri	08-10-2024 08:00:48 WIB
5	Amelia Suhaili	08-10-2024 08:00:52 WIB
6	Herman Kadir	08-10-2024 08:02:40 WIB
7	Jou Hasyim Waimahing	08-10-2024 08:02:54 WIB
8	Moch. Ainul Yaqin	08-10-2024 08:03:35 WIB
9	Denny Alan Pakiding	08-10-2024 08:05:09 WIB
00	Adi Syahrudin Jamaluddin	08-10-2024 08:05:09 WIB
01	Hamili	08-10-2024 08:05:18 WIB

IO	NAME	TTD
02	Ranto Sibarani	08-10-2024 08:07:33 WIB
03	Rini Sundari	08-10-2024 08:08:08 WIB
04	FAIZZAN ARDHI MUTAQOBB	08-10-2024 08:09:01 WIB
05	Erfandi	08-10-2024 08:09:19 WIB
06	Astri Maulania Sasti	08-10-2024 08:10:45 WIB
07	Akhmad Leksono	08-10-2024 08:12:00 WIB
08	Achmad Eri Arif Prayoga	08-10-2024 08:13:20 WIB
09	Bangkit Mahanantiyo	08-10-2024 08:14:28 WIB
10	Bambang Wahyu Ganindra	08-10-2024 08:16:02 WIB
11	Firman Hasurungan S	08-10-2024 08:18:42 WIB
12	A. Habib Amanatullah Rahdar	08-10-2024 08:22:56 WIB
13	Hamjah Diha	08-10-2024 08:23:27 WIB
14	Zuel Helmi	08-10-2024 08:24:36 WIB

IO	NAME	TTD
15	Putu Aditya Darmeindra	08-10-2024 08:27:33 WIB
16	I Putu Budi Astika	08-10-2024 08:27:57 WIB
17	I Nyoman Widayana Rahayu	08-10-2024 08:28:37 WIB
18	Esau Boma	08-10-2024 08:28:55 WIB
19	Mulyadi	08-10-2024 08:30:57 WIB
20	George Leonard Meijners	08-10-2024 08:33:47 WIB
21	M. Irfan Alghifari	08-10-2024 08:36:04 WIB
22	I Wayan Supadiyasa	08-10-2024 08:37:46 WIB
23	Aditya Linardo Putra	08-10-2024 08:39:04 WIB
24	Rocky Prawira Pasaeno	08-10-2024 08:39:29 WIB
25	L.Lifkoi Vantar	08-10-2024 08:45:12 WIB
26	Lestari Manurung	08-10-2024 08:52:07 WIB
27	Zebulon T. Yohame	08-10-2024 08:52:22 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Zuhria Rauf	08-10-2024 10:02:01 WIB
	Sudharmono K. Lewa Yusuf	08-10-2024 10:12:30 WIB
	Putu Aditya Darmeindra	08-10-2024 10:12:52 WIB
	I Putu Budi Astika	08-10-2024 10:13:08 WIB
	I Nyoman Widayana Rahayu	08-10-2024 10:13:13 WIB
	Donny Victorius	08-10-2024 10:14:23 WIB
	RAMON FRANKY	08-10-2024 10:14:36 WIB
	Lourensius Milla Dadi	08-10-2024 10:15:22 WIB
	Lourensius Milla Dadi	08-10-2024 10:15:22 WIB
0	M. Irfan Alghifari	08-10-2024 10:16:39 WIB

IO	NAME	TTD
1	Hidayah	08-10-2024 10:18:14 WIB
2	M. Herizal	08-10-2024 10:18:15 WIB
3	Gugun Kurniawan	08-10-2024 10:19:50 WIB
4	Zuel Helmi	08-10-2024 10:19:52 WIB
5	Hamjah Diha	08-10-2024 10:20:05 WIB
6	Nasri Zarman	08-10-2024 10:21:10 WIB
7	Bakas Manyata	08-10-2024 10:21:41 WIB
8	Francine Widjojo	08-10-2024 10:22:24 WIB
9	Rachmad Taufik Hidayat	08-10-2024 10:22:25 WIB
0	Agus Dian Purnama	08-10-2024 10:22:40 WIB
1	Galih Setya Putra Dewantara	08-10-2024 10:22:57 WIB
2	Muhammad Yusuf	08-10-2024 10:23:12 WIB
3	Bambang Wahyu Ganindra	08-10-2024 10:23:13 WIB

IO	NAME	TTD
4	Sukmawaty Amrullah	08-10-2024 10:23:16 WIB
5	Muhammad Naryoko	08-10-2024 10:23:17 WIB
6	Herman Kadir	08-10-2024 10:23:17 WIB
7	Dewani Nanziah Dalimunthe	08-10-2024 10:23:25 WIB
8	Jou Hasyim Waimahing	08-10-2024 10:23:37 WIB
9	Denny Alan Pakiding	08-10-2024 10:23:45 WIB
0	Dian Rahmawati	08-10-2024 10:23:49 WIB
1	Ahmad Yani	08-10-2024 10:23:54 WIB
2	Intan Irdawani	08-10-2024 10:24:31 WIB
3	Nurul Fajri	08-10-2024 10:25:01 WIB
4	Setio Pambudi	08-10-2024 10:25:08 WIB
5	Dal Jahra	08-10-2024 10:25:10 WIB
6	Nasrullah	08-10-2024 10:25:16 WIB

IO	NAME	TTD
7	Bangkit Mahanantiyo	08-10-2024 10:25:35 WIB
8	Sayed Nazar	08-10-2024 10:25:36 WIB
9	Imam Wahyudi	08-10-2024 10:25:44 WIB
0	La Ode Muhammad Nikmat	08-10-2024 10:25:48 WIB
1	Agustinus Bangun	08-10-2024 10:25:49 WIB
2	GALANG REZKY PERDANA	08-10-2024 10:25:54 WIB
3	Dwi Sukwanto	08-10-2024 10:25:54 WIB
4	Asriyadi Tanama	08-10-2024 10:25:57 WIB
5	Muhammad Hafidhi	08-10-2024 10:25:58 WIB
6	Fiili Latuamury	08-10-2024 10:26:01 WIB
7	Erfandi	08-10-2024 10:26:13 WIB
8	Saiful Aziz	08-10-2024 10:26:18 WIB
9	Moch. Ainul Yaqin	08-10-2024 10:26:22 WIB

IO	NAME	TTD
0	Saiful Bahri	08-10-2024 10:26:32 WIB
1	Dedy Nor Ardiyanto	08-10-2024 10:26:43 WIB
2	Muhamad Iqbal L. Nazim	08-10-2024 10:26:44 WIB
3	YENIWATY SILVIAN Y ATAUPAH	08-10-2024 10:26:51 WIB
4	Rusyaima Farha Salsabila	08-10-2024 10:27:07 WIB
5	Dega Kautsar Pradana	08-10-2024 10:27:09 WIB
6	Hamili	08-10-2024 10:27:28 WIB
7	Lestari Manurung	08-10-2024 10:27:49 WIB
8	Annisa Amelia Putri	08-10-2024 10:28:04 WIB
9	Delinar	08-10-2024 10:28:15 WIB
0	Ahmad Hafiz	08-10-2024 10:28:21 WIB
1	Astri Maulania Sasti	08-10-2024 10:28:28 WIB
2	Agus Kristianto Djajusman	08-10-2024 10:29:01 WIB

IO	NAME	TTD
3	Mashuri Nasution	08-10-2024 10:30:03 WIB
4	Boihaqqi	08-10-2024 10:30:07 WIB
5	Ranto Sibarani	08-10-2024 10:30:47 WIB
6	Mulyadi	08-10-2024 10:31:16 WIB
7	Adi Syahrudin Jamaluddin	08-10-2024 10:31:19 WIB
8	CUT DARA KARTIKA	08-10-2024 10:31:26 WIB
9	Rizky Demores Lerian	08-10-2024 10:31:27 WIB
0	Tanit Prayitno	08-10-2024 10:31:36 WIB
1	Syaiful Arifin	08-10-2024 10:31:44 WIB
2	I Wayan Supadiyasa	08-10-2024 10:31:46 WIB
3	MUHAMMAD ROMZUL ISLAM	08-10-2024 10:32:00 WIB
4	MOH,HILMAN BA	08-10-2024 10:32:04 WIB
5	Memed Adiwinata	08-10-2024 10:32:47 WIB

IO	NAME	TTD
6	Muhammad Isnaini	08-10-2024 10:33:58 WIB
7	Ahmad Hatim	08-10-2024 10:34:24 WIB
8	Rizanur	08-10-2024 10:34:43 WIB
9	Okta Heriawan	08-10-2024 10:37:09 WIB
0	Andi Surya Wijaya	08-10-2024 10:37:16 WIB
1	Yohanis Laritmas	08-10-2024 10:37:29 WIB
2	Alfian Aronggear	08-10-2024 10:37:46 WIB
3	Rastingkem	08-10-2024 10:37:50 WIB
4	Ratno Timur	08-10-2024 10:38:05 WIB
5	Moin Tualeka	08-10-2024 10:39:32 WIB
6	Nasruddin	08-10-2024 10:39:58 WIB
7	Rini Sundari	08-10-2024 10:40:59 WIB
8	Rini Sundari	08-10-2024 10:41:00 WIB

IO	NAME	TTD
9	FAIZZAN ARDHI MUTAQOBB	08-10-2024 10:43:15 WIB
0	Firman Hasurungan S	08-10-2024 10:43:47 WIB
1	Ramli Tambunan	08-10-2024 10:44:11 WIB
2	Wawaftahni	08-10-2024 10:46:24 WIB
3	Eka Rahmawati	08-10-2024 10:47:14 WIB
4	Junef Ismailiyanto	08-10-2024 10:49:01 WIB
5	Un Latuamury	08-10-2024 10:50:59 WIB
6	Wahyudi, SH.	08-10-2024 10:53:31 WIB
7	Saipul Anwar	08-10-2024 10:54:07 WIB
8	Muhammad Arif Fadhlurrahman	08-10-2024 10:54:16 WIB
9	Osvaldo Gautama Putra	08-10-2024 10:55:34 WIB
00	Muallim Bahar	08-10-2024 10:55:43 WIB
01	Salman Alfarisi Simanjuntak	08-10-2024 11:02:31 WIB

IO	NAME	TTD
02	Hayani Imbu	08-10-2024 11:04:17 WIB
03	Akhmad Leksono	08-10-2024 11:07:57 WIB
04	STEFEN ALVES TES MAU	08-10-2024 11:13:44 WIB
05	Heriyanto	08-10-2024 11:18:46 WIB
06	Amin Fahrudin	08-10-2024 11:20:25 WIB
07	Kamaruddin	08-10-2024 11:22:01 WIB
08	Esau Boma	08-10-2024 11:30:24 WIB
09	Anang Yuliardi	08-10-2024 11:31:27 WIB
10	Rocky Prawira Pasaeno	08-10-2024 11:31:41 WIB
11	George Leonard Meijners	08-10-2024 11:36:25 WIB
12	Zebulon T. Yohame	08-10-2024 11:37:08 WIB
13	Ariyanto	08-10-2024 11:44:10 WIB
14	Octo Arystho Emerson	08-10-2024 11:44:24 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Hendro Purba	08-10-2024 17:31:20 WIB
	Memed Adiwinata	08-10-2024 17:35:43 WIB
	Rizky Demores Larian	08-10-2024 17:36:12 WIB
	Andi Surya Wijaya	08-10-2024 17:37:29 WIB
	MOH,HILMAN BA	08-10-2024 17:39:08 WIB
	Aditya Linardo Putra	08-10-2024 17:46:50 WIB
	Achmad Eri Arif Prayoga	08-10-2024 17:58:47 WIB
	GALANG REZKY PERDANA	08-10-2024 17:59:23 WIB
	Saiful Bahri	08-10-2024 18:02:02 WIB
0	Syaiful Arifin	08-10-2024 18:12:02 WIB
1	Ahmad Yani	08-10-2024 18:14:11 WIB

IO	NAME	TTD
2	Ratno Timur	08-10-2024 18:14:59 WIB
3	Ahmad Hafiz	08-10-2024 18:15:54 WIB
4	Muhammad Isnaini	08-10-2024 18:16:29 WIB
5	RAMON FRANKY	08-10-2024 18:17:50 WIB
6	Zuhria Rauf	08-10-2024 18:22:18 WIB
7	Nasrullah	08-10-2024 18:22:38 WIB
8	Denny Alan Pakiding	08-10-2024 18:23:05 WIB
9	Muhammad Arif Fadhlurrahman	08-10-2024 18:24:12 WIB
0	Muhammad Yuntri	08-10-2024 18:25:44 WIB
1	Bangkit Mahanantiyo	08-10-2024 18:26:32 WIB
2	Ranto Sibarani	08-10-2024 18:27:26 WIB
3	Donny Victorius	08-10-2024 18:36:23 WIB
4	CUT DARA KARTIKA	08-10-2024 18:40:57 WIB

IO	NAME	TTD
5	Francine Widjojo	08-10-2024 18:43:41 WIB
6	La Ode Muhammad Nikmat	08-10-2024 18:43:55 WIB
7	Moch. Ainul Yaqin	08-10-2024 18:44:03 WIB
8	Muhammad Naryoko	08-10-2024 18:48:28 WIB
9	Muallim Bahar	08-10-2024 18:49:09 WIB
0	Bakas Manyata	08-10-2024 18:49:59 WIB
1	Adi Syahrudin Jamaluddin	08-10-2024 18:50:30 WIB
2	Jou Hasyim Waimahing	08-10-2024 18:53:04 WIB
3	Kamaruddin	08-10-2024 18:54:33 WIB
4	A. Habib Amanatullah Rahdar	08-10-2024 19:18:03 WIB
5	Akhmad Leksono	08-10-2024 19:29:53 WIB
6	Heriyanto	08-10-2024 19:30:11 WIB
7	Hidayah	08-10-2024 20:13:51 WIB

IO	NAME	TTD
8	Pandji Budi Santosa	08-10-2024 20:14:37 WIB
9	Sucipto	08-10-2024 20:21:09 WIB
0	Muhamad Iqbal L. Nazim	08-10-2024 20:41:24 WIB
1	Mashuri Nasution	08-10-2024 20:45:26 WIB
2	Misbakhul Munir	08-10-2024 20:55:15 WIB
3	Eka Rahmawati	08-10-2024 20:58:04 WIB
4	Yohanis Laritmas	08-10-2024 20:59:44 WIB
5	Wahyudi, SH.	08-10-2024 21:24:50 WIB
6	Agustinus Bangun	08-10-2024 21:26:56 WIB
7	Fiili Latuamury	08-10-2024 21:49:40 WIB
8	Lourensius Milla Dadi	08-10-2024 22:11:19 WIB
9	George Leonard Meijners	08-10-2024 22:36:55 WIB
0	Bambang Wahyu Ganindra	08-10-2024 22:41:47 WIB

IO	NAME	TTD
1	Sudharmono K. Lewa Yusuf	08-10-2024 22:44:56 WIB
2	Zebulon T. Yohame	08-10-2024 23:01:46 WIB
3	Esau Boma	08-10-2024 23:18:44 WIB
4	Okta Heriawan	08-10-2024 23:25:32 WIB
5	Dal Jahra	08-10-2024 23:47:58 WIB
6	Remsy Maroi Nuniary	09-10-2024 00:14:37 WIB
7	Jhonal Prayogo	09-10-2024 00:16:01 WIB
8	Ramli Tambunan	09-10-2024 00:23:29 WIB
9	Putu Aditya Darmeindra	09-10-2024 00:32:47 WIB
0	I Putu Budi Astika	09-10-2024 00:33:40 WIB
1	I Nyoman Widayana Rahayu	09-10-2024 00:34:27 WIB
2	Agus Kristianto Djajusman	09-10-2024 01:02:42 WIB
3	Osvaldo Gautama Putra	09-10-2024 01:05:26 WIB

IO	NAME	TTD
4	Saipul Anwar	09-10-2024 04:58:55 WIB
5	Dega Kautsar Pradana	09-10-2024 06:05:08 WIB
6	Galih Setya Putra Dewantara	09-10-2024 06:21:40 WIB
7	Dwi Sukwanto	09-10-2024 06:21:47 WIB
8	Setio Pambudi	09-10-2024 06:45:44 WIB
9	Zulkarnain Muslim Asrialdo	09-10-2024 07:11:09 WIB
0	Nasri Zarman	09-10-2024 07:23:29 WIB
1	Tanit Prayitno	09-10-2024 07:27:16 WIB
2	I Wayan Supadiyasa	09-10-2024 07:42:07 WIB
3	Amelia Suhaili	09-10-2024 07:51:39 WIB
4	Haris Kudianto	09-10-2024 07:53:59 WIB
5	Un Latuamury	09-10-2024 08:02:42 WIB
6	Lisa Nur Azizah	09-10-2024 08:22:46 WIB

IO	NAME	TTD
7	Octo Arystho Emerson	09-10-2024 08:24:39 WIB
8	Erfandi	09-10-2024 08:27:03 WIB
9	Anang Yuliardi	09-10-2024 08:34:29 WIB
0	Nasruddin	09-10-2024 08:34:44 WIB
1	Johni Boyke Makal	09-10-2024 08:35:21 WIB
2	Yuice Sinta Enjelita Taneo	09-10-2024 08:35:26 WIB
3	Muhammad Hafidhi	09-10-2024 08:37:20 WIB
4	Sayed Nazar	09-10-2024 08:37:25 WIB
5	Muhammad Yusuf	09-10-2024 08:38:39 WIB
6	Agus Dian Purnama	09-10-2024 08:38:56 WIB
7	Gugun Kurniawan	09-10-2024 08:40:44 WIB
8	Delinar	09-10-2024 08:41:19 WIB
9	M. Herizal	09-10-2024 08:41:51 WIB

IO	NAME	TTD
0	M. Irfan Alghifari	09-10-2024 08:42:05 WIB
1	Wawaftahni	09-10-2024 08:42:42 WIB
2	Dian Rahmawati	09-10-2024 08:42:42 WIB
3	Dewani Nanziah Dalimunthe	09-10-2024 08:42:46 WIB
4	YENIWATY SILVIANY ATAUPAH	09-10-2024 08:42:49 WIB
5	MUHAMMAD ROMZUL ISLAM	09-10-2024 08:43:49 WIB
6	Imam Wahyudi	09-10-2024 08:43:52 WIB
7	Sukmawaty Amrullah	09-10-2024 08:43:55 WIB
8	Asriyadi Tanama	09-10-2024 08:44:07 WIB
9	Astri Maulania Sasti	09-10-2024 08:44:12 WIB
00	Rusyaima Farha Salsabila	09-10-2024 08:44:27 WIB
01	Hayani Imbu	09-10-2024 08:44:39 WIB
02	Rastingkem	09-10-2024 08:44:40 WIB

IO	NAME	TTD
03	Intan Irdawani	09-10-2024 08:45:27 WIB
04	Herman Kadir	09-10-2024 08:45:36 WIB
05	Dela Khoirunisa	09-10-2024 08:45:45 WIB
06	Ahmad Hatim	09-10-2024 08:46:45 WIB
07	Alfian Aronggear	09-10-2024 08:48:31 WIB
08	Nurul Fajri	09-10-2024 08:50:06 WIB
09	Rizanur	09-10-2024 08:52:40 WIB
10	STEFEN ALVES TES MAU	09-10-2024 08:52:52 WIB
11	Mulyadi	09-10-2024 08:53:21 WIB
12	Saiful Aziz	09-10-2024 08:53:27 WIB
13	Rachmad Taufik Hidayat	09-10-2024 08:54:16 WIB
14	Hamjah Diha	09-10-2024 08:55:34 WIB
15	Yudi Hardiansyah	09-10-2024 09:00:49 WIB

IO	NAME	TTD
16	Dedy Nor Ardiyanto	09-10-2024 09:01:45 WIB
17	Boihaqqi	09-10-2024 09:02:59 WIB
18	Zuel Helmi	09-10-2024 09:03:32 WIB
19	Raina Salsabilla Erlizal	09-10-2024 09:03:35 WIB
20	Junef Ismailiyanto	09-10-2024 09:04:10 WIB
21	Gerzon Tanuab	09-10-2024 09:05:46 WIB
22	Mgs Abdul Roni S.ip (RICKO)	09-10-2024 09:06:27 WIB
23	Lestari Manurung	09-10-2024 09:06:59 WIB
24	Duli Rajendra Yudadi	09-10-2024 09:08:40 WIB
25	Dhian Priyan Raga	09-10-2024 09:13:10 WIB
26	FAIZZAN ARDHI MUTAQOBB	09-10-2024 09:14:52 WIB
27	Moin Tualeka	09-10-2024 09:17:38 WIB
28	Rini Sundari	09-10-2024 09:20:35 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak
terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Pandji Budi Santosa	09-10-2024 08:30:13 WIB
	Donny Victorius	09-10-2024 08:30:49 WIB
	Aditya Linardo Putra	09-10-2024 08:31:09 WIB
	Agus Kristianto Djajusman	09-10-2024 08:31:38 WIB
	George Leonard Meijners	09-10-2024 08:33:21 WIB
	RAMON FRANKY	09-10-2024 08:33:44 WIB
	Ahmad Yani	09-10-2024 08:33:56 WIB
	Syaiful Arifin	09-10-2024 08:34:07 WIB
	Dwi Sukwanto	09-10-2024 08:34:22 WIB
0	Anang Yuliardi	09-10-2024 08:34:34 WIB

IO	NAME	TTD
1	Johni Boyke Makal	09-10-2024 08:35:28 WIB
2	Nasruddin	09-10-2024 08:35:48 WIB
3	Octo Arystho Emerson	09-10-2024 08:36:11 WIB
4	Osvaldo Gautama Putra	09-10-2024 08:36:16 WIB
5	Hidayah	09-10-2024 08:36:32 WIB
6	Muhammad Hafidhi	09-10-2024 08:37:24 WIB
7	Sayed Nazar	09-10-2024 08:37:33 WIB
8	Sucipto	09-10-2024 08:37:35 WIB
9	Agus Dian Purnama	09-10-2024 08:39:03 WIB
0	Jou Hasyim Waimahing	09-10-2024 08:39:09 WIB
1	Muhammad Yusuf	09-10-2024 08:39:24 WIB
2	Bambang Wahyu Ganindra	09-10-2024 08:39:36 WIB
3	Moch. Ainul Yaqin	09-10-2024 08:39:58 WIB

IO	NAME	TTD
4	Saiful Bahri	09-10-2024 08:40:36 WIB
5	Gugun Kurniawan	09-10-2024 08:40:55 WIB
6	Hendro Purba	09-10-2024 08:41:08 WIB
7	Tanit Prayitno	09-10-2024 08:41:11 WIB
8	Lourensius Milla Dadi	09-10-2024 08:41:19 WIB
9	Delinar	09-10-2024 08:41:23 WIB
0	M. Herizal	09-10-2024 08:41:59 WIB
1	M. Irfan Alghifari	09-10-2024 08:42:10 WIB
2	La Ode Muhammad Nikmat	09-10-2024 08:42:41 WIB
3	Dian Rahmawati	09-10-2024 08:42:47 WIB
4	Wawaftahni	09-10-2024 08:42:49 WIB
5	Dewani Nanziah Dalimunthe	09-10-2024 08:42:52 WIB
6	YENIWATY SILVIANY ATAUPAH	09-10-2024 08:43:00 WIB

IO	NAME	TTD
7	Muhammad Isnaini	09-10-2024 08:43:28 WIB
8	Ratno Timur	09-10-2024 08:43:42 WIB
9	Muallim Bahar	09-10-2024 08:43:51 WIB
0	MUHAMMAD ROMZUL ISLAM	09-10-2024 08:43:53 WIB
1	Sukmawaty Amrullah	09-10-2024 08:44:02 WIB
2	Remsey Maroi Nuniary	09-10-2024 08:44:05 WIB
3	Asriyadi Tanama	09-10-2024 08:44:12 WIB
4	Muhammad Arif Fadhlurrahman	09-10-2024 08:44:19 WIB
5	Astri Maulania Sasti	09-10-2024 08:44:23 WIB
6	GALANG REZKY PERDANA	09-10-2024 08:44:32 WIB
7	Rastingkem	09-10-2024 08:44:50 WIB
8	Hayani Imbu	09-10-2024 08:44:51 WIB
9	Imam Wahyudi	09-10-2024 08:44:53 WIB

IO	NAME	TTD
0	Yohanis Laritmas	09-10-2024 08:44:53 WIB
1	Rusyaima Farha Salsabila	09-10-2024 08:45:11 WIB
2	Erfandi	09-10-2024 08:45:30 WIB
3	Okta Heriawan	09-10-2024 08:45:32 WIB
4	Intan Irdawani	09-10-2024 08:45:33 WIB
5	Herman Kadir	09-10-2024 08:45:44 WIB
6	Zuhria Rauf	09-10-2024 08:45:48 WIB
7	Dela Khoirunisa	09-10-2024 08:45:49 WIB
8	Ahmad Hatim	09-10-2024 08:46:47 WIB
9	Jhonal Prayogo	09-10-2024 08:47:40 WIB
0	Dal Jahra	09-10-2024 08:47:49 WIB
1	Ramli Tambunan	09-10-2024 08:47:52 WIB
2	Rizky Demores Lerian	09-10-2024 08:48:05 WIB

IO	NAME	TTD
3	Memed Adiwinata	09-10-2024 08:48:28 WIB
4	Alfian Aronggear	09-10-2024 08:48:34 WIB
5	Andi Surya Wijaya	09-10-2024 08:49:10 WIB
6	Zulkarnain Muslim Asrialdo	09-10-2024 08:49:15 WIB
7	Dega Kautsar Pradana	09-10-2024 08:49:39 WIB
8	MOH,HILMAN BA	09-10-2024 08:49:50 WIB
9	Nurul Fajri	09-10-2024 08:50:12 WIB
0	Francine Widjojo	09-10-2024 08:50:47 WIB
1	Ahmad Hafiz	09-10-2024 08:51:05 WIB
2	Kamaruddin	09-10-2024 08:51:23 WIB
3	Muhamad Iqbal L. Nazim	09-10-2024 08:51:32 WIB
4	Lisa Nur Azizah	09-10-2024 08:52:03 WIB
5	Mashuri Nasution	09-10-2024 08:52:16 WIB

IO	NAME	TTD
6	Achmad Eri Arif Prayoga	09-10-2024 08:52:25 WIB
7	Muhammad Naryoko	09-10-2024 08:52:33 WIB
8	Rizanur	09-10-2024 08:52:47 WIB
9	STEFEN ALVES TES MAU	09-10-2024 08:52:59 WIB
0	Mulyadi	09-10-2024 08:53:25 WIB
1	Agustinus Bangun	09-10-2024 08:53:30 WIB
2	Saiful Aziz	09-10-2024 08:53:31 WIB
3	Amelia Suhaili	09-10-2024 08:53:41 WIB
4	Nasrullah	09-10-2024 08:53:41 WIB
5	Misbakhul Munir	09-10-2024 08:53:48 WIB
6	Rachmad Taufik Hidayat	09-10-2024 08:54:24 WIB
7	Fiili Latuamury	09-10-2024 08:55:14 WIB
8	Galih Setya Putra Dewantara	09-10-2024 08:55:31 WIB

IO	NAME	TTD
9	Hamjah Diha	09-10-2024 08:55:42 WIB
0	Adi Syahrudin Jamaluddin	09-10-2024 08:55:56 WIB
1	CUT DARA KARTIKA	09-10-2024 08:56:34 WIB
2	Haris Kudianto	09-10-2024 08:57:59 WIB
3	Yudi Hardiansyah	09-10-2024 09:01:02 WIB
4	Dedy Nor Ardiyanto	09-10-2024 09:01:49 WIB
5	Boihaqqi	09-10-2024 09:03:09 WIB
6	Bakas Manyata	09-10-2024 09:03:15 WIB
7	Zuel Helmi	09-10-2024 09:03:35 WIB
8	Akhmad Leksono	09-10-2024 09:03:39 WIB
9	Raina Salsabilla Erlizal	09-10-2024 09:03:59 WIB
00	Junef Ismailiyanto	09-10-2024 09:04:25 WIB
01	Saipul Anwar	09-10-2024 09:05:44 WIB

IO	NAME	TTD
02	Gerzon Tanuab	09-10-2024 09:05:49 WIB
03	Mgs Abdul Roni S.ip (RICKO)	09-10-2024 09:06:37 WIB
04	A. Habib Amanatullah Rahdar	09-10-2024 09:06:55 WIB
05	A. Habib Amanatullah Rahdar	09-10-2024 09:06:55 WIB
06	A. Habib Amanatullah Rahdar	09-10-2024 09:06:57 WIB
07	A. Habib Amanatullah Rahdar	09-10-2024 09:06:58 WIB
08	Lestari Manurung	09-10-2024 09:07:03 WIB
09	Sudharmono K. Lewa Yusuf	09-10-2024 09:08:44 WIB
10	Duli Rajendra Yudadi	09-10-2024 09:08:50 WIB
11	Wahyudi, SH.	09-10-2024 09:09:36 WIB
12	I Wayan Supadiyasa	09-10-2024 09:10:11 WIB
13	Denny Alan Pakiding	09-10-2024 09:11:00 WIB
14	Dhian Priyan Raga	09-10-2024 09:13:13 WIB

IO	NAME	TTD
15	Setio Pambudi	09-10-2024 09:13:16 WIB
16	Un Latuamury	09-10-2024 09:17:24 WIB
17	Moin Tualeka	09-10-2024 09:17:42 WIB
18	I Nyoman Widayana Rahayu	09-10-2024 09:20:41 WIB
19	Rini Sundari	09-10-2024 09:20:59 WIB
20	FAIZZAN ARDHI MUTAQOBB	09-10-2024 09:21:52 WIB
21	Firman Hasurungan S	09-10-2024 09:24:04 WIB
22	Yohanes Kossay	09-10-2024 09:30:23 WIB
23	Bangkit Mahanantiyo	09-10-2024 09:33:20 WIB
24	Putu Aditya Darmeindra	09-10-2024 09:34:00 WIB
25	Ranto Sibarani	09-10-2024 09:34:07 WIB
26	Esau Boma	09-10-2024 09:36:06 WIB
27	Rocky Prawira Pasaeno	09-10-2024 09:36:15 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak
Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
	Ahmad Yani	09-10-2024 10:00:38 WIB
	Lestari Manurung	09-10-2024 10:00:49 WIB
	Hayani Imbu	09-10-2024 10:01:00 WIB
	L.Lifkoi Vantar	09-10-2024 10:01:14 WIB
	Aditya Linardo Putra	09-10-2024 10:02:19 WIB
	Zuhria Rauf	09-10-2024 10:02:31 WIB
	CUT DARA KARTIKA	09-10-2024 10:02:43 WIB
	Syaiful Arifin	09-10-2024 10:02:57 WIB
	Ahmad Hafiz	09-10-2024 10:03:23 WIB
0	Moch. Ainul Yaqin	09-10-2024 10:04:09 WIB

IO	NAME	TTD
1	Hidayah	09-10-2024 10:05:00 WIB
2	Sudharmono K. Lewa Yusuf	09-10-2024 10:05:32 WIB
3	Hendro Purba	09-10-2024 10:06:42 WIB
4	Muhammad Hafidhi	09-10-2024 10:06:52 WIB
5	Rizanur	09-10-2024 10:06:56 WIB
6	Dwi Sukwanto	09-10-2024 10:06:57 WIB
7	Akhmad Leksono	09-10-2024 10:07:01 WIB
8	Remsey Maroi Nuniary	09-10-2024 10:07:01 WIB
9	Erfandi	09-10-2024 10:07:02 WIB
0	Muhammad Naryoko	09-10-2024 10:07:04 WIB
1	Ujang Priyatna	09-10-2024 10:07:07 WIB
2	Gugun Kurniawan	09-10-2024 10:07:08 WIB
3	Amelia Suhaili	09-10-2024 10:07:11 WIB

IO	NAME	TTD
4	MUHAMMAD ROMZUL ISLAM	09-10-2024 10:07:12 WIB
5	Okta Heriawan	09-10-2024 10:07:17 WIB
6	Dega Kautsar Pradana	09-10-2024 10:07:17 WIB
7	Okta Heriawan	09-10-2024 10:07:19 WIB
8	Rocky Prawira Pasaeno	09-10-2024 10:07:31 WIB
9	Pandji Budi Santosa	09-10-2024 10:07:56 WIB
0	RAMON FRANKY	09-10-2024 10:08:36 WIB
1	Dela Khoirunisa	09-10-2024 10:09:09 WIB
2	I Putu Budi Astika	09-10-2024 10:09:16 WIB
3	Annisa Amelia Putri	09-10-2024 10:09:20 WIB
4	Octo Arystho Emerson	09-10-2024 10:09:26 WIB
5	I Nyoman Widayana Rahayu	09-10-2024 10:09:44 WIB
6	I Wayan Supadiyasa	09-10-2024 10:10:08 WIB

IO	NAME	TTD
7	Misbakhul Munir	09-10-2024 10:10:38 WIB
8	Muhammad Isnaini	09-10-2024 10:10:49 WIB
9	Nurul Fajri	09-10-2024 10:11:20 WIB
0	Intan Irdawani	09-10-2024 10:11:57 WIB
1	Agus Dian Purnama	09-10-2024 10:13:01 WIB
2	Dhian Priyan Raga	09-10-2024 10:13:32 WIB
3	Hamjah Diha	09-10-2024 10:13:40 WIB
4	Rachmad Taufik Hidayat	09-10-2024 10:14:19 WIB
5	YENIWATY SILVIAN Y ATAUPAH	09-10-2024 10:14:32 WIB
6	Kamaruddin	09-10-2024 10:14:47 WIB
7	Heriyanto	09-10-2024 10:17:12 WIB
8	Yohanis Laritmas	09-10-2024 10:18:26 WIB
9	Sayed Nazar	09-10-2024 10:18:27 WIB

IO	NAME	TTD
0	Dian Rahmawati	09-10-2024 10:18:31 WIB
1	Dedy Nor Ardiyanto	09-10-2024 10:18:31 WIB
2	Dewani Nanziah Dalimunthe	09-10-2024 10:18:32 WIB
3	STEFEN ALVES TES MAU	09-10-2024 10:18:33 WIB
4	Yudi Hardiansyah	09-10-2024 10:18:41 WIB
5	Zuel Helmi	09-10-2024 10:18:42 WIB
6	Francine Widjojo	09-10-2024 10:18:44 WIB
7	Ratno Timur	09-10-2024 10:19:07 WIB
8	Haris Kudianto	09-10-2024 10:19:08 WIB
9	Ratno Timur	09-10-2024 10:19:11 WIB
0	Wahyudi, SH.	09-10-2024 10:19:22 WIB
1	Denny Alan Pakiding	09-10-2024 10:19:36 WIB
2	Bangkit Mahanantiyo	09-10-2024 10:21:10 WIB

IO	NAME	TTD
3	Ranto Sibarani	09-10-2024 10:24:28 WIB
4	Galih Setya Putra Dewantara	09-10-2024 10:25:55 WIB
5	Duli Rajendra Yudadi	09-10-2024 11:03:45 WIB
6	Rizky Demores Leria	09-10-2024 11:17:31 WIB
7	Memed Adiwinata	09-10-2024 11:18:02 WIB
8	Andi Surya Wijaya	09-10-2024 11:19:04 WIB
9	Saiful Bahri	09-10-2024 11:27:15 WIB
0	Boihaqqi	09-10-2024 11:55:21 WIB
1	Bakas Manyata	09-10-2024 11:56:51 WIB
2	Muallim Bahar	09-10-2024 12:22:31 WIB
3	Afrizal Muslim	09-10-2024 12:42:10 WIB
4	Ariyanto	09-10-2024 12:50:44 WIB
5	Ahmad Hatim	09-10-2024 12:53:53 WIB

IO	NAME	TTD
6	Fiili Latuamury	09-10-2024 13:07:53 WIB
7	Muhamad Iqbal L. Nazim	09-10-2024 13:13:50 WIB
8	Nasrullah	09-10-2024 13:25:00 WIB
9	Osvaldo Gautama Putra	09-10-2024 13:29:08 WIB
0	Astri Maulania Sasti	09-10-2024 13:35:06 WIB
1	Rusyaima Farha Salsabila	09-10-2024 13:35:24 WIB
2	George Leonard Meijners	09-10-2024 13:37:17 WIB
3	Ramli Tambunan	09-10-2024 13:56:37 WIB
4	GALANG REZKY PERDANA	09-10-2024 14:02:45 WIB
5	La Ode Muhammad Nikmat	09-10-2024 14:35:56 WIB
6	Lisa Nur Azizah	09-10-2024 14:45:48 WIB
7	Saiful Aziz	09-10-2024 14:46:01 WIB
8	Dal Jahra	09-10-2024 14:46:02 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
	Fiili Latuamury	10-10-2024 08:02:12 WIB
	Moin Tualeka	10-10-2024 08:02:48 WIB
	I Wayan Supadiyasa	10-10-2024 08:03:17 WIB
	M. Irfan Alghifari	10-10-2024 08:03:41 WIB
	Aditya Linardo Putra	10-10-2024 08:03:46 WIB
	Gugun Kurniawan	10-10-2024 08:07:35 WIB
	Sudharmono K. Lewa Yusuf	10-10-2024 08:07:38 WIB
	Alfian Aronggear	10-10-2024 08:08:26 WIB
	M. Herizal	10-10-2024 08:08:42 WIB
0	Jou Hasyim Waimahing	10-10-2024 08:09:12 WIB

IO	NAME	TTD
1	Yohanis Laritmas	10-10-2024 08:09:46 WIB
2	Ahmad Yani	10-10-2024 08:09:52 WIB
3	Imam Wahyudi	10-10-2024 08:10:19 WIB
4	Saiful Aziz	10-10-2024 08:11:02 WIB
5	Syaiful Arifin	10-10-2024 08:11:33 WIB
6	Osvaldo Gautama Putra	10-10-2024 08:11:56 WIB
7	Anang Yuliardi	10-10-2024 08:11:56 WIB
8	Yuice Sinta Enjelita Taneo	10-10-2024 08:12:00 WIB
9	Delinar	10-10-2024 08:12:11 WIB
0	Donny Victorius	10-10-2024 08:13:54 WIB
1	I Putu Budi Astika	10-10-2024 08:14:26 WIB
2	Pandji Budi Santosa	10-10-2024 08:15:11 WIB
3	Duli Rajendra Yudadi	10-10-2024 08:15:48 WIB

IO	NAME	TTD
4	Tanit Prayitno	10-10-2024 08:15:49 WIB
5	Muhammad Yusuf	10-10-2024 08:16:47 WIB
6	RAMON FRANKY	10-10-2024 08:17:04 WIB
7	Rastingkem	10-10-2024 08:17:25 WIB
8	Moch. Ainul Yaqin	10-10-2024 08:17:27 WIB
9	Eka Rahmawati	10-10-2024 08:18:07 WIB
0	Bambang Wahyu Ganindra	10-10-2024 08:18:23 WIB
1	Herman Kadir	10-10-2024 08:18:26 WIB
2	Hendro Purba	10-10-2024 08:19:58 WIB
3	MUHAMMAD ROMZUL ISLAM	10-10-2024 08:20:38 WIB
4	Adi Syahrudin Jamaluddin	10-10-2024 08:21:05 WIB
5	Ramli Tambunan	10-10-2024 08:21:30 WIB
6	Yasen	10-10-2024 08:21:35 WIB

IO	NAME	TTD
7	Ujang Priyatna	10-10-2024 08:21:53 WIB
8	Hidayah	10-10-2024 08:22:45 WIB
9	Intan Irdawani	10-10-2024 08:22:57 WIB
0	Gerzon Tanuab	10-10-2024 08:23:56 WIB
1	Nasruddin	10-10-2024 08:24:02 WIB
2	Zebulon T. Yohame	10-10-2024 08:25:00 WIB
3	Nurul Fajri	10-10-2024 08:25:05 WIB
4	Agus Sarjanto	10-10-2024 08:25:14 WIB
5	Dian Rahmawati	10-10-2024 08:25:35 WIB
6	Dewani Nanziah Dalimunthe	10-10-2024 08:26:15 WIB
7	FAIZZAN ARDHI MUTAQOBB	10-10-2024 08:26:19 WIB
8	Wawaftahni	10-10-2024 08:26:20 WIB
9	Muhammad Isnaini	10-10-2024 08:26:21 WIB

IO	NAME	TTD
0	Putu Aditya Darmeindra	10-10-2024 08:26:29 WIB
1	Lestari Manurung	10-10-2024 08:26:31 WIB
2	Setio Pambudi	10-10-2024 08:26:40 WIB
3	Agus Dian Purnama	10-10-2024 08:26:45 WIB
4	CUT DARA KARTIKA	10-10-2024 08:26:50 WIB
5	I Nyoman Widayana Rahayu	10-10-2024 08:27:11 WIB
6	Hayani Imbu	10-10-2024 08:27:41 WIB
7	Muhammad Naryoko	10-10-2024 08:28:42 WIB
8	Haris Kudianto	10-10-2024 08:28:50 WIB
9	Amin Fahrudin	10-10-2024 08:29:18 WIB
0	Zuhria Rauf	10-10-2024 08:29:23 WIB
1	Dal Jahra	10-10-2024 08:30:49 WIB
2	Saiful Bahri	10-10-2024 08:30:53 WIB

IO	NAME	TTD
3	Lourensius Milla Dadi	10-10-2024 08:30:54 WIB
4	Muhammad Hafidhi	10-10-2024 08:33:18 WIB
5	Misbakhul Munir	10-10-2024 08:33:52 WIB
6	Ahmad Hatim	10-10-2024 08:34:17 WIB
7	Asriyadi Tanama	10-10-2024 08:34:29 WIB
8	Okta Heriawan	10-10-2024 08:34:43 WIB
9	Sukmawaty Amrullah	10-10-2024 08:35:01 WIB
0	Agus Kristianto Djajusman	10-10-2024 08:35:05 WIB
1	Agus Supriyanto	10-10-2024 08:35:25 WIB
2	Ahmad Hafiz	10-10-2024 08:35:31 WIB
3	Jhonal Prayogo	10-10-2024 08:35:45 WIB
4	Francine Widjojo	10-10-2024 08:36:20 WIB
5	Dhian Priyan Raga	10-10-2024 08:36:32 WIB

IO	NAME	TTD
6	Dega Kautsar Pradana	10-10-2024 08:36:47 WIB
7	Rizky Demores Lerian	10-10-2024 08:36:54 WIB
8	Dwi Sukwanto	10-10-2024 08:36:56 WIB
9	Rusyaima Farha Salsabila	10-10-2024 08:37:05 WIB
0	Boihaqqi	10-10-2024 08:37:12 WIB
1	Memed Adiwinata	10-10-2024 08:37:20 WIB
2	Achmad Eri Arif Prayoga	10-10-2024 08:37:24 WIB
3	Yudi Hardiansyah	10-10-2024 08:37:32 WIB
4	Galih Setya Putra Dewantara	10-10-2024 08:37:47 WIB
5	Astri Maulania Sasti	10-10-2024 08:37:52 WIB
6	Andi Surya Wijaya	10-10-2024 08:38:04 WIB
7	YENIWATY SILVIANY ATAUPAH	10-10-2024 08:38:11 WIB
8	Rudy Imanuel	10-10-2024 08:38:12 WIB

IO	NAME	TTD
9	Amelia Suhaili	10-10-2024 08:38:21 WIB
0	Junef Ismailiyanto	10-10-2024 08:39:28 WIB
1	Muhamad Iqbal L. Nazim	10-10-2024 08:40:37 WIB
2	Tabroni Bin M. Cahya	10-10-2024 08:41:33 WIB
3	Salman Alfarisi Simanjuntak	10-10-2024 08:41:39 WIB
4	Akhmad Leksono	10-10-2024 08:42:02 WIB
5	Muhammad Yuntri	10-10-2024 08:42:09 WIB
6	Muhammad Arif Fadhlurrahman	10-10-2024 08:42:15 WIB
7	Ratno Timur	10-10-2024 08:43:13 WIB
8	Dwi Tjahyo Soewarsono	10-10-2024 08:44:06 WIB
9	Zulkarnain Muslim Asrialdo	10-10-2024 08:44:18 WIB
00	Muallim Bahar	10-10-2024 08:44:43 WIB
01	Mgs Abdul Roni S.ip (RICKO)	10-10-2024 08:46:45 WIB

IO	NAME	TTD
02	Mashuri Nasution	10-10-2024 08:47:24 WIB
03	Heriyanto	10-10-2024 08:47:49 WIB
04	Hamjah Diha	10-10-2024 08:48:24 WIB
05	Agustinus Bangun	10-10-2024 08:48:28 WIB
06	Dedy Nor Ardiyanto	10-10-2024 08:48:41 WIB
07	Sayed Nazar	10-10-2024 08:48:44 WIB
08	Remsey Maroi Nuniary	10-10-2024 08:48:46 WIB
09	Tiopan Tarigan	10-10-2024 08:50:50 WIB
10	Denny Alan Pakiding	10-10-2024 08:52:49 WIB
11	Bakas Manyata	10-10-2024 08:54:03 WIB
12	Harry J. Hasman	10-10-2024 08:54:52 WIB
13	Dela Khoirunisa	10-10-2024 08:56:25 WIB
14	Ariyanto	10-10-2024 08:57:56 WIB

IO	NAME	TTD
15	L.Lifkoi Vantar	10-10-2024 08:58:56 WIB
16	Kamaruddin	10-10-2024 08:59:01 WIB
17	GALANG REZKY PERDANA	10-10-2024 09:05:13 WIB
18	Zuel Helmi	10-10-2024 09:05:54 WIB
19	George Leonard Meijners	10-10-2024 09:05:54 WIB
20	Yohanes Kossay	10-10-2024 09:07:44 WIB
21	Rachmad Taufik Hidayat	10-10-2024 09:08:50 WIB
22	Johni Boyke Makal	10-10-2024 09:10:29 WIB
23	Mulyadi	10-10-2024 09:10:31 WIB
24	Esau Boma	10-10-2024 09:12:30 WIB
25	Ranto Sibarani	10-10-2024 09:13:17 WIB
26	Raina Salsabilla Erlizal	10-10-2024 09:14:48 WIB
27	Nasri Zarman	10-10-2024 09:22:28 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Okta Heriawan	10-10-2024 10:30:05 WIB
	Tabroni Bin M. Cahya	10-10-2024 10:30:15 WIB
	RAMON FRANKY	10-10-2024 10:31:29 WIB
	Aditya Linardo Putra	10-10-2024 10:32:15 WIB
	Zebulon T. Yohame	10-10-2024 10:32:39 WIB
	Dela Khoirunisa	10-10-2024 10:32:43 WIB
	Agus Sarjanto	10-10-2024 10:32:57 WIB
	Ujang Priyatna	10-10-2024 10:33:28 WIB
	Musliadi	10-10-2024 10:34:51 WIB
0	Sucipto	10-10-2024 10:35:19 WIB
1	Hamjah Diha	10-10-2024 10:35:23 WIB

IO	NAME	TTD
2	Muhammad Isnaini	10-10-2024 10:36:23 WIB
3	Syaiful Arifin	10-10-2024 10:36:30 WIB
4	Jhonal Prayogo	10-10-2024 10:37:35 WIB
5	Ahmad Yani	10-10-2024 10:37:42 WIB
6	Firman Hasurungan S	10-10-2024 10:41:23 WIB
7	Rizanur	10-10-2024 10:42:36 WIB
8	MOH,HILMAN BA	10-10-2024 10:44:13 WIB
9	I Nyoman Widayana Rahayu	10-10-2024 10:44:53 WIB
0	Bakas Manyata	10-10-2024 10:47:17 WIB
1	Anang Yuliardi	10-10-2024 10:47:30 WIB
2	La Ode Muhammad Nikmat	10-10-2024 10:47:30 WIB
3	GALANG REZKY PERDANA	10-10-2024 10:48:52 WIB
4	Andi Surya Wijaya	10-10-2024 10:49:03 WIB

IO	NAME	TTD
5	Intan Irdawani	10-10-2024 10:49:17 WIB
6	Denny Alan Pakiding	10-10-2024 10:49:38 WIB
7	Ahmad Hafiz	10-10-2024 10:49:47 WIB
8	Esau Boma	10-10-2024 10:50:03 WIB
9	Dwi Sukwanto	10-10-2024 10:50:28 WIB
0	Osvaldo Gautama Putra	10-10-2024 10:50:33 WIB
1	Memed Adiwinata	10-10-2024 10:50:46 WIB
2	Dwi Tjahyo Soewarsono	10-10-2024 10:51:36 WIB
3	M. Herizal	10-10-2024 10:51:40 WIB
4	Wahyudi, SH.	10-10-2024 10:51:58 WIB
5	Nasri Zarman	10-10-2024 10:52:01 WIB
6	Lourensius Milla Dadi	10-10-2024 10:52:11 WIB
7	Mulyadi	10-10-2024 10:52:20 WIB

IO	NAME	TTD
8	Ahmad Hatim	10-10-2024 10:52:32 WIB
9	George Leonard Meijners	10-10-2024 10:52:37 WIB
0	Rizky Demores Lorian	10-10-2024 10:52:38 WIB
1	Astri Maulania Sasti	10-10-2024 10:52:46 WIB
2	Hendro Purba	10-10-2024 10:52:57 WIB
3	Haris Kudianto	10-10-2024 10:53:00 WIB
4	Herman Kadir	10-10-2024 10:53:32 WIB
5	Tanit Prayitno	10-10-2024 10:53:44 WIB
6	Saiful Bahri	10-10-2024 10:54:13 WIB
7	Achmad Eri Arif Prayoga	10-10-2024 10:54:15 WIB
8	Agustinus Bangun	10-10-2024 10:55:17 WIB
9	A. Habib Amanatullah Rahdar	10-10-2024 10:55:21 WIB
0	Un Latuamury	10-10-2024 10:55:22 WIB

IO	NAME	TTD
1	Asriyadi Tanama	10-10-2024 10:56:24 WIB
2	Erfandi	10-10-2024 10:56:28 WIB
3	Putu Aditya Darmeindra	10-10-2024 10:56:35 WIB
4	Muhammad Naryoko	10-10-2024 10:56:44 WIB
5	Gerzon Tanuab	10-10-2024 10:56:54 WIB
6	Salman Alfarisi Simanjuntak	10-10-2024 10:56:59 WIB
7	Hidayah	10-10-2024 10:57:00 WIB
8	Kamaruddin	10-10-2024 10:57:21 WIB
9	Yohanes Kossay	10-10-2024 10:57:31 WIB
0	Akhmad Leksono	10-10-2024 10:57:57 WIB
1	Tiopan Tarigan	10-10-2024 10:58:22 WIB
2	Amelia Suhaili	10-10-2024 10:58:38 WIB
3	Muhammad Yuntri	10-10-2024 10:59:11 WIB

IO	NAME	TTD
4	Alfian Aronggear	10-10-2024 10:59:24 WIB
5	Pandji Budi Santosa	10-10-2024 11:00:10 WIB
6	Dhian Priyan Raga	10-10-2024 11:02:01 WIB
7	Hayani Imbu	10-10-2024 11:02:33 WIB
8	Yasen	10-10-2024 11:03:06 WIB
9	Sayed Nazar	10-10-2024 11:03:16 WIB
0	Saipul Anwar	10-10-2024 11:03:26 WIB
1	Duli Rajendra Yudadi	10-10-2024 11:03:27 WIB
2	Rudy Imanuel	10-10-2024 11:06:33 WIB
3	Johni Boyke Makal	10-10-2024 11:07:03 WIB
4	M. Irfan Alghifari	10-10-2024 11:08:40 WIB
5	Zulkarnain Muslim Asrialdo	10-10-2024 11:10:06 WIB
6	Lisa Nur Azizah	10-10-2024 11:10:30 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT DIUNDUH
MELALUI AKUN SIMULTAN PESERTA
DENGAN LOGIN DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username: Puskik_MK

password: puskikmkri9

Username :
GK3_PUSDIKLAT

password : **pusdikmkri**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Tugas Individu
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang telah ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan Pemohon dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke *e-mail*:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Rafael Nadal_Permohonan Pemohon

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_ Rafael Nadal _ Permohonan Pemohon



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI

Username:

Password:

1

4-2-1

ABDULKADIR

PESERTA

NO
REGISTRASI
PESERTA

KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
9 Oktober 2024**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



*** Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke Daftar
Alat Bukti**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK ANGKATAN III

Narasumber : Abdul Ghoffar

NO	NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	15	FAIZZAN ARDHI MUTAQOBB, S.IKOM	86	86	86	86
2	16	Ramli Tambunan, S.H., M.H.	88	88	88	88
3	24	M. Herizal, SP.,M.Si	89	89	89	89
4	25	Alfian Aronggear, S.H.	86	86	86	86
5	29	Yohanes Kossay, AMd. Pi.	89	89	89	89
6	31	Ahmad Hafiz, S.H.	89	89	89	89
7	32	Zuhria Rauf, S.H.	86	86	86	86
8	35	Agus Dian Purnama, S.E.	89	89	89	89
9	45	Un Latuamury, S.H., CPM	79	79	79	79
10	46	Muallim Bahar, SH.	90	90	90	90
11	47	Agus Kristianto Djajusman, S.H.	85	85	85	85
12	48	Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.	0	0	0	0
13	50	Osvaldo Gautama Putra, S.H. M.Kn	89	89	89	89
14	52	Eka Rahmawati	78	78	78	78
15	53	Achmad Eri Arif Prayoga, S.H.	0	0	0	0
16	57	Johny B. Latuheru, S.H.	89	89	89	89
17	63	Nurul Fajri, S.Sos., S.H., M.H	90	90	90	90
18	64	Putu Aditya Darmeindra, S.H.	80	80	80	80
19	65	Kamaruddin, S.H., M.H.	87	87	87	87
20	66	Bakas Manyata, S.H., M.Kn.	90	90	90	90
21	69	Moch. Ainul Yaqin, SHI., MH.	90	90	90	90
22	70	Imam Wahyudi, S.H., M.H. CM	87	87	87	87
23	73	Donny Victorius, S.E., S.H., M.H.	85	85	85	85
24	74	Agustinus Bangun, S.H., M.H.	80	80	80	80
25	75	Hamili, S.P.	85	85	85	85
26	78	Harry J. Hasman, S.H	0	0	0	0
27	79	Ahmad Hatim, S.H	90	90	90	90
28	81	Dr. Junef Ismailiyanto	90	90	90	90

29	82	Bambang Wahyu Ganindra, SH. MH.	90	90	90	90
30	89	Zulkamain Muslim Asrialdo, S.H.I	88	88	88	88
31	90	Nasruddin, S.H.	82	82	82	82
32	91	YENIWATY SILVIANY ATAUPAH, S.H	89	89	89	89
33	95	Rastingkem, S.H.	75	75	75	75
34	97	Asriyadi Tanama, S.H	90	90	90	90
35	98	Saipul Anwar, S.H.	80	80	80	80
36	99	Jhonal Prayogo, S.Sos., M.H.	75	75	75	75
37	116	Pandji Budi Santosa, S.H.	89	89	89	89
38	113	MOH,HILMAN BA, S.H.	73	73	73	73
39			0	0	0	0
40			0	0	0	0
41			0	0	0	0



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI PARTAI POLITIK ANGKATAN III

Narasumber : Luthfi Widagdo Eddyono

NO	NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	27	Rizanur	80	80	80	80
2	39	Muhammad Hafidhi, S.E.	80	78	80	78.8
3	41	Sayed Nazar, S.Th.I.	80	81	80	80.6
4	60	Dhian Priyan Raga, S.Pd.	80	77	80	78.2
5	87	Misbakhul Munir, S.Pd, MM,	80	77	80	78.2
6	103	Amelia Suhaili, S.H., M.H., CPHM., CPArb.	80	79	80	79.4
7	108	Moin Tualeka, S.H	80	78	80	78.8
8	112	Muhamad Iqbal L. Nazim, S.H.	80	81	80	80.6
9	114	Salman Alfarsi Simanjuntak, S.H., M.H.	80	80	80	80
10	115	Dwi Sukwanto	80	74	80	76.4
11	118	Mashuri Nasution, S.H.	80	80	80	80
12	119	Francine Widjojo, S.H., M.H.	80	77	80	78.2
13	123	Erfandi, SH. MH.	80	81	80	80.6
14	125	Afrizal Muslim, S.H., M.M.	0	0	0	0
15	126	Okta Heriawan, S.H., M.H.	80	80	80	80
16	127	Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si. (Han)	80	83	80	81.8
17	128	Dela Khoirunisa, S.H., M.H.	80	82	80	81.2
18	130	Muhammad Naryoko, M.S.I	80	80	80	80
19	131	Akhmad Leksono, S.H.	80	77	80	78.2
20	133	Marlan Ifantri Lase	0	0	0	0
21	134	Gugun Kurniawan, S.H.	80	74	80	76.4
22	135	Agus Supriyanto, S.H.	0	0	0	0
23	136	Dr. Ariyanto, S.H., M.H.	80	78	80	78.8

24	137	Aditya Linardo Putra, S.H., M.H.	80	80	80	80
25	138	Muhammad Yuntri, S.H., M.H.	0	0	0	0
26	139	Rocky Prawira Pasaeno, S.H., M.H.	80	81	80	80.6
27	140	Heriyanto, S.H.	80	74	80	76.4
28	141	L.Lifkoi Vantar, Sh,M.Hum	80	80	80	80
29	142	Rudy Imanuel, S.H MH	80	77	80	78.2
30	143	Tiopan Tarigan, S.H MH	80	77	80	78.2
31	144	Ujang Priyatna, S.H	0	0	0	0
32	145	MUHAMMAD ROMZUL ISLAM, S.H.	80	81	80	80.6
33	146	Zebulon T. Yohame, S.T.	0	0	0	0
34	147	Tabroni Bin M. Cahya	80	80	80	80
35	148	Octo Arystho Emerson, S.H.	0	0	0	0
36	149	Remsey Maroi Nuniary, S.H.	80	77	80	78.2
37	150	Said Salahudin, S.H., M.H.	0	0	0	0
38	151	Yasen, S.H.	80	80	80	80
39			0	0	0	0
40			0	0	0	0
41			0	0	0	0

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI PARTAI POLITIK ANGKATAN III

NAMA NARASUMBER : Abdul Ghoffar

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1.	Secara umum, peserta sudah bisa memahami bagaimana membuat Permohonan Pemohon. Hal demikian, bisa dilihat dari tugas untuk membuat Permohonan Pemohon yang disampaikan. Dari semua peserta, kesemuanya telah mengirimkan tugasnya secara tepat waktu. Meski demikian, beberapa dari mereka masih terdapat yang belum memahami secara utuh. Karenanya, beberapa hal yang ditemukan sebagai berikut:
2.	Pertama, masih terdapat beberapa peserta yang membiarkan lembar <i>template</i> Permohonan Pemohon di beberapa titik dibiarkan kosong, meski pada beberapa halaman berikutnya sudah dijawab dengan bagus.
3.	Kedua, masih terdapat peserta yang masih belum memahami bagaimana menguraikan persoalan (soal) ke dalam pokok permohonan.
4.	Ketiga, masih terdapat peserta yang Permohonan Pemohon-nya minim argumentasi hukum. Namun demikian, hal ini bisa dimaklumi karena waktu pembuatan permohonan ini sangat pendek sehingga bisa dipastikan peserta kurang bisa menjelaskan secara rinci.

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024
BAGI PARTAI POLITIK ANGKATAN III

NAMA NARASUMBER : Luthfi Widagdo

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta sungguh antusias mengikuti kegiatan.
2	Peserta butuh pengayaan lebih lanjut untuk membedakan keterangan eksepsi dan pokok permohonan.
3	
4	
5	



Tata Tertib Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024



Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik



Tepat waktu dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi



Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**



Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**



Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas



Tidak merokok dalam kamar



Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB



Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB



Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia yang bertugas di Pusdik



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



officialMKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Data Peserta Registrasi
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik Angkatan III

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	INSTANSI	JABATAN	KAB/KOT	ASAL
1	Delinar, S.I.Kom.	Perempuan	S1	DPP HANURA	Staff Bidang Organisasi	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
2	Dr Muhammad Yusuf, S.H., M.H.	Laki-laki	S3	DPW PPP Papua	Anggota	KAB. JAYAPURA	PAPUA
3	Tanit Prayitno, S.H, C.CL	Laki-laki	S1	DPW Kalimantan Tengah Partai PERINDO	Sekretaris DPW	KOTA PALANGKARAYA	KALIMANTAN TENGAH
4	Hendro Purba, S.H.	Laki-laki	S1	DPW NTB Partai PERINDO	Wakil Ketua DPW Bara Perindo	KOTA MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT
5	Sukmawaty Amrullah, SH.	Perempuan	S1	DPW PPP Papua Pegunungan	Anggota	KOTA JAYAPURA	PAPUA
6	Johni Boyke Makal	Laki-laki	SMA	Garuda DPD Papua Selatan	Ketua DPD	KAB. MERAUKE	PAPUA SELATAN
7	Dian Rahmawati	Perempuan	SMA	DPP Partai Ummat	Team Pilkada Pusat	KOTA JAKARTA SELATAN	D.K.I. JAKARTA
8	Setio Pambudi	Laki-laki	S1	DPW Partai Ummat Jawa Tengah	Sekretaris Wilayah Partai Ummat DPW Jawa Tengah	KOTA SURAKARTA	JAWA TENGAH
9	Dewani Nanziah Dalimunthe	Perempuan	S1	DPP Partai Ummat	Team Pilkada Pusat	KOTA MEDAN	SUMATERA UTARA
10	CUT DARA KARTIKA, S.H	Perempuan	S1	DPW Partai Ummat Aceh	Wakil Sekretaris DPW Aceh	KAB. ACEH BARAT	ACEH
11	RAMON FRANKY, S.H.	Laki-laki	S1	Kepulauan Riau PSI	Biro Advokasi	KOTA BATAM	KEPULAUAN RIAU
12	Ratno Timur, S.H	Laki-laki	S1	LBH Gelora Indonesia Partai Gelora	anggota	KAB. BOGOR	JAWA BARAT
13	Raina Salsabilla Erlizal, S.H	Perempuan	S1	DPW Jawa Barat IPBB	PAC Bekasi Selatan DPC Bekasi	KOTA BEKASI	JAWA BARAT
14	Muhammad Isnaini, S.H	Laki-laki	S1	DPW NTB PARTAI GELORA	Tim Hukum	KAB. SUMBAWA	NUSA TENGGARA BARAT
15	FAIZZAN ARDHI MUTAQOBB, S.IKOM	Laki-laki	S1	DPW Jateng PARTAI UMMAT	Wakil Ketua DPW Jateng	KOTA SEMARANG	JAWA TENGAH
16	Ramli Tambunan, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPW Sumatera Utara Partai PERINDO	Ketua DPW LBH Perindo Sumatera Utara	KOTA MEDAN	SUMATERA UTARA
17	Zuel Helmi	Laki-laki	S1	DPP Partai SIRA	Wasekjen II	KOTA BANDA ACEH	ACEH
18	Mulyadi	Laki-laki	S1	DPP Partai SIRA	Ketua II	KOTA BANDA ACEH	ACEH
19	Dedy Nor Ardiyanto, S.H	Laki-laki	S1	DPD Provinsi Jawa Tengah Hanura	Wakil Sekretaris	KAB. JEPARA	JAWA TENGAH
20	Syaiful Arifin, S.H.	Laki-laki	S1	DPW PARTAI GELORA PROVINSI SUMATERA UTARA	SEKRETARIS WILAYAH	KOTA MEDAN	SUMATERA UTARA
21	Ahmad Yani, S.H	Laki-laki	S1	DPW Kalimantan Timur Partai Gelora	Anggota	KOTA BALIKPAPAN	KALIMANTAN TIMUR

22	George Leonard Meijners, S.H.	Laki-laki	S3	DPW Partai Garuda	Wakil Ketua DPP	KOTA JAYAPURA	PAPUA
23	Esau Boma, S.T.	Laki-laki	S1	DPD Papua Tengah Partai Garuda	Anggota	KAB. PANIAI	PAPUA TENGAH
24	M. Herizal, SP.,M.Si	Laki-laki	S2	DPP Partai SIRA	Ketua IV	KAB. ACEH UTARA	ACEH
25	Alfian Aronggear, S.H.	Laki-laki	S1	DPD Papua GARUDA	Anggota	KOTA JAYAPURA	PAPUA
26	Nasri Zarman, SE.,MM	Laki-laki	S2	DPP Partai SIRA	Wasekjen XIII	KAB. ACEH BESAR	ACEH
27	Rizanur	Laki-laki	S1	DPP Partai SIRA	Ka. PPID	KAB. ACEH BESAR	ACEH
28	Ranto Sibarani, S.H.	Laki-laki	S1	DPW PSI Prov. Sumatera Utara	Wakil Ketua Bidang Hukum	KOTA MEDAN	SUMATERA UTARA
29	Yohanes Kossay, AMd. Pi.	Laki-laki	S1	DPD Partai Garuda Papua Barat Daya	Wakil ketua II DPD	Kota Sorong	PAPUA BARAT DAYA
30	Anang Yuliardi, S.H	Laki-laki	S1	DPP Partai Bulan Bintang	Mahkamah Partai	KOTA JAKARTA BARAT	D.K.I. JAKARTA
31	Ahmad Hafiz, S.H.	Laki-laki	S1	DPN Partai Gelora/LBH Gelora Indonesia	Ketua LBH	KEPULAUAN SERIBU	D.K.I. JAKARTA
32	Zuhria Rauf, S.H.	Perempuan	S1	DPW Gorontalo Partai Gelora	Kabid Hukum	KOTA GORONTALO	GORONTALO
33	Adv. Boihaqqi, SH.I	Laki-laki	S1	PAS ACEH	Wakil Ketua	KAB. PIDIE JAYA	ACEH
34	I Wayan Supadiyasa, S.Sos., S.H., M.Si.	Laki-laki	S2	Ketua LBH Prov. Sulawesi Tengah DPW Partai PKN		KOTA PALU	SULAWESI TENGAH
35	Agus Dian Purnama, S.E.	Laki-laki	S1	MPW Aceh Timur	Koordinator Saksi	KAB. ACEH TIMUR	ACEH
36	Ir. Rachmad Taufik Hidayat	Laki-laki	S1	DPW Jawa Timur PPP	Anggota	KOTA SURABAYA	JAWA TIMUR
37	Wahyudi, SH.	Laki-laki	S1	Anggota LBH Pimnas PKN	Dir. Litigasi LBH PIMNAS PKN	KOTA DEPOK	JAWA BARAT
38	Adv. Intan Irdawani, S.H.	Perempuan	S1	MPP Partai PAS Aceh	Bidang Hukum	KAB. ACEH TIMUR	ACEH
39	Muhammad Hafidhi, S.E.	Laki-laki	S1	MPP Partai PAS Aceh	Wakil Sekretaris	KOTA LHOKSEUMAWE	ACEH
40	Bangkit Mahanantiyo, SH.MH	Laki-laki	S2	DPD PSI Semarang	Ketua DPD Kota Semarang	KOTA SEMARANG	JAWA TENGAH
41	Sayed Nazar, S.Th.I.	Perempuan	S1	MPP Partai PAS Aceh	Ketua VI MPP PAS Aceh	KAB. PIDIE JAYA	ACEH
42	Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP PPP	Sekretaris LABH	KAB. BEKASI	JAWA BARAT
43	Sudharmono K. Lewa Yusuf, S.H.	Laki-laki	S1	Anggota LBH Pimnas DPP Partai PKN	anggota	KAB. BEKASI	JAWA BARAT
44	Fiili Latuamury, S.H.	Laki-laki	S1	Anggota LBH Pimnas Partai PKN	Anggota	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
45	Un Latuamury, S.H., CPM	Perempuan	S1	LBH Pimnas PKN	Anggota	KOTA DEPOK	JAWA BARAT
46	Muallim Bahar, SH.	Laki-laki	S1	DPP PPP	Anggota LABH	-	-
47	Agus Kristianto Djajusman, S.H.	Laki-laki	S1	DPP	Tim Hukum DPP PERINDO	KOTA DEPOK	JAWA BARAT
48	Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Wasekjen DPP	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
49	Denny Alan Pakiding, S.H.	Laki-laki	S1	DPP PSI	LBH PSI	KOTA JAKARTA TIMUR	D.K.I. JAKARTA
50	Osvaldo Gautama Putra, S.H. M.Kn	Laki-laki	S2	DPP Partai PERINDO	Tim Hukum DPP	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA

51	Gerzon Tanuab, S.H.	Laki-laki	S1	DPW NTT Partai PERINDO	Wakil Ketua DPW	KOTA KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR
52	Eka Rahmawati	Perempuan	S2	Anggota LBH Pimnas PKN		KOTA DEPOK	JAWA BARAT
53	Achmad Eri Arif Prayoga, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Garuda	Anggota	KAB. BEKASI	JAWA BARAT
54	Astri Maulania Sasti, S.M.	Perempuan	S1	DPP Partai Garuda	Anggota	KOTA JAKARTA TIMUR	D.K.I. JAKARTA
55	Galih Setya Putra Dewantara	Laki-laki	S1	DPP Partai Garuda	Anggota	KOTA JAKARTA TIMUR	D.K.I. JAKARTA
56	Yudi Hardiansyah, S.H	Laki-laki	S1	DPW Jawa Timur	Ketua LABH Bulan Bintang Jawa Timur	KOTA MALANG	JAWA TIMUR
57	Johny B. Latuheru, S.H.	Laki-laki	S1	DPP PKN		KOTA BEKASI	JAWA BARAT
58	Rusyaima Farha Salsabila, S.M.	Perempuan	S1	DPP Partai Garuda	Anggota	KOTA JAKARTA TIMUR	D.K.I. JAKARTA
59	Annisa Amelia Putri	Perempuan	S1	DPP Partai Garuda	Anggota	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
60	Dhian Priyan Raga, S.Pd.	Laki-laki	S1	DPP Partai Garuda	Anggota	KOTA JAKARTA UTARA	D.K.I. JAKARTA
61	Haris Kudianto, S.E.	Laki-laki	S1	DPW Jawa Timur PBB	Wakil Bendahara DPW Jawa Timur	KOTA SURABAYA	JAWA TIMUR
62	STEFEN ALVES TES MAU, SH.,M.Kn	Laki-laki	S2	DPC KABUPATEN BELU PARTAI HANURA	Bidang hukum	KAB. B E L U	NUSA TENGGARA TIMUR
63	Nurul Fajri, S.Sos., S.H., M.H	Perempuan	S2	DPP HANURA	LBH PARTAI DPP HANURA	KOTA JAKARTA SELATAN	D.K.I. JAKARTA
64	Putu Aditya Darmeindra, S.H.	Laki-laki	S1	Anggota LBH Pimnas PKN		KOTA DENPASAR	BALI
65	Kamaruddin, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP PSI	Tim Hukum DPP	KOTA JAKARTA TIMUR	D.K.I. JAKARTA
66	Bakas Manyata, S.H., M.Kn.	Laki-laki	S2	DPP PPP	Anggota LABH	KOTA JAKARTA TIMUR	D.K.I. JAKARTA
67	I Nyoman Widayana Rahayu, S.H.	Laki-laki	S1	Anggota LBH Pimnas PKN		KAB. BADUNG	BALI
68	I Putu Budi Astika, S.H.	Laki-laki	S1	Anggota LBH Pimnas PKN		KOTA DENPASAR	BALI
69	Moch. Ainul Yaqin, SHI., MH.	Laki-laki	S2	DPP PPP	Anggota LABH	KAB. SIDOARJO	JAWA TIMUR
70	Imam Wahyudi, S.H., M.H. CM	Laki-laki	S2	DPW Jawa Timur Partai Ummat	Ketua Bidang Hukum dan HAM DPW Jatim	KOTA SURABAYA	JAWA TIMUR
71	Duli Rajendra Yudadi	Laki-laki	S3	DPW Jabar Partai UMMAT	Wakil Ketua DPW Jabar	KOTA BANDUNG	JAWA BARAT
72	Mgs Abdul Roni S.ip (RICKO), S.IP	Laki-laki	S1	DPW Jabar Partai UMMAT	Wakil Ketua DPW Jabar	KOTA BANDUNG	JAWA BARAT
73	Donny Victorius, S.E., S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPW Jawa Timur	DPW PSI Jawa Timur	KOTA MALANG	JAWA TIMUR
74	Agustinus Bangun, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPW PSI SULAWESI SELATAN	Bendahara DPD PSI Kota Makassar	KOTA MAKASSAR	SULAWESI SELATAN
75	Hamili, S.P.	Laki-laki	S1	DPW PBB Sulawesi Tenggara	Ketua DPC PBB Kota Kendari	KOTA KENDARI	SULAWESI TENGGARA
76	Hayani Imbu, S.Sos.	Laki-laki	S1	DPW PKN Sulawesi Tenggara		KOTA KENDARI	SULAWESI TENGGARA

77	Yoice Sinta Enjelita Taneo, S.H.	Perempuan	S1	Pengurus Partai Buruh Exco Provinsi NTT	Anggota	KAB. KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR
78	Harry J. Hasman, S.H	Laki-laki	S1	DPP	LBH PARTAI HANURA	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
79	Ahmad Hatim, S.H	Laki-laki	S1	DPP PBB	Anggota LABH Bulan Bintang	-	-
80	GALANG REZKY PERDANA	Laki-laki	S1	PARTAI BKN		KOTA KENDARI	SULAWESI TENGGARA
81	Dr. Junef Ismailiyanto	Laki-laki	S3	DPN Partai Gelora	Wasekjend	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
82	Bambang Wahyu Ganindra, SH. MH.	Laki-laki	S2	DPP PPP	Anggota LABH	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
83	Saiful Bahri, S.T, M.AP	Laki-laki	S2	DPN Partai Gelora Indonesia	Biro Administrasi - Setjen	KOTA JAKARTA TIMUR	D.K.I. JAKARTA
84	Saiful Aziz	Laki-laki	S1	DPN Partai Gelora		KOTA JAKARTA SELATAN	D.K.I. JAKARTA
85	La Ode Muhammad Nikmat, Z. SE. M.Si	Laki-laki	S2	DPN Partai Gelora	Anggota	KOTA JAKARTA TIMUR	D.K.I. JAKARTA
86	Amin Fahrudin, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPN Partai Gelora	Ketua Bid. Hukum	KAB. BOGOR	JAWA BARAT
87	Misbakhul Munir, S.Pd.I., MM,	Laki-laki	S2	DPW Jawa Timur Partai Gelora	Sekretaris Wilayah	KAB. SIDOARJO	JAWA TIMUR
88	Yohanis Laritmas, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	Maluku Partai Buruh	Ketua Bidang Exco Provinsi	KOTA AMBON	MALUKU
89	Zulkarnain Muslim Asrialdo, S.H.I	Laki-laki	S1	DPW Papua PBB	Ketua DPW Papua	KOTA JAYAPURA	PAPUA
90	Nasruddin, S.H.	Laki-laki	S1	DPD Provinsi Banten HANURA	Wakil Ketua Bid. Organisasi	KOTA SERANG	BANTEN
91	YENIWATY SILVIANY ATAUPAH, S.H	Perempuan	S1	DPD NTT PARTAI HANURA	BIDANG HUKUM DPC KABUPATEN BELU PROPINSI NTT	KAB. B E L U	NUSA TENGGARA TIMUR
92	Rini Sundari, S.H.	Perempuan	S1	DPD Provinsi Banten HANURA	Ketua Srikandi DPD Banten	KOTA SERANG	BANTEN
93	Firman Hasurungan S, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP HANURA	LBH PARTAI HANURA	KOTA JAKARTA TIMUR	D.K.I. JAKARTA
94	Sucipto, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	Partai Buruh Exco Pusat	Pengurus Exco	KOTA DEPOK	JAWA BARAT
95	Rastingkem, S.H.	Perempuan	S1	Partai Buruh Exco Pusat		KOTA DEPOK	JAWA BARAT
96	Dr. Herman Kadir, S.H., M.Humm.	Laki-laki	S3	DPP Partai Ummat	Mahkamah Partai	KOTA BEKASI	JAWA BARAT
97	Asriyadi Tanama, S.H	Laki-laki	S1	DPP PARTAI BULAN BINTANG	Kadiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa LABH Bulan Bintang	KAB. BOGOR	JAWA BARAT
98	Saipul Anwar, S.H.	Laki-laki	S1	Partai Buruh Exco Pusat	Pengurus Exco Pusat	KOTA JAKARTA TIMUR	D.K.I. JAKARTA
99	Jhonal Prayogo, S.Sos., M.H.	Laki-laki	S1	Pengurus Exco DPW Konawe Partai Buruh		KOTA KENDARI	SULAWESI TENGGARA
100	Dal Jahra, S.Mat	Laki-laki	S1	DPW PBB PAPUA	Admin/Legal Officer DPW Papua	KOTA JAYAPURA	PAPUA
101	Muhammad Arif Fadhlurrahman, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Anngota Partai Ummat	KOTA BEKASI	JAWA BARAT

102	M. Irfan Alghifari, S.H	Laki-laki	S1	DPP PARTAI PBB	Kadiv Riset dan Program LABH Bulan Bintang	KAB. BOGOR	JAWA BARAT
103	Amelia Suhaili, S.H., M.H., CPHM., CPArb.	Perempuan	S2	DPW Banten Partai Ummat	Wakil Ketua Bidang Advokasi Partai Ummat DPW Banten	KAB. SERANG	BANTEN
104	Lourensius Milla Dadi, S.Sos.	Laki-laki	S1	DPW PSI NTT	Wakil Ketua DPW	KAB. SUMBA BARAT DAYA	NUSA TENGGARA TIMUR
105	Hamjah Diha	Laki-laki	S3	DPW PBB NTB	Sekretaris BAPILU PBB NTB/Ketua Pemuda Bulan Bintang NTB	KAB. LOMBOK TENGAH	NUSA TENGGARA BARAT
106	Adi Syahrudin Jamaluddin, S.H.	Laki-laki	S1	DPP PPP	Staf LABH	KAB. BEKASI	JAWA BARAT
107	A. Habib Amanatullah Rahdar, SH	Laki-laki	S1	DPP PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	Anggota	KOTA JAKARTA SELATAN	D.K.I. JAKARTA
108	Moin Tualeka, S.H	Laki-laki	S1	Sekretaris LBH Pimnas PKN		KOTA AMBON	MALUKU
109	Memed Adiwinata, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP PPP	Anggot LABH	KOTA BOGOR	JAWA BARAT
110	Rizky Demores Larian, S.H.	Laki-laki	S1	DPP PPP	Staf Bidang Hukum	KOTA BOGOR	JAWA BARAT
111	Jimy Yansen, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai PERINDO	Tim Hukum DPP	KOTA JAKARTA TIMUR	D.K.I. JAKARTA
112	Muhamad Iqbal L. Nazim, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai PERINDO	Tim Hukum DPP	KOTA JAKARTA BARAT	D.K.I. JAKARTA
113	MOH,HILMAN BA, S.H.	Laki-laki	S1	DPP	ANGGOTA ALBH	KOTA BOGOR	JAWA BARAT
114	Salman Alfarisi Simanjuntak, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai PERINDO	Tim Hukum DPP	KOTA JAKARTA BARAT	D.K.I. JAKARTA
115	Dwi Sukwanto	Laki-laki	S1	DPP Partai Garuda	Anggota	KOTA JAKARTA UTARA	D.K.I. JAKARTA
116	Pandji Budi Santosa, S.H.	Laki-laki	S1	Jawa Barat Partai Buruh	Tim Hukum Partai Buruh	KAB. BEKASI	JAWA BARAT
117	Nasrullah, SH	Laki-laki	S1	LBH DPP PSI	Direktur	KOTA SERANG	BANTEN
118	Mashuri Nasution, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai PERINDO/	Tim Hukum DPP	KOTA MEDAN	SUMATERA UTARA
119	Francine Widjojo, S.H., M.H.	Perempuan	S2	DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Juru Bicara Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hewan DPP PSI	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
120	Hidayah, S.H.	Laki-laki	S1	Jawa Barat PARTAI BURUH	Tim Hukum Partai Buruh	KAB. BEKASI	JAWA BARAT
121	Lisa Nur Azizah, S.H.	Perempuan	S1	DPP PBB	Anggota LABH Bulan Bintang	KOTA JAKARTA SELATAN	D.K.I. JAKARTA
122	Andi Surya Wijaya, SH. MH.	Laki-laki	S2	DPP PPP	Ketua Bidang Hukum	-	-
123	Erfandi, SH. MH.	Laki-laki	S2	DPP PPP	Ketua LABH	-	-
124	Wawaftahni, S.H.	Laki-laki	S1	Banten Partal Buruh	Bendahara Exco	KAB. TANGERANG	BANTEN
125	Afrizal Muslim, S.H., M.M.	Laki-laki	S2	DPP PBB		KOTA BEKASI	JAWA BARAT
126	Okta Heriawan, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP PBB	Bendahara Umum LABH Bulan Bintang	KOTA TANGERANG	BANTEN

127	Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si. (Han)	Laki-laki	S2	DPP PBB	Ketua Umum LABH Bulan Bintang	KOTA BEKASI	JAWA BARAT
128	Dela Khoirunisa, S.H., M.H.	Perempuan	S2	DPP	Anggota LABH PBB Partai Bulan Bintang	KOTA JAKARTA SELATAN	D.K.I. JAKARTA
129	Lestari Manurung, S.H.	Perempuan	S1	DPD Provinsi DKI Jakarta HANURA	Bendahara	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
130	Muhammad Naryoko, M.S.I	Laki-laki	S2	DPW PPP Jawa Tengah	Anggota	KOTA SEMARANG	JAWA TENGAH
131	Akhmad Leksono, S.H.	Laki-laki	S1	DPP PPP	Anggota	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
132	Agus Sarjanto, S.H.	Laki-laki	S1	Partai Buruh Exco Pusat	Bendahara Umum	KAB. BOGOR	JAWA BARAT
133	Marlan Ifantri Lase	Laki-laki	S2	Exco Pusat	Wasekjend	KOTA DEPOK	JAWA BARAT
134	Gugun Kurniawan, S.H.	Laki-laki	-	DPP PPP		KAB. TASIKMALAYA	JAWA BARAT
135	Agus Supriyanto, S.H.	Laki-laki	S1	Jawa Timur Partai Buruh	Tim Hukum Partai Buruh	KOTA SURABAYA	JAWA TIMUR
136	Dr. Ariyanto, S.H., M.H.	Laki-laki	S3	DPW Papua Partai Gelora	Pengurus	KOTA JAYAPURA	PAPUA
137	Aditya Linardo Putra, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPW PSI DKI Jakarta	Kepala biro hukum DPW PSI Jakarta	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
138	Muhammad Yuntri, S.H., M.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Wasekjen DPP	KOTA JAKARTA TIMUR	D.K.I. JAKARTA
139	Rocky Prawira Pasaeno, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP HANURA	LBH PARTAI HANURA	KOTA JAKARTA TIMUR	D.K.I. JAKARTA
140	Heriyanto, S.H.	Laki-laki	S1	DPP PSI	Anggota LBH PSI	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
141	L.Lifkoi Vantar, S.H.,M.Hum.	Laki-laki	S2	Kalimantan Barat	Tim Hukum Partai Buruh	KOTA PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT
142	Rudy Imanuel, S.H MH	Laki-laki	S2	DPP	Ketua LBH Partai HANURA	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
143	Tiopan Tarigan, S.H.	Laki-laki	S1	DPD Provinsi Sumatera Utara	LBH DPD Sumut	KAB. DELISERDANG	SUMATERA UTARA
144	Ujang Priyatna, S.H	Laki-laki	S1	DPP	LBH PARTAI HANURA	KOTA JAKARTA BARAT	D.K.I. JAKARTA
145	MUHAMMAD ROMZUL ISLAM, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Partai Ummat Jatim	Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Surabaya	KOTA SURABAYA	JAWA TIMUR
146	Zebulon T. Yohame, S.T.	Laki-laki	S1	DPD Papua Pegunungan	Sekretaris DPD	KAB. MAMBERAMO RAYA	PAPUA
147	Tabroni Bin M. Cahya	Laki-laki	S1	PARTAI PKN Prov. Papua Tengah	Ketua LBH PKN Papua Tengah	KAB. NABIRE	PAPUA TENGAH
148	Octo Arystho Emerson, S.H.	Laki-laki	S1	DPP PSI	Anggota	KAB. TANGERANG	BANTEN
149	Remsy Maroi Nuniary, S.H.	Laki-laki	S1	Ketua LBH Prov. Maluku PKN		KOTA AMBON	MALUKU
150	Said Salahudin, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	Exco Pusat Partai Buruh	Ketua Tim Khusus	KOTA JAKARTA TIMUR	D.K.I. JAKARTA
151	Yasen, S.H.	Laki-laki	S1	GELORA		KOTA TANGERANG	BANTEN
152	Musliadi, S.H.	Laki-laki	S1	HANURA		KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA
153	Agus Salim	Laki-laki	-		PPP	KOTA JAKARTA PUSAT	D.K.I. JAKARTA